



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN
PANRB

2023



menpan.go.id



@kempnrb



kemenpanrb

**#bangga
melayani
bangsa**



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian PANRB Tahun 2020-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PANRB mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian PANRB. Kinerja Kementerian PANRB diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan

civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efesiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kementerian PANRB pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kementerian PANRB secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance*, dan *Clean Government*

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi



Abdullah Azwar Anas, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
B. Mandat dan Peran Strategis.....	4
C. Sistematika Laporan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Rencana Strategis 2020-2024	6
B. Prioritas Nasional Tahun 2023	8
C. Perjanjian Kinerja 2023	10
D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. Pengukuran Kinerja.....	15
B. Analisis Capaian Kinerja.....	17
C. Capaian Kinerja Lainnya	48
D. Realisasi Anggaran.....	50
BAB IV PENUTUP.....	52
LAMPIRAN	

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian PANRB.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 29 Februari 2024

Inspektur Kementerian PANRB



Aan Syaiful Ambia

NIP. 196709161988031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Kementerian PANRB tahun 2023. Kementerian PANRB pada tahun 2023 memiliki 6 (enam) sasaran strategis dengan total 11 (sebelas) indikator kinerja, dan 17 (tujuh belas) target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 17 (tujuh belas) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 12 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target; dan
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 4 target:

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kementerian PANRB tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tujuan 1

Terwujudnya Birokrasi Yang Berkualitas, Kapabel, dan Berdaya Saing

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Kelembagaan yang Sederhana, Responsif, Adaptif dan Kolaboratif serta SPBE yang Terintegrasi	Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional	69	69,82	101,19
		Jumlah K/L/Pemda dengan Indeks maturitas SPBE "Baik" ke atas	318 K/L/D	388 K/L/D	122,01
		Indeks SPBE Nasional	2,6 (Predikat Baik)	2,79 (Predikat Baik)	107,31
2	Terwujudnya ASN yang Profesional	Skor <i>Employee Engagement</i> ASN	14,75%	42,04%	285,02
		Skor <i>Employer Branding</i> ASN	7,3%	56,81%	778,22
3	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif,	Nilai akuntabilitas kinerja rata – rata nasional	68	64,91	95,46

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
	Efisien dan Akuntabel	Persentase Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik"	K/L	96%	97,62%	101,69
			Prov	100%	100%	100,00
			Kab/ Kota	75%	75,79%	101,05
4	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Berintegritas	Jumlah unit kerja Percontohan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis (Kumulatif)		890 Unit Kerja	955 Unit Kerja	107,30
5	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Nasional		3,76	3,78	100,53
6	Peningkatan Efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional	Nilai Pelaksanaan RB Nasional	K/L	78	77,12	98,87
			Prov	70	69,91	99,87
			Kab/ Kota	58	59,40	102,41
		Persentase K/L/D yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi "Baik"	K/L	96%	100%	104,17
			Prov	94%	88,24%	93,87
			Kab/ Kota	38%	53,15%	139,87

Kinerja keuangan Kementerian PANRB tahun 2023 menunjukkan realisasi sebesar **Rp315.957.346.358,-** atau 98,63% dari total pagu anggaran sebesar **Rp320.334.025.000,-** .

Capaian kinerja Kementerian PANRB diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BAB I PENDAHULUAN

LAPORAN KINERJA

2023

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

www.menpan.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

Birokrasi yang berintegritas dan memiliki budaya melayani sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program-program pembangunan yang strategis dan berdampak besar bagi masyarakat. Birokrasi juga merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sejumlah komponen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik adalah penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas. Tata kelola pemerintahan yang baik tentunya dimulai dari aparatur pemerintah.

Dengan alasan tersebut, reformasi birokrasi harus dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi harus disertai rencana tindak (*action plan*) yang jelas serta implementasinya secara konkret dan konsekuen. Dengan demikian, upaya reformasi birokrasi dapat membawa implikasi yang nyata terhadap kinerja pelayanan publik. Dalam kaitan itu maka reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dalam seluruh aspeknya.

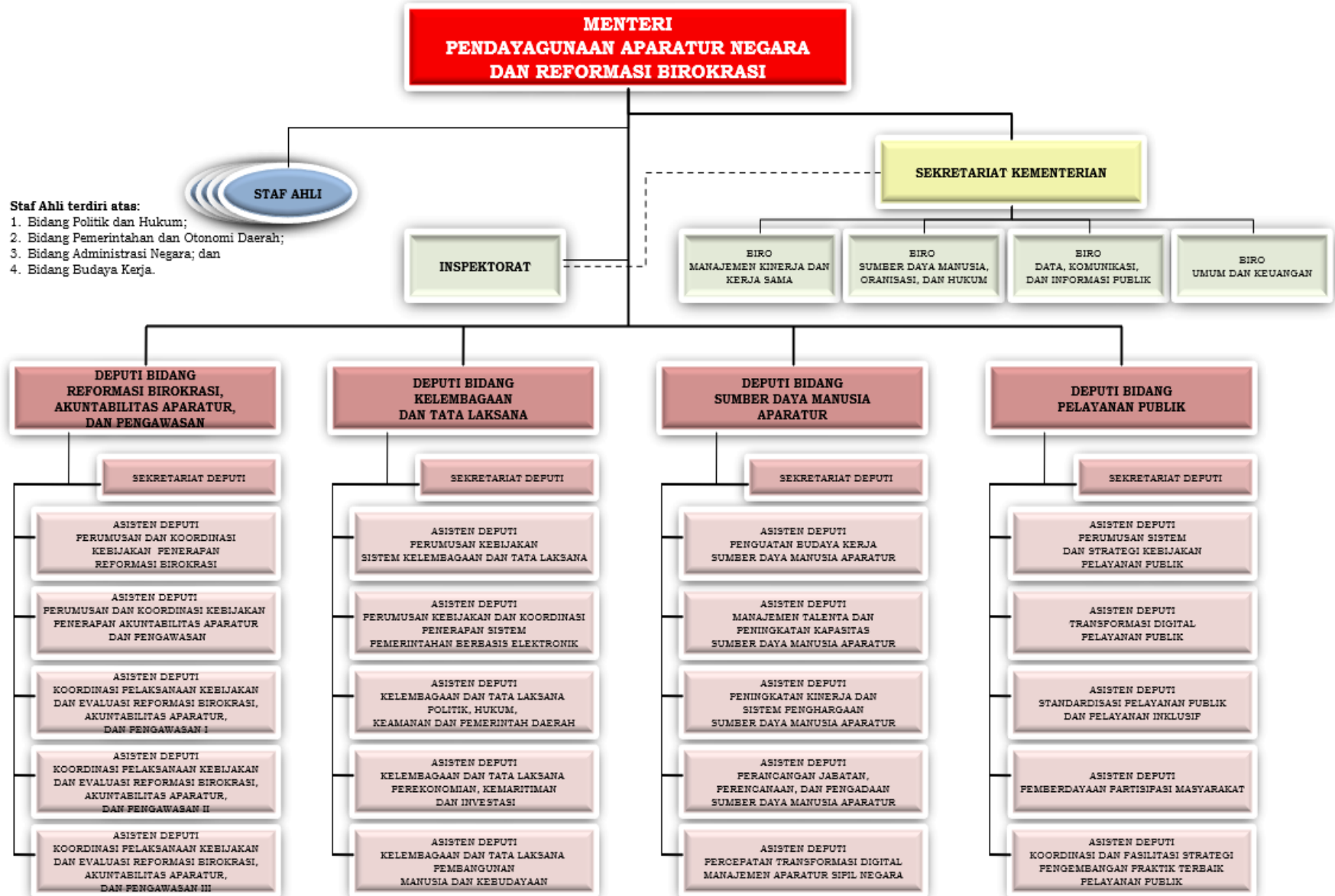
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kementerian PANRB) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian PANRB menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ditetapkan Struktur Organisasi Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:



B. Mandat dan Peran Strategis

Pada masa pemerintahan Kabinet Indonesia Maju periode 2020-2024, Kementerian PANRB menerima mandat yang sangat strategis, dari 5 (lima) arahan Presiden, terdapat 2 (dua) yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian PANRB, yaitu:

- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta; dan
- 2) Reformasi birokrasi, yaitu: a) kecepatan melayani dan memberi izin, b) menghapus pola pikir linier, monoton dan terjebak di zona nyaman; c) adaptif produktif, inovatif dan kompetitif.

Arahan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Kementerian PANRB dalam mengambil peran strategis, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PANRB 2020-2024 sebagai berikut:

1. Membangun SDM aparatur atau Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui manajemen talenta dan pelaksanaan sistem merit yang fokus kepada sektor-sektor pilihan dengan memperhatikan kebutuhan dan karakter lokal;
2. Mendorong peningkatan peran diaspora dalam pembangunan bangsa dan Negara terutama pada sektor-sektor pilihan misalnya kesehatan dan pendidikan;
3. Membangun kelembagaan yang antisipatif, adaptif, dan produktif;
4. Mengembangkan sistem pelayanan publik yang mendorong investasi dengan lebih cepat terutama mempercepat proses perijinan dan memberikan solusi terhadap hambatan pelayanan;
5. Mengembangkan dan replikasi inovasi agar pelaksanaan pelayanan publik dapat lebih cepat dan efisien; dan
6. Mempercepat reformasi birokrasi pada sektor-sektor pilihan agar pencapaian tujuan nasional dapat dipercepat sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran.

Selain itu, pada pelantikan Menteri PANRB pada tanggal 7 September 2022, Presiden Joko Widodo memberikan arahan dan harapan terkait reformasi birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang berdampak sehingga dirasakan langsung oleh masyarakat;
2. Reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas; serta
3. Birokrasi yang lincah dan cepat.

Dan untuk menjawab arahan dan harapan Presiden tersebut Menteri PANRB menetapkan 7 Program Prioritas Kementerian PANRB, yaitu:

1. Pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian, berdampak pada jutaan ASN;
2. Penerapan reformasi birokrasi tematik pada 4 (empat) klaster prioritas;
3. Transformasi profesionalisme ASN berbasis digital (meliputi penyederhanaan birokrasi dan jabatan fungsional) dan penataan tenaga non-ASN (honorar);
4. Akselerasi pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital di seluruh Indonesia;
5. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
6. Percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan, tata kelola, dan ASN menuju IKN dan DOB Papua; dan
7. Transformasi sistem pendidikan ASN mendukung percepatan reformasi birokrasi tematik.

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta mandat dan peran strategis Kementerian PANRB.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Prioritas Nasional, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BAB II PERENCANAAN KINERJA

LAPORAN KINERJA

2023

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

www.menpan.go.id

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Renstra Kementerian PANRB Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Dalam Renstra 2020-2024 disebutkan Visi Kementerian PANRB adalah: ***“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia”***, dengan Misi :

1. Menciptakan kelembagaan dan tata kelola birokrasi yang ramping, lincah, terintegrasi dan berbasis elektronik – *digital bureaucracy*.
2. Membangun SDM aparatur yang adaptif, profesional, kompetitif dan berwawasan global.
3. Mengembangkan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel.
4. Menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen dan berintegritas.
5. Mewujudkan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan melayani.
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

Selanjutnya, dalam Renstra Kementerian PANRB juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu

1. Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing; dan
2. Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkualitas dan kapabel.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh Kementerian PANRB pada akhir periode Renstra tahun 2024. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta target indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Matriks Perencanaan Kinerja Kementerian PANRB
Periode 2020-2024

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
Tujuan 1: Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing	Nilai Pelaksanaan RB Nasional	KL: 80 Prov: 71 Kab/Kota: 67
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi	Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional	Skor 62 (Efektif)
	Indeks SPBE Nasional	2,6
	Jumlah K/L/Pemda yang Mencapai Predikat SPBE “Baik”	371 IP
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera	Indeks Sistem Merit	0,8
	Indeks Profesionalitas ASN	80
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata Nasional	71
	Persentase K/L/Pemda yang memiliki nilai Implementasi SAKIP “B” ke Atas	KL: 100% Prov: 100% Kab/Kota: 100%
Sasaran Strategis 4: Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas	Jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis	500 Unit Kerja
Sasaran Strategis 5: Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik Nasional.	3,75
Sasaran Strategis 6: Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional	Persentase K/L/Pemda yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi “Baik”	KL: 100% Prov: 100% Kab/Kota: 100%

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
Tujuan 2: Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkualitas dan kapabel	Nilai Pelaksanaan RB Kementerian PANRB	83
Sasaran Strategis 7: Terwujudnya kelembagaan Kementerian PANRB yang efektif dan efisien	Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Kementerian PANRB	Skor 61 (Efektif)
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian PANRB	Sangat Baik
Sasaran Strategis 8: Terwujudnya ASN Kementerian PANRB yang profesional, berintegritas, dan sejahtera	Indeks Sistem Merit Kementerian PANRB	0,9
	Indeks Profesionalitas ASN Kementerian PANRB	80
Sasaran Strategis 9: Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkinerja tinggi, dan akuntabel	Nilai Implementasi SAKIP Kementerian PANRB	85
	Opini BPK	WTP
Sasaran Strategis 10: Terwujudnya kualitas pelayanan public Kementerian PANRB yang prima	Indeks Pelayanan Publik Kementerian PANRB	3,75

B. Prioritas Nasional Tahun 2023

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, Bappenas menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Sedangkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* yang memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi K/L yang bersangkutan.

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN), dan di antara 7 (tujuh) PN tersebut Kementerian PANRB diberikan peran pencapaian output dalam menyukseskan 3 (tiga) PN, yaitu:

- a. PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- b. PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; dan
- c. PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (polhukhankam), dan transformasi pelayanan publik

Tabel 2.2 Matriks Prioritas Nasional-Program Prioritas-Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas pada RKP 2023 yang terkait dengan Kementerian PANRB

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	Proyek Prioritas (ProP)
PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	Revolusi Mental dalam sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti	Peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya
			Penerapan disiplin, <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam birokrasi
PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Transformasi Digital	Pemanfaatan Infrastruktur TIK	Pemanfaatan TIK Layanan Pemerintah

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	Proyek Prioritas (ProP)
PN 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Penguatan penyelenggara pemilu
	Reformasi birokrasi dan tata kelola	Transformasi Manajemen SDM Aparatur	Penguatan budaya kerja dan <i>employee branding</i>
			Percepatan peningkatan kapasitas SDMA
			Peningkatan kinerja dan sistem penghargaan
			Pengembangan talenta dan karir
			Percepatan transformasi digital manajemen ASN
			Perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan SDM Aparatur
		Transformasi pelayanan publik	Pelayanan publik berbasis elektronik (<i>e-services</i>) yang terintegrasi
			Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik
			Penguatan ekosistem inovasi
		Penataan kelembagaan dan proses bisnis	Penataan kelembagaan dan proses bisnis yang efektif
			Penerapan SPBE Terintegrasi

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	Proyek Prioritas (ProP)
		Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi

C. Perjanjian Kinerja 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian pada tahun 2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Menteri PANRB pada bulan Maret 2023, kemudian dilakukan revisi pada 24 November 2022. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

- 1) Penyesuaian target dengan target RKP 2023, yaitu Nilai Pelaksanaan RB Nasional
- 2) Penyesuaian target karena adanya perubahan cara pengukuran yaitu Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional
- 3) Penyesuaian satuan target, yaitu dari dari "**Persentase** K/L/Pemda dengan indeks maturitas SPBE "Baik" ke atas" menjadi "**Jumlah** K/L/Pemda dengan Indeks maturitas SPBE "Baik" ke atas", penyesuaian dilakukan untuk mempermudah alignment antar level organisasi.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur:

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.3 Perbandingan Perjanjian Kinerja Menteri PANRB Tahun 2023 sebelum dan sesudah perubahan

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Awal (Semula)	Target Revisi (Menjadi)
1	Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi.	1	Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan nasional.	69	69
		2	Persentase K/L/Pemda dengan indeks maturitas SPBE "Baik" ke atas.	K/L: 90% Prov: 70% Kab/Kota: 40%	(dihapus)
		2	Jumlah K/L/Pemda dengan Indeks maturitas SPBE "Baik" ke atas	(belum ada)	318 K/L/D
		3	Indeks SPBE Nasional.	2,6 (Predikat Baik)	2,6 (Predikat Baik)
2	Terwujudnya ASN yang profesional	1	Skor <i>Employee Engagement</i> ASN	14,75%	14,75%
		2	Skor <i>Employer Branding</i> ASN	7,3%	7,3%
3	Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional	68	68
		2	Persentase Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik"	KL: 96% Prov: 100% Kab/Kota: 75%	KL: 96% Prov: 100% Kab/Kota: 75%
4	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas	1	Jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis	890 Unit Kerja	890 Unit Kerja
5	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	1	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional.	3,60	3,76
6	Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional	1	Nilai Pelaksanaan RB Nasional	KL: 76 Prov: 66 Kab/Kota: 55	KL: 78 Prov: 70 Kab/Kota: 58
		2	Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi "Baik" (Kategori "B" ke atas)	KL: 96% Prov: 94% Kab/Kota: 38%	KL: 96% Prov: 94% Kab/Kota: 38%

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Menteri PANRB Tahun 2023 setelah revisi yang ditandatangani pada 24 November 2023 yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PANRB tahun 2023 ini.

D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

Pada tahun 2023 Kementerian PANRB mendapatkan tambahan anggaran dari **semula Rp224.316.330.000,00 menjadi Rp320.334.025.000,-** yang ditetapkan Menteri Keuangan melalui Surat Nomor: S-243/MK.2/2023, tanggal 5 Agustus 2023, Hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (BA 048) untuk Pencapaian Target Kinerja Kementerian PANRB tahun 2023. Secara lengkap anggaran Kementerian PANRB 2023 sebelum dan setelah tambahan anggaran adalah sebagai berikut:

Program-Kegiatan	Anggaran (dalam ribuan Rupiah)	
	Semula	Menjadi
Program Dukungan Manajemen	167.861.493	183.576.448
• Pelaksanaan Dukungan Perumusan Kebijakan PAN dan RB	667.123	609.370
• Pengelolaan Legislasi dan Litigasi	678.173	526.870
• Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	9.741.397	9.280.680
• Pengelolaan Keuangan. BMN dan Umum	136.725.775	155.664.601
• Pengelolaan Sistem dan Teknologi	3.690.040	3.403.701
• Pengelolaan Organisasi dan SDM	12.985.375	11.336.516
• Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	3.373.610	2.754.710
Program Kebijakan. Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN	56.454.837	136.757.577

Program-Kegiatan	Anggaran (dalam ribuan Rupiah)	
	Semula	Menjadi
• Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik	3.592.596	5.862.044
• Perumusan Kebijakan PANRB	7.913.311	16.468.375
• Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat	1.500.000	2.695.526
• Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi. Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan	11.372.993	28.163.012
• Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	8.035.889	44.405.943
• Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana	6.435.979	8.633.231
• Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Kebijakan SDM Aparatur	8.837.043	17.309.592
• Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik	8.767.026	1.321.9854
Jumlah	224.316.330	320.334.025



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN KINERJA

2023

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

www.menpan.go.id

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Kinerja Kementerian PANRB tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Menteri PANRB Tahun 2023. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Menteri PANRB merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode Renstra Kementerian PANRB 2020-2024. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar **175.94%** yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Kelembagaan yang Sederhana, Responsif, Adaptif dan Kolaboratif serta SPBE yang Terintegrasi.				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional	69	69,82	101,19
2	Jumlah K/L/Pemda dengan Indeks maturitas SPBE "Baik" ke atas	318 K/L/D	388 K/L/D	122,01
3	Indeks SPBE Nasional	2,6 (Predikat Baik)	2,79 (Predikat Baik)	107,31
Sasaran Strategis 2 Terwujudnya ASN yang Profesional				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Skor <i>Employee Engagement</i> ASN	14,75%	42,04%	285,02
2	Skor <i>Employer Branding</i> ASN	7,3%	56,81%	778,22

Sasaran Strategis 3					
Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel					
No	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata Nasional		68	64,91	95,46
2	Persentase Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik"	K/L	96%	97,62%	101,69
		Prov	100%	100%	100,00
		Kab/ Kota	75%	75,79%	101,05
Sasaran Strategis 4					
Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Berintegritas					
No	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Unit Kerja Percontohan yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM di Sektor Strategis		890 Unit Kerja	955 Unit Kerja	107,30
Sasaran Strategis 5					
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima					
No	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional		3,76	3,78	100,53
Sasaran Strategis 6					
Peningkatan Efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional					
No	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Pelaksanaan RB Nasional	K/L	78	77,12	98,87
		Prov	70	69,91	99,87
		Kab/ Kota	58	59,40	102,41

2	Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi “Baik” (Kategori ”B” ke atas”)	K/L	96%	100%	104,17
		Prov	94%	88,24%	93,87
		Kab/ Kota	38%	53,15%	139,87

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 12 (dua belas) target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 (satu) target; dan
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 4 (empat) target.

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Kelembagaan yang Sederhana, Responsif, Adaptif dan Kolaboratif serta SPBE yang Terintegrasi

Capaian indikator-indikator sasaran “Terwujudnya Kelembagaan yang Sederhana, Responsif, Adaptif dan Kolaboratif serta SPBE yang Terintegrasi” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.1 Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional	69	69,82	101,19
2.2 Jumlah K/L/Pemda dengan indeks maturitas SPBE “Baik” ke atas K/L	318 K/L/D	388 K/L/D	122,01
2.3 Indeks SPBE Nasional	2,6 (Predikat Baik)	2,79 (Predikat Baiki)	107,31

1,1 Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional

Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran merupakan paradigma baru untuk mengingatkan bahwa organisasi bersifat dinamis, Organisasi yang baik tidak hanya dilihat dari bentuk strukturnya, tetapi juga bagaimana

organisasi tersebut berproses untuk mencapai tujuannya, sehingga dapat diketahui berapa banyak struktur yang diperlukan,

Mengingat organisasi bersifat dinamis, maka perlu dilakukan evaluasi kelembagaan bagi instansi pemerintah untuk memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya, Evaluasi ini dilakukan mengingat tantangan organisasi kedepan yang semakin berat, sehingga perlu adanya gambaran apakah kelembagaan yang ada saat ini telah sesuai atau belum dengan tantangan tersebut,

Hasil evaluasi kelembagaan dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan struktur organisasi yang paling sesuai dengan beban kerja dan kondisi lingkungan, dan mengacu pada Permen-PANRB Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, Berdasarkan peraturan tersebut, evaluasi kelembagaan pemerintah dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali, Dalam Permen-PANRB tersebut juga disebutkan terdapat 5 tingkatan efektivitas kelembagaan yaitu:

No	Skor	Peringkat	Interpretasi
1.	81-100	Peringkat Komposit 5 (P-5)	Sangat Efektif
2.	61-80	Peringkat Komposit 4 (P-4)	Efektif
3.	41-60	Peringkat Komposit 3 (P-3)	Cukup Efektif
4.	21-40	Peringkat Komposit 2 (P-2)	Kurang Baik
5.	0-20	Peringkat Komposit 1 (P-1)	Tidak Baik

Hasil capaian Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional adalah 69,82 ("efektif"), Skor ini merupakan hasil validasi terhadap 319 K/L/Pemda yang telah menyampaikan hasil evaluasi kelembagaan mandiri dari tahun 2021 s.d 2023 (periode 3 tahun terakhir) yang terdiri dari 88 K/L, 17 Provinsi dan 214 Kab/Kota yang dapat dilihat tabel berikut ini:

No	Objek evaluasi	Peringkat Komposit				
		Tidak Baik	Kurang Baik	Cukup Efektif	Efektif	Sangat Efektif
1	K/L	-	-	-	65	23
2	Pemerintah Provinsi	-	-	1	15	1
3	Pemerintah Kab/Kota	3	1	14	182	14
Total		3	1	15	272	38

Untuk memenuhi target indikator Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional, Kementerian PANRB telah melakukan kegiatan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Penataan organisasi kelembagaan nasional (K/L/Pemda) berupa penyederhanaan birokrasi, dan penyusunan Perpres Kementerian/Lembaga,
- 2) Fasilitasi penetapan proses bisnis pada instansi pemerintah,
- 3) Pengolahan hasil evaluasi mandiri oleh Tim Verifikasi untuk mendapatkan hasil akhir penilaian evaluasi kelembagaan secara terukur,

Beberapa upaya akan dilakukan di tahun 2024 untuk mempertahankan/meningkatkan capaian, diantaranya :

- 1) Mengkaji kembali instrumen validasi hasil evaluasi kelembagaan, sehingga hasil validasi atas evaluasi kelembagaan dapat benar-benar mencerminkan kondisi kelembagaan pada K/L/Pemda tersebut, Dengan adanya instrument dapat menjadi pedoman yang lebih akurat bagi tim penilai/validasi hasil evaluasi kelembagaan sehingga mendapatkan hasil yang lebih objektif;
- 2) Mendorong K/L/Pemda yang belum melakukan evaluasi kelembagaan secara mandiri untuk dapat melakukan evaluasi kelembagaan sesuai yang diatur pada Permen-PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
- 3) Mengkaji kembali deskripsi target dan capaian, sehingga dapat lebih mencerminkan sejauh mana evaluasi kelembagaan terhadap K/L/Pemda sudah dilakukan,

Perbandingan realisasi Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional tahun 2020 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

**Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan Nasional
Tahun 2020 s.d 2023**

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
73,98 (Efektif)	67,06 (Efektif)	69,48 (Efektif)	69,82 (Efektif)

1.2 Jumlah K/L/Pemda dengan Indeks Maturitas SPBE “Baik” ke Atas

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan/penerapan SPBE di K/L/Pemda, Indeks SPBE diperoleh dari hasil evaluasi SPBE terhadap K/L/Pemda yang dilakukan secara periodik untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari penerapan SPBE di setiap K/L/Pemda,

Pengukuran Nilai Indeks SPBE tahun 2023 menggunakan Permen-PANRB Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Dalam peraturan tersebut juga dijabarkan predikat penilaian SPBE yang mempresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

No	Nilai Indeks	Predikat
1.	4,2 - 5,0	Memuaskan
2.	3,5 - <4,2	Sangat Baik
3.	2,6 - <3,5	Baik
4.	1,8 - <2,6	Cukup
5.	< 1,8	Kurang

Hasil pengukuran Indeks Maturitas SPBE pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	K/L/Pemda	Jumlah yang dievaluasi	Predikat “Baik” ke atas	%
1	K/L	92	83	90,22
2	Pemerintah Provinsi	38	28	73,68
3	Pemerintah Kab/Kota	491	277	56,42
Total		621	388	

Rincian hasil pemantauan dan evaluasi SPBE dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja ini.

Perbandingan realisasi Jumlah K/L/Pemda dengan Indeks Maturitas SPBE “Baik” ke Atas tahun 2020 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

**Jumlah K/L/Pemda dengan Indeks Maturitas SPBE “Baik” ke Atas
Tahun 2020 s.d 2023**

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
247	159	159	388

Penurunan realisasi pada tahun 2021 jika dibandingkan realisasi tahun 2020 adalah karena perubahan kebijakan pengukuran, yaitu dari Permen-PANRB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi Permen-PANRB Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1.3 Indeks SPBE Nasional

Pelaksanaan evaluasi SPBE tahun 2023 menghasilkan Indeks SPBE Nasional sebesar 2,79, Terjadi kenaikan sebesar 0,45 dari nilai indeks sebelumnya yaitu 2,34 pada tahun 2022, Realisasi tersebut sudah mencapai 107,31% dari yang ditargetkan di tahun 2023 yaitu 2,6.

Adapun Perbandingan realisasi Indeks SPBE Nasional tahun 2020 s.d 2023 adalah sebagai berikut

Indeks SPBE Nasional Tahun 2020 s.d 2023

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
2,26	2,24	2,34	2,79

Penurunan realisasi pada tahun 2021 jika dibandingkan realisasi tahun 2020 pada indikator ini juga, karena perubahan kebijakan pengukuran, yaitu dari Permen-PANRB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi Permen-PANRB Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian Persentase K/L/Pemda dengan indeks maturitas SPBE “Baik” ke atas dan Indeks SPBE Nasional, pada Tahun 2023 adalah:

- 1) Sosialisasi kebijakan;
- 2) Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan; dan
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi maturitas SPBE kepada 620 K/L/Pemda, dalam rangka mengetahui sudah sejauh mana pembangunan SPBE pada setiap K/L dan Pemda, dan perbaikan apa yang dapat dilakukan dalam rangka percepatan target-target yang diharapkan,

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja Persentase K/L/Pemda dengan indeks maturitas SPBE “Baik” ke atas dan Indeks SPBE Nasional pada tahun 2024, diantaranya:

- 1) Melakukan asistensi (pendampingan) dan piloting kepada K/L/Pemda oleh Kementerian PANRB dalam rangka peningkatan penerapan dan perbaikan Indeks SPBE sesuai arah dan tujuan penerapan SPBE yang terpadu dan terintegrasi;
- 2) Meminta seluruh K/L/Pemda agar melakukan pemantauan dan menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Kementerian PANRB untuk dilakukan penilaian dokumen (*desk evaluation*): dan

- 3) Melakukan evaluasi SPBE terhadap K/L/P yang belum dievaluasi pada tahun 2024 untuk penyempurnaan data *baseline* hasil evaluasi SPBE secara menyeluruh,

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya ASN yang Profesional

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya ASN yang Profesional” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.1 Skor <i>Employee Engagement</i> ASN	14.75%	42.04%	285.02%
2.2 Skor <i>Employer Branding</i> ASN	7.30%	56.81%	778.22%

2.1 Skor *Employee Engagement* ASN

Skor *Employee Engagement* ASN merupakan gambaran tingkat keterikatan pegawai ASN dengan Instansi Pemerintahnya. Pada sisi yang lain hal ini menunjukkan Instansi Pemerintah mampu mempertahankan ASN sebagai talenta-talenta terbaik. Tujuan penyelenggaraan survei Skor *Employee Engagement* ASN adalah mengetahui tingkat keterikatan pegawai ASN. Berdasarkan data tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan komitmen pegawai ASN dalam berkinerja, dan mempertahankan pegawai ASN sebagai talenta-talenta terbaik.

Populasi survei *Employee Engagement* adalah seluruh pegawai ASN di seluruh instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga (lembaga pemerintah nonkementerian, sekretariat lembaga negara, dan lembaga nonstruktural), maupun instansi pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota). Sampel ditetapkan secara quota pegawai ASN yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan total sampel sebesar 300.138 pegawai ASN dari 622 Instansi pemerintah. Secara total, terdapat 92 instansi

pemerintah yang termasuk dalam kategori ini, terdiri dari 21 kementerian/lembaga, 5 (lima) provinsi, dan 66 kabupaten/kota.

Berdasarkan sebaran responden dapat dibedakan atas responden instansi pusat, responden pemerintah daerah di wilayah Indonesia Barat (WIB), responden pemerintah daerah di wilayah Indonesia Tengah (WITA), dan responden pemerintah daerah di wilayah Indonesia Timur (WIT). Dari pengelompokan tersebut, diketahui bahwa responden paling banyak berasal dari pemerintah daerah WIB sebanyak 183.571 (61,2%) sedangkan paling sedikit berasal dari pemerintah daerah WIT sebanyak 6.051 responden (2,0%).

Responden dengan pemilahan berdasarkan jenis kelamin menunjukkan jumlah yang relatif berimbang, yaitu 56 persen responden (168.191 orang) berjenis kelamin perempuan dan 44 persen sisanya (131.947 orang) berjenis kelamin laki-laki. Profil ini cenderung merefleksikan populasi pegawai ASN berdasarkan Statistik ASN yang dirilis Badan Kepegawain Negara (BKN) pada Semester I Tahun 2023, dengan proporsi 45 persen laki-laki dan 55 persen perempuan.

Namun demikian, pada proporsi sampel berdasarkan status kepegawaian, terdapat kondisi yang agak berbeda dimana sampel survei EE didominasi oleh PNS sebanyak 276.103 orang (92%) dan hanya 24.035 responden (8,0%) yang merupakan PPPK. Dalam Statistik ASN Semester I Tahun 2023, pegawai ASN terdiri dari 89 persen PNS dan 11 persen PPPK.

Pengumpulan data dilakukan melalui online survey. Instrumen untuk survei *Employee Engagement* memiliki 2 (dua) pertanyaan utama. Pada pertanyaan pertama, responden diminta untuk memberikan skala penilaian terhadap pernyataan yang diberikan.

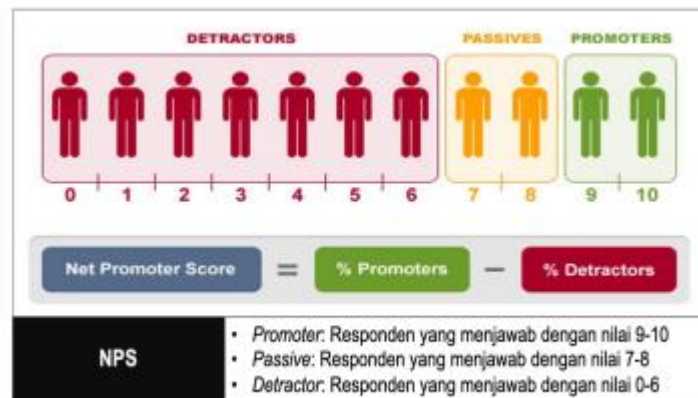
1. Dari skala 0 sampai 10, seberapa besar kemungkinan Anda akan menyarankan orang lain (keluarga, teman, dan lain-lain) untuk memilih pekerjaan/profesi Aparatur Sipil Negara (ASN)? (Klik pada skala yang paling sesuai menggambarkan diri Anda)

Sangat Tidak Menyarankan	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Sangat Menyarankan
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Pertanyaan kedua merupakan pertanyaan terbuka, di mana responden diminta memberikan jawaban spesifik yang dapat menggambarkan alasan pemilihan skala penilaian pada pertanyaan pertama.

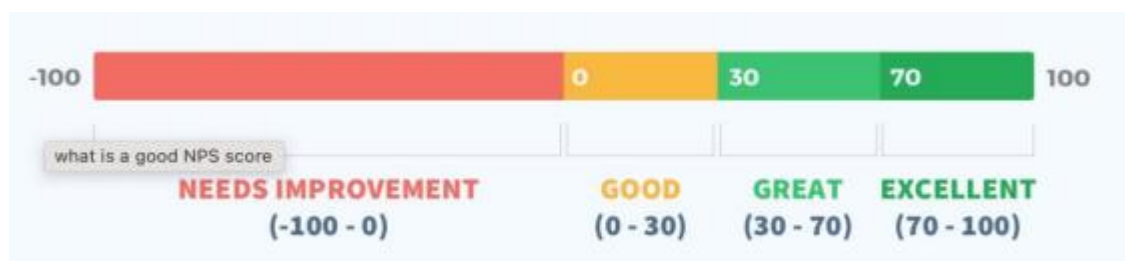
2. Apakah alasan utama Anda dalam memilih skala jawaban pada pertanyaan di atas? (Dimohon untuk menjelaskan alasan tersebut secara spesifik)

Pengolahan data untuk pertanyaan pertama dilakukan dengan metode Net Promoter Score (NPS).



Metode Net Promoter Score (NPS)

Lebih lanjut, NPS diterjemahkan ke dalam predikat berdasarkan proporsinya sesuai dengan interval sebagai berikut:



Interval Interpretasi Skor NPS

Pengolahan data untuk pertanyaan kedua dilakukan secara kualitatif melalui kategorisasi dan analisis jawaban berdasarkan strategi 6P untuk akselerasi transformasi ASN.

2.2 Skor *Employer Branding* ASN

Skor *Employer Branding* ASN merupakan gambaran tingkat ketertarikan masyarakat non-ASN untuk bergabung menjadi ASN serta mengetahui citra dan persepsi masyarakat terhadap profesi ASN. Tujuan penyelenggaraan Skor *Employer Branding* ASN adalah mengetahui tingkat ketertarikan masyarakat non-ASN untuk bergabung menjadi ASN serta mengetahui citra dan persepsi masyarakat terhadap profesi ASN.

Pada survei *Employer Branding*, sampel diambil secara purposive dari populasi masyarakat non-ASN kepada:

- 1) Mahasiswa PTN dan PTS tertentu;
- 2) Pegawai swasta, pegawai BUMN, pegawai BUMD tertentu pada berbagai jenjang jabatan mulai entry level, middle level, hingga executive level; dan
- 3) Diaspora (WNI yang berada di luar negeri) yang merupakan mahasiswa dan pegawai profesional.

Total responden survei *Employer Branding* (EB) pada tahun 2023 adalah sebanyak 6.129 orang yang terdiri dari 1.339 mahasiswa (21,85%) dan 4.790 pegawai (78,15%).

Sama seperti pengukuran *Employee Engagement*, pengumpulan data dilakukan melalui online survey. Instrumen untuk survei memiliki 2 (dua) pertanyaan utama. Pada pertanyaan pertama, responden diminta untuk memberikan skala penilaian terhadap pernyataan yang diberikan.

1. Dari skala 0 sampai 10, seberapa besar ketertarikan Anda untuk bergabung dan bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)? (Klik pada skala yang paling sesuai menggambarkan diri Anda)

Sangat Tidak Tertarik 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Tertarik

Untuk pertanyaan kedua, sama seperti survei *Employee Engagement*, merupakan pertanyaan terbuka, di mana responden diminta memberikan jawaban spesifik yang dapat menggambarkan alasan pemilihan skala penilaian pada pertanyaan pertama.

2. Apakah alasan utama Anda dalam memilih skala jawaban pada pertanyaan di atas? (Dimohon untuk menjelaskan alasan tersebut secara spesifik)

Kemudian, pengolahan data pada survei Employer Branding juga melakukan metode NPS, metode yang sama dengan pengolahan data pada survei *Employee Engagement*.

Realisasi kinerja Skor *Employee Engagement* dan *Employer Branding* ASN tahun 2023 melebihi target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023. Capaian tersebut merupakan korelasi positif implementasi strategi 6P terhadap gambaran tingkat ketertarikan masyarakat non ASN untuk bergabung menjadi ASN. Berdasarkan evaluasi terdapat faktor-faktor signifikan yang mendukung meningkatnya Skor Employer Branding ASN:

- a. Pada indikator Jumlah IP yang berpartisipasi dalam Culture Fest 2023 menunjukkan capaian sesuai dengan target yaitu 100 Instansi Pemerintah. Fungsi Culture Fest 2023 selain digunakan untuk mendukung penguatan budaya kerja, turut dilakukan untuk menaikkan citra Institusi dan branding ASN. Pengukuran ini digunakan untuk:
 - 1) sarana sosialisasi penguatan budaya kerja bagi ASN khususnya serta masyarakat umum terkait kegiatan/program penguatan budaya kerja yang telah dilakukan oleh Instansi Pemerintah;
 - 2) kontribusi positif agar senantiasa meningkatkan pelayanan publik yang optimal; dan
 - 3) meningkatkan kualitas implementasi manajemen ASN.
- b. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik ditetapkan layanan Chatbot untuk memberikan Layanan Konsultasi kebijakan Kedeputian Bidang SDM Aparatur. Dengan adanya Sistem Layanan Chatbot ini, maka pelayanan terkait dengan SDM Aparatur terutama dalam menjawab FAQ (Frequently Asked Question) dapat dilakukan secara otomatis sehingga diharapkan pelayanan konsultasi yang diberikan Kedeputian SDM Aparatur menjadi lebih efektif dan efisien serta dapat menjadi wadah terwujudnya sistem pelayanan berjenjang berbasis digital

yang ideal. Pada tahun 2023 ditetapkan target sebesar 1,200 users yang aktif dalam Chatbot dan realisasi yang tercatat sebanyak 13,474 users yang aktif dalam Chatbot.

Pada tahun 2023, Chatbot Si PANDay telah diimplementasikan pada 2 aplikasi berkirim pesan, yaitu Whatsapp dan Telegram. Chatbot tersebut dapat diakses melalui Whatsapp pada nomor 0896-2707-1998 dan melalui Telegram pada akun @SiPANDayBot. Selain pada aplikasi berkirim pesan, chatbot Si PANDay juga dapat diakses pada laman web Kementerian PANRB.

Dalam rangka peningkatan engagement chatbot, pada tahun 2023 Chatbot Si PANDay telah dipromosikan melalui paparan-paparan Menteri PANRB dan/atau paparan Kementerian PANRB lainnya pada berbagai acara. Hal tersebut dilakukan dengan menambahkan slide promosi chatbot pada paparan Menteri dan/atau Kementerian PANRB. Serta dilakukan promosi chatbot di kanal Youtube Kementerian PANRB dalam acara “Bisa Tanya Kebijakan PANRB”. Promosi tersebut dilihat oleh ASN dan Masyarakat yang menyaksikan secara live maupun replay.

Peningkatan user engagement Chatbot Si PANDay dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan keluarnya kebijakan strategis Kementerian PANRB, salah satunya Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional dan bertambahnya jalur akses *chatbot*.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Capaian indikator-indikator sasaran “Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata Nasional	68,00	64,91	95,46

Indikator		Target	Realisasi	Capaian (%)
2.4 Persentase Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik"	K/L	96%	97.62%	101,69
	Prov	100%	100.00%	100,00
	Kab/ Kota	75%	75,79%%	101,05

3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata Nasional

Sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun, hasil pengukuran atas Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata Nasional tahun 2023 belum tersedia, sehingga dalam Laporan Kinerja ini masih menyajikan Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata Nasional tahun 2022,

Perbandingan realisasi Nilai Akuntabilitas Rata-rata Nasional tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata Nasional tahun 2020 s,d 2023

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
67,15	67,93	68,40	64,91

3.2 Persentase Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik"

Nilai Akuntabilitas Kinerja menggambarkan sudah sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakannya, Nilai tersebut diperoleh melalui Evaluasi Implementasi SAKIP yang dilakukan berdasarkan Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Berdasarkan kebijakan tersebut, hasil penilaian evaluasi SAKIP di instansi pemerintah dapat dikategorikan sebagai berikut:

No	Nilai	Predikat	Interpretasi
----	-------	----------	--------------

1,	>90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
2,	>80 – 90	A	Memuaskan
3,	>70 – 80	BB	Sangat Baik
4,	>60 – 70	B	Baik
5,	>50 – 60	CC	Cukup (Memadai)
6,	>30 – 50	C	Kurang
7,	>0 – 30	D	Sangat Kurang

Berdasarkan tabel di atas, Instansi pemerintah yang memiliki Nilai Akuntabilitas Kinerja **“Baik”** adalah instansi pemerintah yang nilai total akuntabilitas kinerja di atas 60 (enam puluh) atau memiliki predikat B ke atas,

Rincian K/L/Pemda dengan nilai akuntabilitas kinerja “Baik” ke atas, adalah sebagai berikut:

Instansi	Populasi	Predikat				Total	%
		B	BB	A	AA		
K/L	84	34	38	10	0	82	97.62%
Pemerintah Provinsi	34	17	11	5	1	34	100.00%
Pemerintah Kab/Kota	508	308	62	15	0	385	75.79%

Perkembangan instansi pemerintah dengan akuntabilitas kinerja “Baik” terus meningkat, baik itu pada tingkat K/L, maupun pada tingkat pemerintah kabupaten/kota.

Perbandingan realisasi Persentase K/L/D yang memiliki nilai Implementasi SAKIP “B” keatas tahun 2020 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

Persentase Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja “Baik”

IP	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
K/L	95,24%	95,06%	95,06%	97.62%
Prov	97,06%	100,00%	100,00%	100.00%
Kab/Kota	63,98%	65,75%	72,05%	75,79%%

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel antara lain:

1. Asistensi implementasi SAKIP baik asistensi yang bersifat mandiri maupun asistensi yang berasal dari surat undangan;
2. Konsultasi (*coaching clinic*) online (melalui zoom ataupun WA) kepada IP terkait implementasi SAKIP; dan
3. Monitoring atas progres implementasi SAKIP melalui evaluasi dengan memastikan rekomendasi tahun sebelumnya sudah ditindaklanjuti atau belum, serta hal baru yang dilakukan untuk memperkuat implementasi SAKIP.

Keberhasilan dari kinerja mewujudkan birokrasi yang akuntabel dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:

1. Komitmen pimpinan utamanya pada IP yang di berikan bimbingan teknis; dan
2. Pemahaman antara tim SAKIP (Bappeda, Bagian Organisasi, dan Inspektorat) terhadap implementasi SAKIP.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan persentase instansi pemerintah yang memiliki Nilai Akuntabilitas Kinerja Baik (kategori “B” ke atas) antara lain:

1. Pimpinan (pimpinan daerah dan PD) belum sepenuhnya menunjukkan komitmennya dengan terlibat langsung dan aktif dalam membangun dan monitoring implementasi SAKIP;
2. Keterbatasan akses dan jaringan pada beberapa daerah, khususnya untuk daerah timur;

3. Pemahaman SAKIP yang belum merata pada internal instansi pemerintah tersebut;
4. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM yang menangani SAKIP di Pemerintah Daerah, serta mutasi dan rotasi pegawai tanpa mempertimbangkan ketersediaan SDM yang menangani SAKIP;
5. Terbatasnya sumber daya manusia yang memberikan pendampingan dan evaluasi kepada instansi serta minimnya waktu yang tersedia untuk melakukan hal tersebut; dan
6. Instansi pemerintah masih dalam proses menyesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021.

Langkah kedepan yang akan dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah antara lain adalah:

1. Melakukan pembinaan secara intensif terkait implementasi SAKIP kepada Instansi Pemerintah. Pembinaan diawali dengan melakukan pemetaan dan profiling instansi pemerintah predikat SAKIP “C” dan “CC” serta yang berpotensi naik predikat B. Selanjutnya diadakan pertemuan dan *sharing knowledge* melalui asistensi baik secara daring maupun luring;
2. Mendorong kepada pimpinan pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota agar memperbaiki dokumen kinerja terutama pada dokumen RPJMD, renstra OPD, perjanjian kinerja dan perbaikan pelaksanaan pengukuran kinerja, dengan fokus sebagai berikut:
 - a. perbaikan sasaran dan indikator kinerja menjadi lebih berorientasi hasil, relevan, dan terukur;
 - b. perbaikan cascading/distribusi kinerja sampai ke setiap pegawai;
 - c. perbaikan program, kegiatan dan rinciannya dengan memastikan adanya keterkaitan erat dengan pencapaian sasaran dan keterkaitan program/kegiatan antar perangkat daerah;
3. Mendorong kerjasama dan kolaborasi dengan pemerintah provinsi, tim asistensi daerah, dalam peningkatan kualitas SDM dan kualitas implementasi SAKIP;
4. Membuat percontohan penerapan SAKIP yang baik pada wilayah Sulawesi dan papua sehingga mudah pemda untuk melakukan benchmarking.

5. Penambahan jumlah sumber daya pendamping dan evaluator yang kompeten melalui pemberdayaan terhadap inspektorat pemerintah provinsi, kabupaten/kota, BPKP dan perguruan tinggi, serta tim asistensi daerah;
6. Menetapkan reward and punishment sebagai bagian dari pemberian tunjangan kinerja daerah; dan
7. Meningkatkan kapasitas SDM evaluator internal untuk menunjang pembinaan dan evaluasi SAKIP yang lebih optimal, sehingga dapat mendorong kemajuan SAKIP pada setiap instansi pemerintah. Evaluator selain sebagai penilai juga sebagai pendamping dalam pemberian konsultasi kepada instansi pemerintah terkait implementasi SAKIP. Dengan Kapasitas SDM Evaluator yang semakin meningkat, diharapkan instansi pemerintah binaannya juga akan meningkat pengetahuan dan dapat mengimplementasikan SAKIP dengan baik. Peningkatan kapasitas ini dilakukan melalui pembinaan internal melalui *upgrading* dan *sharing knowledge* secara berkala dengan para evaluator senior.

Sasaran Strategis 4

Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.1 Jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis	890 Unit Kerja	955 Unit Kerja	107,30

4.1 Jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis,

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, mengamanatkan pembangunan zona integritas yang intensif di instansi aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung) dan

unit layanan strategis tertentu, antara lain: Kantor Pertanahan, Syahbandar, Lembaga Pemasyarakatan, Bea Cukai, Imigrasi, BNP2TKI dan Unit layanan Pendidikan,

Realisasi indikator kinerja ini hanya diukur dari unit kerja pada sektor strategis tersebut yang berhasil mendapatkan predikat WBK/WBBM, sesuai kriteria Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 tahun 2021 sampai dengan tahun berjalan, jadi bersifat kumulatif, Sehingga realisasi indikator ini adalah 955 unit kerja atau 107,30% dari yang ditargetkan di tahun 2023 yaitu 890 unit kerja,

Capaian yang baik tersebut diperoleh karena sepanjang tahun 2023 Kementerian PANRB melakukan beberapa upaya, diantaranya:

- 1) Melakukan sosialisasi kebijakan terkait pembangunan ZI menuju WBK/WBBM baik atas permintaan instansi pemerintah, maupun inisiatif Kementerian PANRB;
- 2) Mengintegrasikan kebijakan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM dengan kebijakan reformasi birokrasi;
- 3) Melakukan pembatasan jumlah unit kerja yang dapat diusulkan K/L/Pemda untuk dievaluasi oleh Kementerian PANRB, strategi ini dilakukan untuk mempertahankan kualitas penilaian ZI,
- 4) Melakukan perubahan strategi evaluasi dalam rangka penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM, yaitu untuk instansi pemerintah yang minimal 30% unit kerjanya sudah berpredikat WBK/WBBM, diperkenankan untuk melakukan evaluasi dalam rangka penetapan predikat WBK secara mandiri, dengan tetap mendapatkan supervisi dari Kementerian PANRB.

Perbandingan realisasi jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat WBK/ WBBM di sektor strategis tahun 2020 s.d 2023 adalah:

Jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis (kumulatif)

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
299	507	809	955

Dengan memperhatikan hasil pengukuran pada Tahun 2023, maka tahun 2024 direncanakan akan dilakukan perubahan terkait pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM di sektor strategis ini, yaitu:

- 1) Mendorong K/L/Pemda untuk melakukan replikasi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh unit kerja yang telah ditetapkan sebagai Unit Kerja menuju WBK/WBBM ke unit-unit kerja lainnya;
- 2) Mendorong penguatan peran APIP pada setiap K/L/Pemda sebagai Tim Penilai Internal (TPI) dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada instansinya masing-masing,

Sasaran Strategis 5
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
5.1 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional	3,76	3,78	100,53%

5.1 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional

Pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (PEKPPP) merupakan upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik. Merujuk ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara diberikan mandat untuk melakukan hal tersebut. Pelayanan publik yang menjadi fokus utama pemerintah perlu dipastikan kinerjanya agar sampai dan dirasakan masyarakat. Maka dari itu Kementerian PANRB memiliki tanggung jawab dalam menjamin kualitas pelayanan publik secara nasional melalui mekanisme PEKPPP.

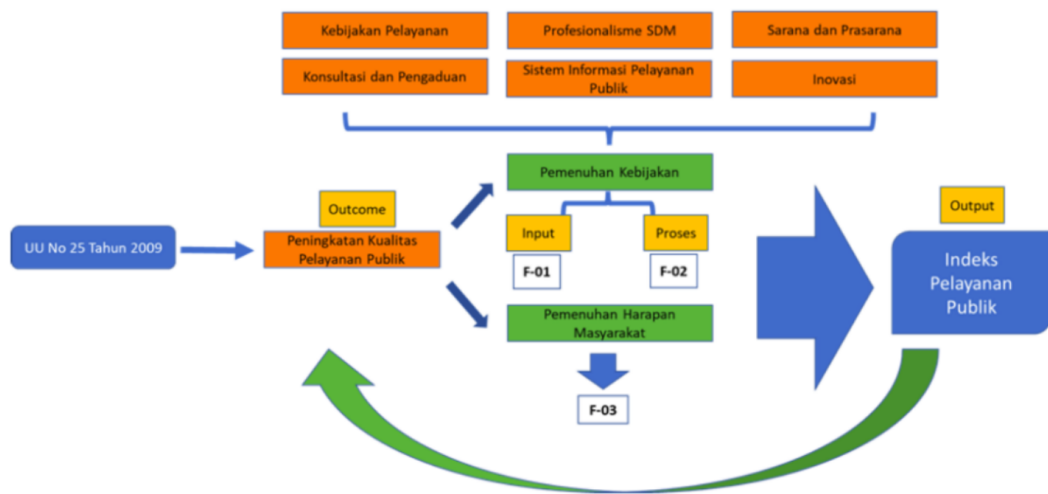
Pengaturan mengenai PEKPPP pada tahun 2023 mengalami pemutakhiran melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pemutakhiran ini meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi yang merupakan kegiatan terpisah. Hal-hal terkait dengan skema, mekanisme, dan tahapan PEKPPP tetap dilakukan sesuai ketentuan. Dalam rangka kemandirian dan pembinaan yang efektif pada tahun 2023 diatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan PEKPPP secara mandiri. PEKPPP Mandiri dilakukan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang PEKPPP Secara Mandiri.

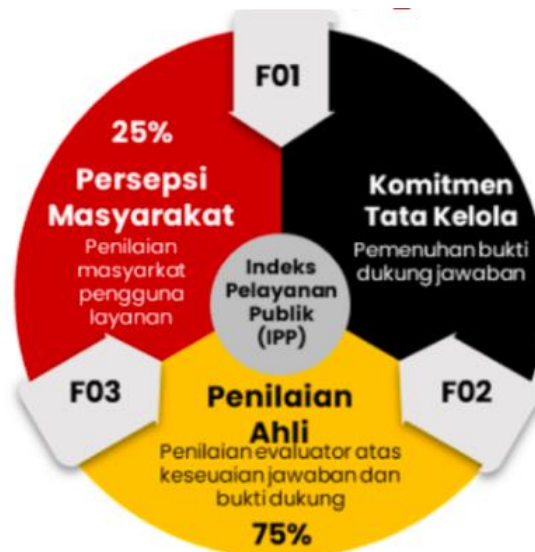
Melalui pelaksanaan PEKPPP ini digambarkan sebagai tata kelola pelayanan publik yang berdampak kepada masyarakat melalui pelayanan administrasi, barang, dan jasa. Adapun skema yang dilakukan dengan melibatkan 6 (enam) aspek yang bobot penilaiannya telah ditentukan sebagai berikut:



Elaborasi dari aspek dan prinsip pelayanan publik ini yang kemudian menjadi 30 indikator pertanyaan. Pemenuhan pertanyaan ini yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP). Mekanisme PEKPPP sendiri dilakukan berdasarkan pelaksanaan input-proses-output dan outcome yang secara alur berpikir sebagai berikut:



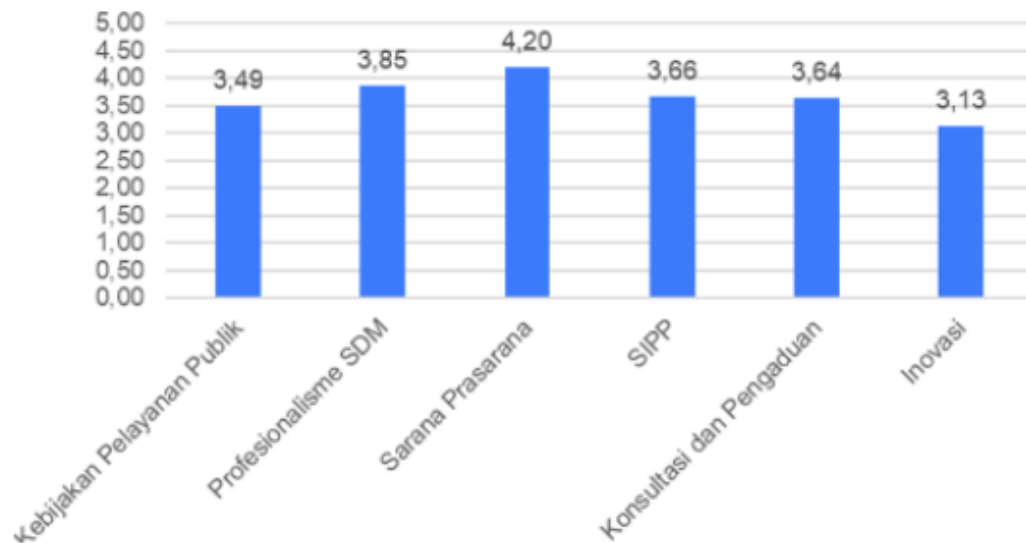
Dari sisi input dibagi menjadi dua yaitu proses pemenuhan kebijakan dan harapan masyarakat. Pemenuhan kebijakan dilakukan melalui pengisian bukti dukung sesuai dengan indikator pertanyaan melalui formulir 01 (F-01). Sedangkan pemenuhan harapan dilakukan melalui pengukuran persepsi masyarakat melalui formulir 03 (F-03). Dari tahapan ini kemudian dilakukan penilaian oleh evaluator untuk menguji kesesuaian pertanyaan dengan bukti dukung yang disampaikan melalui formulir 02 (F-02), yang kemudian menghasilkan angka IPP. Adapun metode penilaian yang dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, berikut merupakan kategori dari indeks pelayanan publik:

No	Rentang Nilai	Kategori	Predikat
1,	4,51 -5,00	Kategori A	Pelayanan Prima
2,	4,01 -4,50	Kategori A-	Sangat Baik
3,	3,51 -4,00	Kategori B	Baik
4,	3,01-3,50	Kategori B-	Baik dengan Catatan
5,	2,51 - 3,00	Kategori C	Cukup
6,	2,01 -2,50	Kategori C-	Cukup dengan Catatan
7,	1,51 -2,00	Kategori D	Buruk
8,	1,01- 1,50	Kategori E	Sangat Buruk
9,	0,00 - 1,00	Kategori F	Gagal

Pada Tahun 2023 IPP mengalami penurunan menjadi 3,78 dari 3,88, namun demikian masih dalam kategori yang sama yaitu Baik (B). Adapun secara nasional, aspek kebijakan pelayanan dan aspek inovasi masih menjadi aspek yang harus mendapatkan perhatian khusus untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Pada tahun ini aspek sarana dan prasarana menjadi aspek yang paling tinggi capaiannya yaitu ada pada angka 4,20 hal ini sangat sesuai dengan prioritas pemerintah secara nasional untuk membangun infrastruktur di segala lini kehidupan bermasyarakat. Adanya perbaikan sarana dan prasarana menjadi cerminan bahwa pemerintah dengan baik menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik yang lebih baik.



Dari pelaksanaan kegiatan dan capaian yang dilakukan pada tahun 2023 dapat ditarik beberapa catatan penting, antara lain:

- Pemanfaatan sistem informasi yang belum maksimal, kolaborasi yang terjalin antar pihak terkait masih perlu dilakukan perbaikan. Sistem informasi yang digunakan dalam PEKPPP yaitu <https://ivaluasi.minpan.go.id/> masih terdapat banyak kekurangan terutama saat proses evaluasi berlangsung. Hal ini cukup mengganggu proses pengunggahan bukti dukung dan pengolahan data yang optimal;
- Keterlibatan evaluator pada level kabupaten/kota belum secara merata kualitasnya. Hal ini juga berpengaruh pada proses pendampingan dan kualitas penilaian;
- Pelaksanaan PEKPPP pada wilayah papua masih sulit baik dalam pelaksanaan PEKPPP secara khusus maupun pembinaan. Basa transisi pada wilayah Daerah Etonom Baru Papua menjadi pokok utama terkendalanya proses koordinasi. Proses ini baru bisa teratasi secara progres ketika DEB Papua telah siap baik secara SDB maupun infrastruktur;
- Penetapan lokus baru untuk ruang lingkup administrasi, barang, dan jasa khususnya pelayanan barang pada lingkup kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota masih perlu pendampingan khusus. Kendala utama yang terjadi adalah kurangnya pemahaman serta proses pendampingan dari

masing-masing instansi yang berdampak pada pemenuhan bukti dukung dan hasil nilai IPP; dan

- e. Keterbatasan jumlah SDM pembina pelayanan publik nasional. Beban jumlah instansi koordinasi yang besar membuat proses pembinaan secara nasional tidak efektif dan efisien.

Dari tantangan dan kendala di atas, maka pada tahun 2024 direncanakan akan dilakukan beberapa perbaikan strategi, yaitu:

- a. Perbaikan kualitas sistem informasi <https://ivaluasi.minpan.go.id/> baik secara fitur maupun kualitas server, serta perbaikan pola kerja dan koordinasi pihak yang terkait melalui sistem kerja *squad team*;
- b. Pelibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan evaluasi secara berjenjang untuk level Kabupaten/Kota oleh pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga serta Provinsi oleh pihak ketiga yang dikelola secara profesional. Hal ini dilakukan agar pemahaman evaluator bisa seragam dan kualitas hasil evaluasi lebih maksimal;
- c. Pola koordinasi khusus asimetris pada wilayah Papua dengan membangun skema dan standar tersendiri melalui kolaborasi dengan Asisten Deputi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat yang secara tugas dan fungsi membidangi pelayanan publik khusus wilayah Papua;
- d. Pelaksanaan evaluasi menyeluruh pada ULE yang pernah dilakukan evaluasi pada rentang waktu 2020-2023 guna memaksimalkan kualitas pelayanan publik serta adanya transfer ilmu pengetahuan dan pengalaman antar ULE;
- e. Penambahan SDB sesuai dengan peta jabatan yang telah disusun guna melakukan akselerasi capaian kinerja.

Perbandingan realisasi IPP tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Indeks Pelayanan Publik tahun 2020 s.d 2023

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
3,84	3,79	3,88	3,78

Sasaran Strategis 6 Peningkatan Efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional

Capaian indikator-indikator sasaran “Peningkatan Efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional” adalah sebagai berikut:

Indikator		Target	Realisasi	Capaian (%)
5.2 Nilai Pelaksanaan RB Nasional	K/L	78	77,12	98,87
	Prov	70	69,91	99,87
	Kab/Kota	58	59,40	102,41
5.3 Persentase K/L/Pemda yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi “Baik”	K/L	96%	100%	104,17
	Prov	94%	88,24%	93,87
	Kab/ Kota	38%	53,15%	139,87

Keterangan :

* : Realisasi merupakan realiasi tahun 2022

6.1 Nilai Pelaksanaan RB Nasional

Sampai dengan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini diterbitkan, hasil pengukuran atas Nilai Pelaksanaan RB Nasional belum selesai diolah, sehingga dalam Laporan Kinerja ini masih menyajikan Nilai Pelaksanaan RB Nasional Tahun 2022.

Perbandingan realisasi Nilai Pelaksanaan RB Nasional tahun 2020 s.d 2023 adalah:

Nilai Pelaksanaan RB Nasional tahun 2020 s.d 2022

IP	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
K/L	74,63	75,65	76,53	77,12
Prov	74,63	65,63	67,4	69,91
Kab/Kota	53,85	53,44	56,55	59,40

Keterangan :

* : Realisasi menggunakan *realisasi tahun 2022*

6.2 Persentase K/L/Pemda yang Memiliki Indeks Reformasi Birokrasi “Baik”

Instansi pemerintah yang memiliki Indeks RB “Baik” adalah instansi pemerintah yang memiliki nilai hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di atas 60,00, atau memiliki predikat “B” ke atas. Evaluasi dilakukan berdasarkan Permen-PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Permen_PANRB tersebut menetapkan bahwa Nilai hasil evaluasi dikelompokkan menjadi 8 (delapan) kelompok berdasarkan rentang nilai, yaitu :

No	Rentang Nilai	Kategori	Predikat
1.	>100	AA	Sangat Memuaskan
2.	>80 – 100	A	Memuaskan
3.		A-	Memuaskan dengan Catatan
4.	>70 – 80	BB	Sangat Baik
5.	>60 – 70	B	Baik
6.	>50 – 60	CC	Cukup
7.	>30 – 50	C	Kurang
8.	0 – 30	D	Sangat Kurang

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari Renstra periode 2020-2024 dan Road Map RB 2020 – 2024. Pada Tahun 2023, Kementerian PANRB menerbitkan kebijakan baru untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional serta untuk memastikan dampak reformasi birokrasi dapat dirasakan oleh masyarakat, yaitu Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Tujuan Reformasi Birokrasi di dalam Road Map baru tersebut dipertajam dari yang semula adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih” menjadi “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional”. Fokus kebijakan yang diambil pun diperkuat dengan tidak hanya berfokus pada reformasi birokrasi di tingkat hulu, tetapi juga pada tingkat hilir atau disebut “*double track*”.

Reformasi tingkat hulu adalah reformasi tata kelola pemerintahan secara umum, sedangkan reformasi tingkat hilir adalah reformasi tata kelola pelaksanaan program pembangunan nasional. Pada Road Map terbaru ini, Kementerian PANRB menetapkan tema pengentasan kemiskinan sebagai fokus reformasi birokrasi tingkat hilir.

Rincian K/L/Pemda dengan Indeks RB “Baik” ke atas, adalah sebagai berikut:

Instansi	Populasi	Predikat							Total	%
		D	C	CC	B	BB	A	AA		
K/L	81	0	0	0	12	44	26	-	82	100.00%
Pemerintah Provinsi	34	0	2	2	12	13	5	0	34	88.24%
Pemerintah Kab/Kota	508	29	90	119	135	100	35	-	508	53.15%



Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan RB sesuai Road Map terbaru, telah dilaksanakan berbagai upaya, yaitu:

1. Melakukan sosialisasi konsep pelaksanaan RB terbaru sebelum kebijakan disahkan agar instansi pemerintah dapat memahami kebijakan dengan lebih cepat;
2. Melakukan pembinaan/bimtek/sosialisasi kepada instansi pemerintah, baik secara langsung maupun daring;
3. Mengisi acara Bisa Tanya MenPANRB dengan materi terkait Road Map RB terbaru;
4. Membuat modul yang mempermudah pemahaman mengenai pelaksanaan RB Tematik; dan
5. Menyelenggarakan kegiatan RBXperience yang bertujuan memfasilitasi Kementerian/Lembaga Meso untuk ikut menjelaskan terkait perannya dalam reformasi birokrasi dan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan RB di instansi pemerintah yang diukur dengan indikator “Persentase IP yang memiliki nilai Indeks RB Baik” dan “Persentase IP K/L/P yang mengimplementasikan RB Tematik” adalah:

1. Kemampuan instansi pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan baru terkait dengan pelaksanaan RB yang diterbitkan pada Tahun 2023, yaitu Perubahan kebijakan Road Map 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 serta peraturan turunannya yang diterbitkan dalam Surat Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023;
2. *Awareness*, pemahaman, serta komitmen instansi pemerintah dalam menindaklanjuti kebijakan RB terbaru;
3. Keterbatasan sumber daya (termasuk keterbatasan waktu, anggaran dan SDM) yang dimiliki instansi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan RB terbaru; dan
4. Pemahaman personel pembina pada unit terkait atas kebijakan RB terbaru.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan persentase instansi pemerintah yang memiliki indeks RB Baik (kategori “B” ke atas), dikarenakan antara lain:

1. Pimpinan (pimpinan daerah dan PD) belum sepenuhnya menunjukkan komitmen dengan terlibat langsung dan aktif dalam membangun dan memonitoring pembangunan RB;
2. Keterbatasan akses dan jaringan pada beberapa daerah, khususnya untuk daerah timur menyebabkan pembinaan secara daring kurang efektif;
3. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM yang menangani reformasi birokrasi serta seringnya mutasi SDM yang menangani reformasi birokrasi; dan
4. Keterbatasan anggaran dan SDM internal Kementerian PANRB.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi berkala atas progres penginputan rencana aksi RB instansi pemerintah;
2. Memperbanyak cakupan dan metode pembinaan kepada instansi pemerintah, baik melalui penyusunan modul pendukung, surat edaran yang berisikan himbauan dan penjelasan-penjelasan rinci, sosialisasi melalui luring dan daring, workshop pelaksanaan RB;
3. Meningkatkan upaya pembinaan khususnya pada instansi pemerintah yang belum melaksanakan RB Tematik;
4. Berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan atensi pemerintah daerah atas pelaksanaan RB Tematik;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pembinaan RB Tematik yang dilakukan;
6. Membangun strategi pembinaan yang lebih sesuai dengan karakteristik instansi pemerintah; dan
7. Mempersiapkan program dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi terkini sehingga pelaksanaan tugas dapat didukung dengan anggaran yang memadai.

Langkah ke depan yang akan dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah antara lain adalah:

1. Mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih kapabel sehingga dapat membantu instansi pemerintah dalam pelaksanaan RB secara lebih efektif;
2. Merumuskan strategi pembinaan yang lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing instansi pemerintah;
3. Berkolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya untuk mendorong pelaksanaan RB, khususnya dengan Kementerian Dalam Negeri agar *awareness* dan komitmen pemerintah daerah semakin meningkat;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kebijakan yang telah diimplementasikan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan di masa mendatang; dan
5. Mempersiapkan program dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi terkini sehingga pelaksanaan tugas dapat didukung dengan anggaran yang memadai.

Perbandingan realisasi Persentase K/L/Pemda yang memiliki Indeks RB “Baik” tahun 2020 s.d 2023 adalah:

IP	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
K/L	96,39%	96.30%	98,77%	100.00%
Prov	79,41%	79.41%	88,24%	88.24%
Kab/Kota	24,41%	25.79%	32,28%	53.15%



Sebagai upaya percepatan implementasi RB, beberapa hal yang akan dilakukan oleh Kementerian PANRB di antaranya:

- 1) Mendesain ulang mekanisme asistensi, yang bertujuan agar proses asistensi dapat dilaksanakan lebih profesional dan akuntabel, dan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan asistensi;
- 2) Meningkatkan kapasitas SDM, dengan membuat kurikulum pelatihan yang diharapkan dapat mengakselerasi proses penyiapan SDM baru yang siap untuk melakukan pendampingan maupun evaluasi terkait implementasi RB
- 3) Mengoptimalkan penggunaan infrastruktur teknologi informasi yang sudah ada, seperti PMPRB, PMPZI, *e-SAKIP Review*, Survey, dll. Di antaranya menambahkan pembaharuan seperti aplikasi pendukung evaluasi, dan pendukung *knowledge management* baik di internal maupun instansi pemerintah lain;
- 4) Mendorong kolaborasi seluruh unit kerja di Kementerian PANRB untuk melakukan penguatan pada area perubahan yang sesuai dengan bidang tanggungjawabnya; dan
- 5) Membangun kerja sama dengan Kemendagri dan Kemenkeu untuk merumuskan

kebijakan terkait *reward* and *punishment* di pemerintah daerah. Hal ini juga diharapkan dapat sebagai stimulus untuk percepatan implementasi RB khususnya di kabupaten/kota.

C. Capaian Kinerja Lain

C.1 Penganugerahan Badan Publik Informatif Terbaik Nasional Tahun 2023

Kementerian PANRB kembali mendapatkan penghargaan pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik tahun 2023 yang tertuang pada Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 17/KEP/KIP/XII/2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2023, Kementerian PANRB memperoleh nilai 96,72 dengan predikat Badan Publik Informatif Terbaik Nasional. Penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) tersebut diberikan langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan diterima oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. Prestasi ini menunjukkan bahwa Kementerian PANRB telah memiliki keterbukaan atas akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai amanat dalam Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penghargaan ini tentu akan menjadi pengingat bagi Kementerian PANRB untuk terus mempertahankan dan meningkatkan standar layanan informasi kepada masyarakat serta memastikan informasi disampaikan dengan transparan.



C.2 Penganugerahan Revolusi Mental Tahun 2023

Kementerian PANRB menerima apresiasi dalam Anugerah Revolusi Mental 2023. Apresiasi tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi pada Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas yang disaksikan oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin. Anugerah Revolusi Mental 2023 merupakan penganugerahan yang diberikan kepada semua pihak yang telah menjadi pelopor perubahan dalam masyarakat, kepada pemerintah daerah, lembaga, maupun individu yang dinilai telah melakukan perubahan melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, Kementerian PANRB berpedoman pada Program Gerakan Indonesia Melayani yang berfokus pada penciptaan budaya baru di lingkungan unit kerja dan organisasi aparatur negara. Gerakan Indonesia Melayani menjadi gerakan yang terus didorong Kementerian PANRB atas arahan Presiden dengan mendorong pelayanan publik yang lebih baik, lebih masif, dan lebih berdampak. Gerakan ini meliputi cara berpikir, cara kerja yang

membawa perubahan, serta cara hidup berbangsa, tak terkecuali pada bidang pelayanan publik kepada masyarakat agar dapat memberikan layanan prima.



D. Realisasi Anggaran

Anggaran Kementerian PANRB Tahun 2023 adalah sebesar **Rp320.334.025.000,-** dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 tercatat sebesar **Rp315.957.346.358,-** atau sebesar 98,63%. Dengan rincian sebagai berikut.

No	Unit Kerja	Anggaran (Rp.000,-)	Realisasi (Rp)	%
1.	Deputi RBKunwas	31.705.643	31.414.890	99.08
2.	Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana	60.066.347	59.366.153	98.83
3.	Deputi SDMA	27.153.096	24.802.609	91.34
4.	Deputi Pelayanan Publik	26.664.937	26.352.458	98.83
5.	Sekretariat Kementerian	174.744.002	174.021.234	99.59
Total		320.334.025	315.957.346	98.63

Sumber: Realisasi SP2D berdasarkan aplikasi MONSAKTI



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BAB IV PENUTUP

LAPORAN KINERJA

2023

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

www.menpan.go.id

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Kementerian PANRB tahun 2023 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*. Capaian kinerja Kementerian PANRB tahun 2023 dapat dinyatakan “berhasil”, karena realisasi 13 dari 17 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 100% ke atas, dengan rincian:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 12 (sebelas) target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 (satu) target; dan
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 4 (lima) target:

Selain itu, secara keseluruhan capaian Kinerja Kementerian PANRB tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti penerbitan kebijakan terkait pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi, kordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat

Pelaksanaan kegiatan di atas menyebabkan realisasi anggaran tahun 2023 Kementerian PANRB juga menjadi tinggi yaitu sebesar **Rp315.957.346.358,-** atau **98,63%** dari total pagu anggaran sebesar **Rp320.334.025.000,-**.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah khususnya kabupaten/kota dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA

2023

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

www.menpan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI

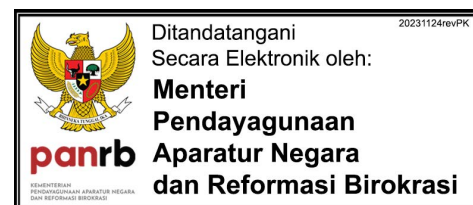
Sasaran		Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi	1.	Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan nasional	69
		2.	Jumlah K/L/Pemda dengan indeks maturitas SPBE "Baik" ke atas	318 K/L/D
		3.	Indeks SPBE Nasional	2,6 (Predikat Baik)
2.	Terwujudnya ASN yang profesional	1.	Skor Employee Engagement ASN	14,75%
		2.	Skor Employer Branding ASN	7,3%
3.	Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	1.	Nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional	68
		2.	Persentase Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik"	K/L: 96% Prov: 100% Kab/Kota: 75%
4.	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas	1.	Jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis	890 Unit Kerja
5.	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	1.	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional	3,76
6.	Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional	1.	Nilai Pelaksanaan RB Nasional	K/L: 78 Prov: 70 Kab/Kota: 58
		2.	Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki indeks Reformasi Birokrasi "Baik"(kategori "B" ke atas)	K/L: 96% Prov: 94% Kab/Kota: 38%

Program

1. Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN Rp. 136.757.577.000,
 2. Program Dukungan Manajemen Rp. 183.576.448.000,
- TOTAL ANGGARAN Rp. 320.334.025.000,-**

Jakarta, 24 November 2023

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Abdullah Azwar Anas

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Balai Sertifikasi Elektronik

**Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023**

No	Instansi Pemerintah	Predikat RB Tahun 2023	Predikat SAKIP Tahun 2023
Kementerian/Lembaga			
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	BB	BB
2	Kementerian Dalam Negeri	A	BB
3	Kementerian Luar Negeri	BB	BB
4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	A	BB
5	Kementerian Komunikasi dan Informatika	A	B
6	Badan Intelijen Negara	A	BB
7	Mahkamah Agung Republik Indonesia	BB	BB
8	Badan Kepegawaian Negara	BB	B
9	Lembaga Administrasi Negara	A	BB
10	Arsip Nasional Republik Indonesia	BB	B
11	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	BB	B
12	Kepolisian Negara Republik Indonesia	BB	BB
13	Badan Narkotika Nasional	BB	B
14	Komisi Pemilihan Umum	B	B
15	Komisi Pemberantasan Korupsi	BB	A
16	Komisi Yudisial	B	B
17	Badan Keamanan Laut	BB	B
18	Ombudsman Republik Indonesia	BB	B
19	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	B	B
20	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	BB	B
21	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	BB	B
22	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	B	B
23	Badan Pengawas Pemilihan Umum	B	B
24	Komisi Aparatur Sipil Negara	B	B
25	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	BB	B
26	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	B	B
27	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	BB	BB
28	Tentara Nasional Indonesia	BB	B
29	Sekretariat Kabinet	BB	A
30	Kejaksaan Republik Indonesia	BB	B
31	Badan Siber dan Sandi Negara	BB	B
32	Kementerian Pertahanan	BB	B
33	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	A	BB
34	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	A	BB

No	Instansi Pemerintah	Predikat RB Tahun 2023	Predikat SAKIP Tahun 2023
35	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	BB	B
36	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	A	BB
37	Kementerian Keuangan	A	A
38	Kementerian Pertanian	BB	BB
39	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	A	BB
40	Kementerian Perhubungan	BB	BB
41	Kementerian Ketenagakerjaan	BB	B
42	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	A	BB
43	Kementerian Kelautan dan Perikanan	A	A
44	Kementerian Perdagangan	BB	BB
45	Kementerian Perindustrian	A	BB
46	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	A	BB
47	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	A	BB
48	Badan Pemeriksa Keuangan	A	A
49	Badan Pusat Statistik	A	BB
50	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	A	A
51	Badan Informasi Geospasial	BB	BB
52	Badan Koordinasi Penanaman Modal	BB	BB
53	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	A	A
54	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	BB	B
55	Badan Standardisasi Nasional	A	BB
56	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	BB	BB
57	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	BB	BB
58	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	B	CC
59	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	BB	BB
60	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	A	BB
61	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Tidak Dievaluasi	B
62	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Tidak Dievaluasi	BB
63	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	#N/A	C
64	Badan Riset dan Inovasi Nasional	BB	BB
65	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	BB	BB
66	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BB	B

No	Instansi Pemerintah	Predikat RB Tahun 2023	Predikat SAKIP Tahun 2023
67	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	A	A
68	Kementerian Pemuda dan Olahraga	B	B
69	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	BB	B
70	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	A	BB
71	Kementerian Kesehatan	A	BB
72	Kementerian Agama	BB	BB
73	Kementerian Sosial	BB	B
74	Kementerian Sekretariat Negara	A	A
75	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	BB	BB
76	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	BB	BB
77	Badan Pengawas Obat dan Makanan	A	A
78	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	BB	BB
79	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan	BB	BB
80	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	B	B
81	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	BB	B
82	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	B	B
83	Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	B	B
84	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	BB	B
Pemerintah Provinsi			
1	Pemerintah Provinsi Aceh	BB	B
2	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	BB	B
3	Pemerintah Provinsi Riau	BB	BB
4	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	BB	BB
5	Pemerintah Provinsi Jambi	B	B
6	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	B	BB
7	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	B	BB
8	Pemerintah Provinsi Bengkulu	B	B
9	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	A	A
10	Pemerintah Provinsi Banten	BB	B
11	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	A	AA
12	Pemerintah Provinsi Lampung	B	B
13	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	A	A
14	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	BB	A
15	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	BB	BB
16	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	B	B
17	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	BB	A

No	Instansi Pemerintah	Predikat RB Tahun 2023	Predikat SAKIP Tahun 2023
18	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	BB	BB
19	Pemerintah Provinsi Bali	A	BB
20	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	B	BB
21	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	B	B
22	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	BB	BB
23	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	A	A
24	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	CC	B
25	Pemerintah Provinsi Gorontalo	BB	B
26	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	B	BB
27	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	BB	B
28	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	B	B
29	Pemerintah Provinsi Maluku	C	B
30	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	CC	B
31	Pemerintah Provinsi Papua	C	B
32	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	BB	BB
33	Pemerintah Provinsi Papua Barat	B	B
34	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	B	B
Pemerintah Kabupaten/Kota			
1	Pemerintah Kabupaten Aceh Besar	C	CC
2	Pemerintah Kabupaten Pidie	C	CC
3	Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	C	CC
4	Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	CC	C
5	Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan	CC	CC
6	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	B	B
7	Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah	C	CC
8	Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara	C	C
9	Pemerintah Kabupaten Simeulue	C	C
10	Pemerintah Kabupaten Bireuen	B	CC
11	Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	CC	B
12	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya	CC	CC
13	Pemerintah Kabupaten Gayo Lues	C	CC
14	Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang	CC	B
15	Pemerintah Kabupaten Nagan Raya	CC	CC
16	Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya	B	CC
17	Pemerintah Kabupaten Bener Meriah	C	B
18	Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya	CC	B
19	Pemerintah Kota Sabang	CC	CC
20	Pemerintah Kota Banda Aceh	B	B
21	Pemerintah Kota Langsa	B	CC
22	Pemerintah Kota Lhokseumawe	CC	B
23	Pemerintah Kota Subulussalam	C	C
24	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	B	BB
25	Pemerintah Kabupaten Karo	C	CC
26	Pemerintah Kabupaten Langkat	B	B
27	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	C	C

No	Instansi Pemerintah	Predikat RB Tahun 2023	Predikat SAKIP Tahun 2023
28	Pemerintah Kabupaten Simalungun	C	CC
29	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	CC	CC
30	Pemerintah Kabupaten Dairi	B	B
31	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	B	B
32	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	CC	CC
33	Pemerintah Kabupaten Asahan	B	B
34	Pemerintah Kabupaten Nias	B	B
35	Pemerintah Kabupaten Toba	C	CC
36	Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	CC	CC
37	Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	CC	CC
38	Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	CC	BB
39	Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	B	B
40	Pemerintah Kabupaten Samosir	CC	B
41	Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	CC	B
42	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	C	CC
43	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	C	CC
44	Pemerintah Kabupaten Batu Bara	CC	B
45	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	C	C
46	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara	CC	CC
47	Pemerintah Kabupaten Nias Barat	C	C
48	Pemerintah Kabupaten Nias Utara	CC	CC
49	Pemerintah Kota Medan	CC	B
50	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	BB	B
51	Pemerintah Kota Binjai	B	CC
52	Pemerintah Kota Pematangsiantar	CC	CC
53	Pemerintah Kota Tanjung Balai	CC	B
54	Pemerintah Kota Sibolga	C	CC
55	Pemerintah Kota Padangsidimpuan	C	B
56	Pemerintah Kota Gunungsitoli	C	CC
57	Pemerintah Kabupaten Kampar	B	B
58	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	B	B
59	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	B	B
60	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	BB	B
61	Pemerintah Kabupaten Pelalawan	B	B
62	Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	CC	B
63	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	CC	B
64	Pemerintah Kabupaten Siak	B	B
65	Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	B	B
66	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	CC	B
67	Pemerintah Kota Pekanbaru	BB	B
68	Pemerintah Kota Dumai	B	B
69	Pemerintah Kabupaten Agam	B	B
70	Pemerintah Kabupaten Pasaman	CC	B
71	Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota	CC	B

No	Instansi Pemerintah	Predikat RB Tahun 2023	Predikat SAKIP Tahun 2023
72	Pemerintah Kabupaten Solok	BB	B
73	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	B	B
74	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	BB	B
75	Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	B	B
76	Pemerintah Kabupaten Sijunjung	CC	B
77	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	CC	B
78	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	B	B
79	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	CC	B
80	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	CC	B
81	Pemerintah Kota Bukittinggi	BB	BB
82	Pemerintah Kota Padang Panjang	B	B
83	Pemerintah Kota Sawahlunto	B	B
84	Pemerintah Kota Solok	B	B
85	Pemerintah Kota Padang	BB	BB
86	Pemerintah Kota Payakumbuh	BB	BB
87	Pemerintah Kota Pariaman	B	B
88	Pemerintah Kabupaten Batang Hari	B	BB
89	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	C	B
90	Pemerintah Kabupaten Bungo	CC	B
91	Pemerintah Kabupaten Merangin	CC	B
92	Pemerintah Kabupaten Kerinci	C	B
93	Pemerintah Kabupaten Sarolangun	B	B
94	Pemerintah Kabupaten Tebo	C	B
95	Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi	C	B
96	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	CC	B
97	Pemerintah Kota Jambi	B	B
98	Pemerintah Kota Sungai Penuh	C	B
99	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	B	B
100	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu	CC	CC
101	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	B	BB
102	Pemerintah Kabupaten Lahat	B	B
103	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	B	BB
104	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir	B	B
105	Pemerintah Kabupaten Banyuasin	BB	B
106	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	B	B
107	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	CC	B
108	Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	B	B
109	Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	CC	B
110	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	CC	B
111	Pemerintah Kota Palembang	B	B
112	Pemerintah Kota Pagar Alam	CC	B
113	Pemerintah Kota Lubuklinggau	CC	BB

No	Instansi Pemerintah	Predikat RB Tahun 2023	Predikat SAKIP Tahun 2023
114	Pemerintah Kota Prabumulih	B	B
115	Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	C	B
116	Pemerintah Kabupaten Bangka	BB	BB
117	Pemerintah Kabupaten Belitung	BB	B
118	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	B	B
119	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	BB	BB
120	Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan	B	B
121	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	BB	B
122	Pemerintah Kota Pangkalpinang	CC	B
123	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara	B	B
124	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan	B	B
125	Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong	BB	B
126	Pemerintah Kabupaten Kaur	C	CC
127	Pemerintah Kabupaten Seluma	B	B
128	Pemerintah Kabupaten Mukomuko	CC	B
129	Pemerintah Kabupaten Kepahiang	CC	B
130	Pemerintah Kabupaten Lebong	B	B
131	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	CC	B
132	Pemerintah Kota Bengkulu	CC	B
133	Pemerintah Kabupaten Bogor	BB	B
134	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	BB	B
135	Pemerintah Kabupaten Cianjur	B	B
136	Pemerintah Kabupaten Bekasi	BB	B
137	Pemerintah Kabupaten Karawang	A	B
138	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	BB	B
139	Pemerintah Kabupaten Subang	BB	B
140	Pemerintah Kabupaten Bandung	A	BB
141	Pemerintah Kabupaten Sumedang	A	BB
142	Pemerintah Kabupaten Garut	B	BB
143	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	BB	B
144	Pemerintah Kabupaten Ciamis	BB	B
145	Pemerintah Kabupaten Cirebon	B	B
146	Pemerintah Kabupaten Kuningan	B	B
147	Pemerintah Kabupaten Indramayu	B	B
148	Pemerintah Kabupaten Majalengka	BB	B
149	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	BB	B
150	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	BB	B
151	Pemerintah Kota Bandung	A	A
152	Pemerintah Kota Bogor	A	BB
153	Pemerintah Kota Sukabumi	BB	BB
154	Pemerintah Kota Cirebon	BB	B
155	Pemerintah Kota Bekasi	BB	B
156	Pemerintah Kota Depok	A	B
157	Pemerintah Kota Cimahi	A	B

No	Instansi Pemerintah	Predikat RB Tahun 2023	Predikat SAKIP Tahun 2023
158	Pemerintah Kota Tasikmalaya	BB	BB
159	Pemerintah Kota Banjar	A	B
160	Pemerintah Kabupaten Serang	B	BB
161	Pemerintah Kabupaten Pandeglang	B	BB
162	Pemerintah Kabupaten Lebak	BB	BB
163	Pemerintah Kabupaten Tangerang	BB	BB
164	Pemerintah Kota Tangerang	A	B
165	Pemerintah Kota Cilegon	BB	B
166	Pemerintah Kota Serang	BB	B
167	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	BB	B
168	Pemerintah Kabupaten Bantul	A	A
169	Pemerintah Kabupaten Sleman	A	A
170	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	A	BB
171	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	A	A
172	Pemerintah Kota Yogyakarta	A	A
173	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	BB	B
174	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	B	B
175	Pemerintah Kabupaten Lampung Utara	CC	CC
176	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	B	B
177	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang	CC	B
178	Pemerintah Kabupaten Tanggamus	CC	B
179	Pemerintah Kabupaten Way Kanan	CC	B
180	Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	CC	CC
181	Pemerintah Kabupaten Pesawaran	B	B
182	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat	CC	B
183	Pemerintah Kabupaten Pringsewu	B	B
184	Pemerintah Kabupaten Mesuji	B	B
185	Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	CC	CC
186	Pemerintah Kota Metro	B	B
187	Pemerintah Kota Bandar Lampung	CC	CC
188	Pemerintah Kabupaten Gresik	A	A
189	Pemerintah Kabupaten Mojokerto	A	BB
190	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	BB	BB
191	Pemerintah Kabupaten Jombang	BB	BB
192	Pemerintah Kabupaten Sampang	B	BB
193	Pemerintah Kabupaten Pamekasan	BB	BB
194	Pemerintah Kabupaten Sumenep	BB	B
195	Pemerintah Kabupaten Bangkalan	CC	B
196	Pemerintah Kabupaten Bondowoso	B	BB
197	Pemerintah Kabupaten Situbondo	BB	A
198	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	A	A
199	Pemerintah Kabupaten Jember	B	B
200	Pemerintah Kabupaten Malang	BB	BB
201	Pemerintah Kabupaten Pasuruan	B	BB

No	Instansi Pemerintah	Predikat RB Tahun 2023	Predikat SAKIP Tahun 2023
202	Pemerintah Kabupaten Probolinggo	BB	B
203	Pemerintah Kabupaten Lumajang	BB	B
204	Pemerintah Kabupaten Kediri	BB	B
205	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	A	BB
206	Pemerintah Kabupaten Nganjuk	B	B
207	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	BB	BB
208	Pemerintah Kabupaten Blitar	BB	B
209	Pemerintah Kabupaten Madiun	A	BB
210	Pemerintah Kabupaten Ngawi	BB	A
211	Pemerintah Kabupaten Magetan	A	BB
212	Pemerintah Kabupaten Ponorogo	BB	BB
213	Pemerintah Kabupaten Pacitan	BB	B
214	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	BB	BB
215	Pemerintah Kabupaten Tuban	A	BB
216	Pemerintah Kabupaten Lamongan	BB	A
217	Pemerintah Kota Mojokerto	A	BB
218	Pemerintah Kota Malang	BB	A
219	Pemerintah Kota Pasuruan	A	BB
220	Pemerintah Kota Probolinggo	BB	BB
221	Pemerintah Kota Blitar	A	BB
222	Pemerintah Kota Kediri	BB	BB
223	Pemerintah Kota Madiun	A	A
224	Pemerintah Kota Batu	BB	B
225	Pemerintah Kabupaten Sambas	B	B
226	Pemerintah Kabupaten Sanggau	B	B
227	Pemerintah Kabupaten Sintang	B	B
228	Pemerintah Kabupaten Mempawah	B	B
229	Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	B	B
230	Pemerintah Kabupaten Ketapang	BB	B
231	Pemerintah Kabupaten Bengkayang	CC	B
232	Pemerintah Kabupaten Landak	B	B
233	Pemerintah Kabupaten Melawi	CC	CC
234	Pemerintah Kabupaten Sekadau	CC	B
235	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	B	B
236	Pemerintah Kabupaten Kayong Utara	B	B
237	Pemerintah Kota Pontianak	BB	BB
238	Pemerintah Kota Singkawang	BB	B
239	Pemerintah Kabupaten Kapuas	B	B
240	Pemerintah Kabupaten Barito Utara	B	B
241	Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	B	B
242	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	BB	B
243	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	BB	B
244	Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	CC	CC
245	Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	CC	B

No	Instansi Pemerintah	Predikat RB Tahun 2023	Predikat SAKIP Tahun 2023
246	Pemerintah Kabupaten Lamandau	B	B
247	Pemerintah Kabupaten Sukamara	B	B
248	Pemerintah Kabupaten Murung Raya	CC	CC
249	Pemerintah Kabupaten Katingan	B	B
250	Pemerintah Kabupaten Seruyan	CC	B
251	Pemerintah Kabupaten Barito Timur	B	CC
252	Pemerintah Kota Palangka Raya	B	B
253	Pemerintah Kabupaten Banjar	BB	B
254	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BB	B
255	Pemerintah Kabupaten Tapin	BB	B
256	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	A	A
257	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	B	B
258	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	B	B
259	Pemerintah Kabupaten Tabalong	BB	B
260	Pemerintah Kabupaten Kotabaru	CC	B
261	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	C	B
262	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	B	B
263	Pemerintah Kabupaten Balangan	BB	BB
264	Pemerintah Kota Banjarmasin	A	BB
265	Pemerintah Kota Banjarbaru	BB	B
266	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	B	B
267	Pemerintah Kabupaten Paser	B	B
268	Pemerintah Kabupaten Berau	C	B
269	Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	CC	B
270	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	CC	B
271	Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	CC	B
272	Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu	CC	CC
273	Pemerintah Kota Samarinda	BB	B
274	Pemerintah Kota Balikpapan	B	B
275	Pemerintah Kota Bontang	BB	B
276	Pemerintah Kabupaten Buleleng	A	B
277	Pemerintah Kabupaten Jembrana	BB	B
278	Pemerintah Kabupaten Klungkung	A	B
279	Pemerintah Kabupaten Gianyar	BB	B
280	Pemerintah Kabupaten Karangasem	B	B
281	Pemerintah Kabupaten Bangli	BB	B
282	Pemerintah Kabupaten Badung	A	BB
283	Pemerintah Kabupaten Tabanan	BB	B
284	Pemerintah Kota Denpasar	A	BB
285	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	B	B
286	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	BB	B
287	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	CC	B
288	Pemerintah Kabupaten Bima	CC	B
289	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	B	B

No	Instansi Pemerintah	Predikat RB Tahun 2023	Predikat SAKIP Tahun 2023
290	Pemerintah Kabupaten Dompu	CC	B
291	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	B	B
292	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	B	B
293	Pemerintah Kota Mataram	BB	BB
294	Pemerintah Kota Bima	CC	B
295	Pemerintah Kabupaten Kupang	CC	CC
296	Pemerintah Kabupaten Belu	CC	CC
297	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara	C	CC
298	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan	C	B
299	Pemerintah Kabupaten Alor	C	CC
300	Pemerintah Kabupaten Sikka	C	B
301	Pemerintah Kabupaten Flores Timur	C	CC
302	Pemerintah Kabupaten Ende	CC	B
303	Pemerintah Kabupaten Ngada	C	CC
304	Pemerintah Kabupaten Manggarai	B	B
305	Pemerintah Kabupaten Sumba Timur	CC	B
306	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat	C	CC
307	Pemerintah Kabupaten Lembata	C	CC
308	Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	CC	CC
309	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat	B	B
310	Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur	CC	B
311	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya	C	C
312	Pemerintah Kabupaten Nagekeo	C	B
313	Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah	C	CC
314	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	C	CC
315	Pemerintah Kabupaten Malaka	D	C
316	Pemerintah Kota Kupang	B	B
317	Pemerintah Kota Surabaya	A	A
318	Pemerintah Kabupaten Semarang	B	B
319	Pemerintah Kabupaten Kendal	B	B
320	Pemerintah Kabupaten Demak	BB	B
321	Pemerintah Kabupaten Grobogan	BB	B
322	Pemerintah Kabupaten Pekalongan	B	B
323	Pemerintah Kabupaten Batang	B	B
324	Pemerintah Kabupaten Tegal	BB	B
325	Pemerintah Kabupaten Brebes	BB	B
326	Pemerintah Kabupaten Pati	B	B
327	Pemerintah Kabupaten Kudus	BB	BB
328	Pemerintah Kabupaten Pemalang	B	B
329	Pemerintah Kabupaten Jepara	B	B
330	Pemerintah Kabupaten Rembang	B	B
331	Pemerintah Kabupaten Blora	B	B
332	Pemerintah Kabupaten Banyumas	BB	A
333	Pemerintah Kabupaten Cilacap	BB	BB

No	Instansi Pemerintah	Predikat RB Tahun 2023	Predikat SAKIP Tahun 2023
334	Pemerintah Kabupaten Purbalingga	B	B
335	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	B	B
336	Pemerintah Kabupaten Magelang	B	B
337	Pemerintah Kabupaten Temanggung	B	B
338	Pemerintah Kabupaten Wonosobo	B	B
339	Pemerintah Kabupaten Purworejo	B	B
340	Pemerintah Kabupaten Kebumen	BB	B
341	Pemerintah Kabupaten Klaten	BB	B
342	Pemerintah Kabupaten Boyolali	BB	B
343	Pemerintah Kabupaten Sragen	BB	B
344	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	BB	B
345	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	BB	B
346	Pemerintah Kabupaten Wonogiri	BB	BB
347	Pemerintah Kota Semarang	A	BB
348	Pemerintah Kota Salatiga	B	B
349	Pemerintah Kota Pekalongan	BB	BB
350	Pemerintah Kota Tegal	BB	B
351	Pemerintah Kota Magelang	A	BB
352	Pemerintah Kota Surakarta	BB	BB
353	Pemerintah Kabupaten Minahasa	C	B
354	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow	CC	B
355	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe	B	B
356	Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	CC	CC
357	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud	B	B
358	Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara	CC	B
359	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	CC	B
360	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	CC	B
361	Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara	CC	B
362	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	CC	B
363	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	CC	B
364	Pemerintah Kota Manado	CC	BB
365	Pemerintah Kota Bitung	CC	B
366	Pemerintah Kota Tomohon	B	B
367	Pemerintah Kota Kota Mobagu	B	B
368	Pemerintah Kabupaten Gorontalo	B	B
369	Pemerintah Kabupaten Boalemo	CC	B
370	Pemerintah Kabupaten Pohuwato	B	B
371	Pemerintah Kabupaten Bone Bolango	B	BB
372	Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara	B	B
373	Pemerintah Kota Gorontalo	BB	B
374	Pemerintah Kabupaten Poso	CC	B
375	Pemerintah Kabupaten Donggala	C	CC

No	Instansi Pemerintah	Predikat RB Tahun 2023	Predikat SAKIP Tahun 2023
376	Pemerintah Kabupaten Tolitoli	CC	B
377	Pemerintah Kabupaten Banggai	B	BB
378	Pemerintah Kabupaten Buol	C	CC
379	Pemerintah Kabupaten Morowali	CC	CC
380	Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	CC	CC
381	Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	C	B
382	Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una	B	B
383	Pemerintah Kabupaten Sigi	CC	B
384	Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	C	CC
385	Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	CC	CC
386	Pemerintah Kota Palu	B	B
387	Pemerintah Kabupaten Pinrang	BB	B
388	Pemerintah Kabupaten Gowa	B	B
389	Pemerintah Kabupaten Wajo	B	B
390	Pemerintah Kabupaten Bone	CC	B
391	Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	C	CC
392	Pemerintah Kabupaten Maros	B	B
393	Pemerintah Kabupaten Luwu	C	B
394	Pemerintah Kabupaten Sinjai	B	B
395	Pemerintah Kabupaten Bulukumba	CC	B
396	Pemerintah Kabupaten Bantaeng	CC	B
397	Pemerintah Kabupaten Jeneponto	CC	B
398	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	CC	B
399	Pemerintah Kabupaten Takalar	CC	B
400	Pemerintah Kabupaten Barru	CC	B
401	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	C	B
402	Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	CC	B
403	Pemerintah Kabupaten Soppeng	B	B
404	Pemerintah Kabupaten Enrekang	CC	CC
405	Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	CC	B
406	Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	B	B
407	Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	CC	B
408	Pemerintah Kota Makassar	BB	B
409	Pemerintah Kota Parepare	B	B
410	Pemerintah Kota Palopo	C	B
411	Pemerintah Kabupaten Konawe	CC	B
412	Pemerintah Kabupaten Buton	CC	B
413	Pemerintah Kabupaten Muna	C	B
414	Pemerintah Kabupaten Kolaka	B	B
415	Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan	CC	B
416	Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara	CC	B
417	Pemerintah Kabupaten Bombana	B	B
418	Pemerintah Kabupaten Wakatobi	B	B
419	Pemerintah Kabupaten Buton Utara	CC	B

No	Instansi Pemerintah	Predikat RB Tahun 2023	Predikat SAKIP Tahun 2023
420	Pemerintah Kabupaten Konawe Utara	CC	B
421	Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur	C	CC
422	Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan	C	B
423	Pemerintah Kabupaten Buton Selatan	CC	B
424	Pemerintah Kabupaten Buton Tengah	CC	B
425	Pemerintah Kabupaten Muna Barat	C	CC
426	Pemerintah Kota Kendari	CC	B
427	Pemerintah Kota Baubau	C	B
428	Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah	C	B
429	Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara	C	B
430	Pemerintah Kabupaten Buru	C	B
431	Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat	C	Tidak Dievaluasi
432	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	CC	CC
433	Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat	D	CC
434	Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur	C	C
435	Pemerintah Kabupaten Buru Selatan	C	C
436	Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya	C	B
437	Pemerintah Kota Ambon	C	B
438	Pemerintah Kota Tual	C	CC
439	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	C	C
440	Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	C	C
441	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula	D	C
442	Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan	C	CC
443	Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara	C	B
444	Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur	C	CC
445	Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai	C	CC
446	Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu	D	CC
447	Pemerintah Kota Ternate	C	Tidak Dievaluasi
448	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	C	B
449	Pemerintah Kabupaten Jayapura	C	CC
450	Pemerintah Kabupaten Biak Numfor	C	CC
451	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen	C	C
452	Pemerintah Kabupaten Merauke	C	CC
453	Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	C	CC
454	Pemerintah Kabupaten Nabire	D	C
455	Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya	D	C
456	Pemerintah Kabupaten Paniai	D	C
457	Pemerintah Kabupaten Mimika	C	CC
458	Pemerintah Kabupaten Boven Digoel	D	C
459	Pemerintah Kabupaten Mappi	C	CC
460	Pemerintah Kabupaten Asmat	C	B
461	Pemerintah Kabupaten Yahukimo	D	C
462	Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang	D	Tidak Dievaluasi
463	Pemerintah Kabupaten Tolikara	D	C

No	Instansi Pemerintah	Predikat RB Tahun 2023	Predikat SAKIP Tahun 2023
464	Pemerintah Kabupaten Sarmi	D	C
465	Pemerintah Kabupaten Keerom	C	CC
466	Pemerintah Kabupaten Waropen	D	Tidak Dievaluasi
467	Pemerintah Kabupaten Supiori	D	C
468	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya	D	C
469	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah	D	Tidak Dievaluasi
470	Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya	D	C
471	Pemerintah Kabupaten Yalimo	D	C
472	Pemerintah Kabupaten Nduga	D	C
473	Pemerintah Kabupaten Dogiyai	D	Tidak Dievaluasi
474	Pemerintah Kabupaten Puncak	D	C
475	Pemerintah Kabupaten Deiyai	D	C
476	Pemerintah Kabupaten Intan Jaya	D	Tidak Dievaluasi
477	Pemerintah Kota Jayapura	CC	B
478	Pemerintah Kabupaten Bintan	B	B
479	Pemerintah Kabupaten Karimun	BB	BB
480	Pemerintah Kabupaten Natuna	BB	BB
481	Pemerintah Kabupaten Lingga	BB	B
482	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	BB	B
483	Pemerintah Kota Batam	A	B
484	Pemerintah Kota Tanjungpinang	BB	BB
485	Pemerintah Kabupaten Sorong	CC	B
486	Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan	D	CC
487	Pemerintah Kabupaten Raja Ampat	C	B
488	Pemerintah Kabupaten Manokwari	C	CC
489	Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni	D	Tidak Dievaluasi
490	Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama	C	B
491	Pemerintah Kabupaten FakFak	C	CC
492	Pemerintah Kabupaten Kaimana	C	CC
493	Pemerintah Kabupaten Tambrau	D	CC
494	Pemerintah Kabupaten Maybrat	D	Tidak Dievaluasi
495	Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak	D	Tidak Dievaluasi
496	Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan	D	C
497	Pemerintah Kota Sorong	C	C
498	Pemerintah Kabupaten Pasangkayu	CC	CC
499	Pemerintah Kabupaten Mamuju	CC	B
500	Pemerintah Kabupaten Mamas	C	CC
501	Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	B	BB
502	Pemerintah Kabupaten Majene	CC	B
503	Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	C	CC
504	Pemerintah Kabupaten Bulungan	BB	B
505	Pemerintah Kabupaten Malinau	C	B
506	Pemerintah Kabupaten Nunukan	B	B
507	Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	B	B
508	Pemerintah Kota Tarakan	BB	B

Daftar Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas
sampai dengan Tahun 2023

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1	Arsip Nasional Republik Indonesia	Pusat Akreditasi Kearsipan	WBK	2021
2	Arsip Nasional Republik Indonesia	Direktorat Layanan dan Pemanfaatan	WBK	2022
3	Arsip Nasional Republik Indonesia	Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh	WBK	2023
4	Arsip Nasional Republik Indonesia	Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi	WBK	2023
5	Badan Informasi Geospasial	Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial	WBK	2020
6	Badan Informasi Geospasial	Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial	WBK	2021
7	Badan Informasi Geospasial	Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika	WBK	2022
8	Badan Informasi Geospasial	Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik	WBK	2023
9	Badan Intelijen Negara	Deputi Kontra Intelijen	WBK	2018
10	Badan Intelijen Negara	Deputi Bidang Intelijen Siber	WBK	2021
11	Badan Intelijen Negara	Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur	WBK	2023
12	Badan Kepegawaian Negara	Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar	WBK	2016
13	Badan Kepegawaian Negara	Kantor Regional II BKN Surabaya	WBK	2019
14	Badan Kepegawaian Negara	Kantor Regional III BKN Bandung	WBK	2019
15	Badan Kepegawaian Negara	Kantor Regional IX BKN Jayapura	WBK	2020
16	Badan Kepegawaian Negara	Kantor Regional XI Manado	WBK	2020
17	Badan Kepegawaian Negara	Kantor Regional I BKN Jogjakarta	WBK	2020
18	Badan Kepegawaian Negara	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	WBK	2021
19	Badan Kepegawaian Negara	Kantor Regional X BKN Denpasar	WBK	2021
20	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	WBK	2019
21	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana	WBK	2020
22	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Direktorat Bina Ketahanan Remaja	WBK	2020
23	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah	WBK	2020
24	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat	WBK	2020

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
25	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat	WBK	2020
26	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur	WBBM	2021
27	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah	WBK	2021
28	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Direktorat Pelaporan dan Statistik	WBK	2021
29	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku	WBK	2022
30	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau	WBK	2023
31	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan	WBK	2023
32	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Perwakilan BKKBN Provinsi Riau	WBK	2023
33	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV Makassar	WBK	2017
34	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III Denpasar	WBK	2019
35	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Stasiun Klimatologi Semarang	WBK	2020
36	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Stasiun Meteorologi Ngurah Rai Denpasar	WBK	2020
37	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Stasiun Geofisika Sanglah	WBK	2020
38	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Stasiun Meteorologi Perak II Surabaya	WBK	2020
39	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta	WBK	2020
40	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Stasiun Meteorologi Maritim Paotere	WBK	2020
41	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Stasiun Meteorologi Kualanamu	WBK	2020
42	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Stasiun Meteorologi Juanda	WBK	2020
43	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah II Tangerang Selatan	WBK	2020
44	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Stasiun Klimatologi Malang	WBK	2021
45	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Stasiun Meteorologi Pontianak	WBK	2021
46	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang	WBK	2021
47	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Stasiun Meteorologi Hassanudin	WBK	2021

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
48	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Stasiun Klimatologi Tangerang Selatan	WBK	2021
49	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Stasiun Klimatologi Jembrana	WBK	2021
50	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Stasiun Geofisika Bandung	WBK	2021
51	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Balai Besar MKG Wilayah V Jayapura	WBK	2022
52	Badan Narkotika Nasional	BNNP Sulawesi Selatan	WBK	2020
53	Badan Narkotika Nasional	BNNP Jawa Tengah	WBK	2020
54	Badan Narkotika Nasional	BNNP Bali	WBK	2020
55	Badan Narkotika Nasional	BNNP Jawa Timur	WBK	2020
56	Badan Narkotika Nasional	Loka Rehabilitasi BNN Batam	WBK	2020
57	Badan Narkotika Nasional	Pusat Laboratorium Narkotika	WBBM	2021
58	Badan Narkotika Nasional	BNNK Sidoarjo	WBK	2021
59	Badan Narkotika Nasional	Balai Besar Rehabilitasi BNN	WBK	2021
60	Badan Narkotika Nasional	Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	WBK	2021
61	Badan Narkotika Nasional	BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta	WBK	2021
62	Badan Narkotika Nasional	Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	WBK	2021
63	Badan Narkotika Nasional	Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	WBK	2022
64	Badan Narkotika Nasional	BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat	WBK	2023
65	Badan Narkotika Nasional	BNN Kabupaten Magelang	WBK	2023
66	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan	Kantor SAR Surabaya	WBK	2016
67	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan	Kantor SAR Denpasar	WBK	2021
68	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Semarang	WBK	2017
69	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP3TKI Jakarta	WBK	2018
70	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP3TKI Bandung	WBK	2019
71	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP3TKI Pontianak	WBK	2019
72	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP3TKI Lampung	WBK	2020
73	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP3TKI Mataram	WBK	2020
74	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP3TKI Serang	WBK	2020
75	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	BPK RI Perwakilan Provinsi Banten	WBK	2015
76	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK RI	WBBM	2016
77	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta	WBK	2016
78	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh	WBK	2017

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
79	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	WBK	2017
80	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	WBK	2017
81	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	WBK	2018
82	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	WBK	2018
83	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	BPK Sulawesi Tenggara	WBK	2018
84	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	WBK	2019
85	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Keuangan Negara	WBK	2020
86	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	WBK	2020
87	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	WBBM	2020
88	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur	WBBM	2021
89	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	WBK	2021
90	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum)	WBK	2021
91	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	WBK	2021
92	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Gorontalo	WBK	2021
93	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bali	WBK	2021
94	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Auditorat Keuangan Negara IV	WBK	2021
95	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	WBK	2021
96	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Auditorat Keuangan Negara III	WBK	2021
97	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Auditorat Utama Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan	WBBM	2022

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
98	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau	WBBM	2022
99	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bengkulu	WBBM	2022
100	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi	WBBM	2022
101	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	WBK	2017
102	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Pusat Informasi Obat dan Makanan	WBK	2017
103	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BBPOM di Denpasar	WBK	2019
104	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BBPOM di Pekanbaru	WBK	2019
105	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BBPOM di Pontianak	WBK	2019
106	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	WBK	2019
107	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	WBK	2020
108	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	WBK	2020
109	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang	WBK	2020
110	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Direktorat Registrasi Obat	WBK	2020
111	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	WBK	2020
112	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BBPOM di Jakarta	WBK	2020
113	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BBPOM di Semarang	WBK	2020
114	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BPOM di Gorontalo	WBK	2020
115	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	WBK	2020
116	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Direktorat Pengawasan Kosmetik	WBK	2020
117	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	WBBM	2020
118	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BBPOM di Surabaya	WBBM	2021
119	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	WBBM	2021
120	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BBPOM di Padang	WBBM	2021
121	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BBPOM di Yogyakarta	WBBM	2021

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
122	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	WBK	2021
123	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	WBK	2021
124	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BBPOM di Banjarmasin	WBK	2021
125	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BPOM di Manokwari	WBK	2021
126	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BBPOM di Bandung	WBK	2021
127	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BBPOM di Bandar Lampung	WBK	2021
128	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BBPOM di Mataram	WBK	2021
129	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Balai Besar POM di Makassar	WBK	2022
130	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Balai Besar POM di Manado	WBK	2023
131	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Balai Besar POM di Banda Aceh	WBK	2023
132	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Balai POM di Kupang	WBK	2023
133	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat	WBK	2020
134	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	WBK	2017
135	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	WBK	2017
136	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	WBK	2018
137	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	WBK	2020
138	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor	WBBM	2021
139	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	WBK	2021
140	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan BPKP	WBK	2021
141	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Inspektorat BPKP	WBK	2021
142	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	WBK	2021
143	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	WBK	2021
144	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	WBK	2021

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
145	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	WBBM	2022
146	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	WBK	2022
147	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	WBK	2022
148	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Perwakilan BPKP Provinsi Riau	WBK	2022
149	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Deputi Bidang Akuntan Negara	WBK	2023
150	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan	WBK	2023
151	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Perwakilan BPKP Sumatera Barat	WBK	2023
152	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Dan Kemaritiman	WBK	2023
153	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan BPKP	WBBM	2023
154	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Balai Teknologi Polimer (BTP)	WBK	2017
155	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Balai Bioteknologi (Biotek)	WBK	2020
156	Badan Pusat Statistik	BPS Prov. Sulawesi Barat	WBK	2014
157	Badan Pusat Statistik	BPS Kota Bukittinggi	WBK	2018
158	Badan Pusat Statistik	BPS Kabupaten Lamandau	WBK	2019
159	Badan Pusat Statistik	BPS Kota Kendari	WBK	2019
160	Badan Pusat Statistik	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	WBK	2019
161	Badan Pusat Statistik	BPS Kabupaten Jember	WBK	2020
162	Badan Pusat Statistik	BPS Kabupaten Pati	WBK	2020
163	Badan Pusat Statistik	BPS Kabupaten Sigi	WBK	2020
164	Badan Pusat Statistik	BPS Kota Malang	WBK	2020
165	Badan Pusat Statistik	BPS Kota Pekalongan	WBK	2020
166	Badan Pusat Statistik	BPS Kota Semarang	WBK	2020
167	Badan Pusat Statistik	BPS Kota Singkawang	WBK	2020
168	Badan Pusat Statistik	BPS Kota Surakarta	WBK	2020
169	Badan Pusat Statistik	BPS Provinsi Jawa Tengah	WBK	2020
170	Badan Pusat Statistik	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	WBK	2020
171	Badan Pusat Statistik	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	WBK	2020
172	Badan Pusat Statistik	BPS Provinsi Sulawesi Selatan	WBK	2020
173	Badan Pusat Statistik	BPS Provinsi Sumatera Barat	WBK	2020
174	Badan Pusat Statistik	BPS Provinsi Sumatera Selatan	WBK	2020
175	Badan Pusat Statistik	BPS Kabupaten Gianyar	WBBM	2020

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
176	Badan Pusat Statistik	BPS Kota Madiun	WBBM	2020
177	Badan Pusat Statistik	BPS Provinsi Jawa Timur	WBBM	2021
178	Badan Pusat Statistik	BPS Kabupaten Kediri	WBK	2021
179	Badan Pusat Statistik	BPS Kota Sorong	WBK	2021
180	Badan Pusat Statistik	BPS Kabupaten Pinrang	WBK	2021
181	Badan Pusat Statistik	BPS Provinsi Sulawesi Utara	WBK	2021
182	Badan Pusat Statistik	BPS Kabupaten Kotawaringin Barat	WBK	2021
183	Badan Pusat Statistik	BPS Kabupaten Bangli	WBK	2021
184	Badan Pusat Statistik	BPS Kabupaten Badung	WBK	2021
185	Badan Pusat Statistik	BPS Provinsi Bali	WBK	2021
186	Badan Pusat Statistik	BPS Kota Blitar	WBK	2021
187	Badan Pusat Statistik	BPS Kabupaten Mojokerto	WBK	2021
188	Badan Pusat Statistik	BPS Kabupaten Sidoarjo	WBK	2021
189	Badan Pusat Statistik	BPS Kabupaten Trenggalek	WBK	2021
190	Badan Pusat Statistik	BPS Kota Tegal	WBK	2021
191	Badan Pusat Statistik	BPS Kabupaten Wonosobo	WBK	2021
192	Badan Pusat Statistik	BPS Kota Magelang	WBK	2021
193	Badan Pusat Statistik	BPS Provinsi Jawa Barat	WBK	2021
194	Badan Pusat Statistik	BPS Kabupaten Simeulue	WBK	2021
195	Badan Pusat Statistik	BPS Kabupaten Jembrana	WBK	2022
196	Badan Pusat Statistik	BPS Kota Tasikmalaya	WBK	2022
197	Badan Pusat Statistik	BPS Kabupaten Boalemo	WBK	2022
198	Badan Pusat Statistik	BPS Kabupaten Klungkung	WBK	2022
199	Badan Pusat Statistik	BPS Provinsi Kalimantan Tengah	WBK	2022
200	Badan Pusat Statistik	BPS Provinsi Jambi	WBK	2022
201	Badan Pusat Statistik	BPS Kabupaten Bengkulu Utara	WBK	2023
202	Badan Pusat Statistik	BPS Kabupaten Semarang	WBK	2023
203	Badan Pusat Statistik	BPS Kabupaten Kendal	WBK	2023
204	Badan Pusat Statistik	BPS Provinsi Kalimantan Utara	WBK	2023
205	Badan Siber dan Sandi Negara	Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)	WBK	2020
206	Badan Siber dan Sandi Negara	Museum Sandi BSSN	WBK	2021
207	Badan Standardisasi Nasional	Direktorat Akreditasi Laboratorium	WBK	2020
208	Badan Standardisasi Nasional	Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	WBK	2020
209	Badan Standardisasi Nasional	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Mekanika, Radiasi dan Biologi	WBK	2022
210	Badan Standardisasi Nasional	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Termoelekterik dan Kimia	WBK	2022
211	Badan Tenaga Nuklir Nasional	Pusat Teknologi Limbah Radioaktif	WBBM	2018
212	Badan Tenaga Nuklir Nasional	Pusat Pendidikan dan Pelatihan BATAN	WBK	2018
213	Badan Tenaga Nuklir Nasional	Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi	WBK	2018

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
214	Badan Tenaga Nuklir Nasional	Pusat Reaktor Serba Guna	WBK	2019
215	Badan Tenaga Nuklir Nasional	Pusat Diseminasi dan Kemitraan	WBK	2020
216	Badan Tenaga Nuklir Nasional	Pusat Sains dan Teknologi Akselerator	WBK	2020
217	Badan Tenaga Nuklir Nasional	Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan	WBK	2020
218	Badan Tenaga Nuklir Nasional	Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka	WBK	2020
219	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Bantul	WBK	2018
220	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Deli Serdang	WBK	2018
221	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Gianyar	WBK	2018
222	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah	WBK	2018
223	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Lampung Utara	WBK	2018
224	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Situbondo	WBK	2018
225	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Tanah Datar	WBK	2018
226	Kejaksaan Republik Indonesia	Badan Diklat Kejaksaan RI	WBBM	2019
227	Kejaksaan Republik Indonesia	Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus	WBBM	2019
228	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Belitung	WBBM	2019
229	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan	WBBM	2019
230	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Surabaya	WBBM	2019
231	Kejaksaan Republik Indonesia	Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara	WBK	2019
232	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Aceh Singkil	WBK	2019
233	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara	WBK	2019
234	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Bangka Selatan	WBK	2019
235	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Bangkalan	WBK	2019
236	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Banjarbaru	WBK	2019
237	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Belitung Timur	WBK	2019
238	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Brebes	WBK	2019
239	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Buol	WBK	2019
240	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Denpasar	WBK	2019
241	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan	WBK	2019

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
242	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Jakarta Utara	WBK	2019
243	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon	WBK	2019
244	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo	WBK	2019
245	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Karangasem	WBK	2019
246	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Kolaka	WBK	2019
247	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Kota Bandung	WBK	2019
248	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Lamongan	WBK	2019
249	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Lembata	WBK	2019
250	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	WBK	2019
251	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Luwu	WBK	2019
252	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang	WBK	2019
253	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Pariaman	WBK	2019
254	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Pontianak	WBK	2019
255	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Sampang	WBK	2019
256	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Sanggau	WBK	2019
257	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	WBK	2019
258	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	WBK	2019
259	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Tomohon	WBK	2019
260	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Tinggi Gorontalo	WBK	2019
261	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	WBK	2019
262	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	WBK	2019
263	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat	WBK	2019
264	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan	WBK	2019
265	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Tinggi Lampung	WBK	2019
266	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	WBK	2019
267	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara	WBK	2019
268	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara	WBK	2019
269	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	WBK	2019

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
270	Kejaksaan Republik Indonesia	Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI	WBK	2019
271	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	WBK	2020
272	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya	WBK	2020
273	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	WBK	2020
274	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Batang	WBK	2020
275	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Karanganyar	WBK	2020
276	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Prabumulih	WBK	2020
277	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara	WBK	2020
278	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Merauke	WBK	2020
279	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Wonosobo	WBK	2020
280	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan	WBK	2020
281	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Jambi	WBK	2020
282	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Pacitan	WBK	2020
283	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Bangka Barat	WBK	2020
284	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Berau	WBK	2020
285	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Pulang Pisau	WBK	2020
286	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Mukomuko	WBK	2020
287	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan	WBK	2020
288	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Tinggi Banten	WBK	2020
289	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Purwokerto	WBK	2020
290	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	WBK	2020
291	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Ternate	WBK	2020
292	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Ngawi	WBK	2020
293	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat	WBK	2020
294	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Kepahiang	WBK	2020
295	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Salatiga	WBK	2020
296	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Magetan	WBK	2020
297	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	WBK	2020

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
298	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Sambas	WBK	2020
299	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Barito Timur	WBK	2020
300	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Jeneponto	WBK	2020
301	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Tulung Agung	WBK	2020
302	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Tabanan	WBK	2020
303	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Gunung Kidul	WBK	2020
304	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun	WBK	2020
305	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Sintang	WBK	2020
306	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Jakarta Barat	WBK	2020
307	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Depok	WBK	2020
308	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang	WBK	2020
309	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Dairi	WBK	2020
310	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Jember	WBBM	2020
311	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe	WBBM	2020
312	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi	WBBM	2020
313	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	WBBM	2020
314	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	WBBM	2020
315	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Badung	WBBM	2020
316	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Pekanbaru	WBBM	2020
317	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	WBBM	2020
318	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan	WBBM	2020
319	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Tinggi Bali	WBBM	2021
320	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Maros	WBBM	2021
321	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Tinggi Jambi	WBBM	2021
322	Kejaksaan Republik Indonesia	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	WBBM	2021
323	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Nganjuk	WBK	2021
324	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Batu	WBK	2021
325	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	WBK	2021

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
326	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Balangan	WBK	2021
327	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Ngada	WBK	2021
328	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Nunukan	WBK	2021
329	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	WBK	2021
330	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara	WBK	2021
331	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Merangin	WBK	2021
332	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Jembrana	WBK	2021
333	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Tana Toraja	WBK	2021
334	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Kotabaru	WBK	2021
335	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Pati	WBK	2021
336	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Lampung Tengah	WBK	2021
337	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	WBK	2021
338	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Binjai	WBK	2021
339	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Tinggi Riau	WBK	2021
340	Kejaksaan Republik Indonesia	Jaksa Agung Muda Pembinaan	WBK	2021
341	Kejaksaan Republik Indonesia	Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang	WBK	2022
342	Kementerian Agama	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin	WBK	2017
343	Kementerian Agama	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	WBK	2017
344	Kementerian Agama	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem	WBK	2018
345	Kementerian Agama	Balai Diklat Keagamaan Semarang	WBK	2019
346	Kementerian Agama	Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir	WBK	2019
347	Kementerian Agama	Kementerian Agama Kota Singkawang	WBK	2019
348	Kementerian Agama	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga	WBK	2020
349	Kementerian Agama	Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar	WBBM	2020
350	Kementerian Agama	Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	WBBM	2020
351	Kementerian Agama	MAN IC Serpong	WBK	2021
352	Kementerian Agama	Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga	WBK	2021
353	Kementerian Agama	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	WBBM	2022
354	Kementerian Agama	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali	WBBM	2022
355	Kementerian Agama	MAN 2 Kudus	WBK	2022

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
356	Kementerian Agama	Madrasah Aliyah Negeri Karangasem	WBK	2022
357	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Langsa	WBK	2018
358	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur	WBK	2019
359	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang	WBK	2019
360	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara	WBK	2019
361	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Metro	WBK	2019
362	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Pontianak	WBK	2019
363	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Semarang	WBK	2020
364	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	WBK	2020
365	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	WBK	2020
366	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Samarinda	WBK	2020
367	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Cirebon	WBK	2020
368	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Surabaya II	WBK	2020
369	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Surakarta	WBK	2020
370	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten	WBK	2020
371	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Makassar	WBK	2020
372	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Mataram	WBK	2020
373	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Batam	WBK	2020
374	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Surabaya I	WBBM	2020

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
375	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik	WBBM	2021
376	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru	WBBM	2021
377	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Bandung	WBBM	2021
378	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Magelang	WBK	2021
379	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat	WBK	2021
380	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Medan	WBK	2021
381	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Denpasar	WBK	2021
382	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Bogor	WBK	2021
383	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kabupaten Badung	WBK	2021
384	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur	WBK	2021
385	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan	WBK	2021
386	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung	WBK	2021
387	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Tangerang	WBK	2021
388	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Kupang	WBK	2022
389	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut	WBK	2022
390	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar	WBK	2022
391	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan	WBK	2022
392	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan	WBK	2022
393	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang	WBK	2022

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
394	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi	WBK	2023
395	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Bitung	WBK	2023
396	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang	WBK	2023
397	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	WBK	2023
398	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta	WBK	2023
399	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kantor Pertanahan Kota Balikpapan	WBK	2023
400	Kementerian Dalam Negeri	Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	WBK	2020
401	Kementerian Dalam Negeri	Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	WBK	2020
402	Kementerian Dalam Negeri	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	WBK	2020
403	Kementerian Dalam Negeri	BIRO ADMINISTRASI KEPRAJAAN DAN ALUMNI IPDN	WBK	2021
404	Kementerian Dalam Negeri	DIREKTORAT PENCATATAN SIPIL	WBK	2021
405	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat (BBPLM) Jakarta	WBK	2019
406	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta	WBK	2020
407	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan	WBK	2020
408	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Direktorat Promosi dan Kemitraan	WBK	2020
409	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara	WBK	2018
410	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pusat Pengembangan SDM Aparatur	WBK	2018
411	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi KEMEN ESDM	WBK	2019

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
412	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	WBK	2019
413	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (Lemigas)	WBK	2019
414	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara (PPSDM Geominerba)	WBK	2019
415	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE)	WBK	2019
416	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	WBK	2020
417	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral	WBK	2020
418	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara	WBK	2020
419	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara	WBK	2020
420	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	WBK	2020
421	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan	WBK	2020
422	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	WBK	2020
423	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	WBK	2020
424	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan	WBK	2020
425	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Politeknik Energi dan Mineral Akamigas	WBK	2020
426	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	PPSDM Minyak dan Gas Bumi	WBBM	2020
427	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	WBBM	2020
428	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara	WBK	2021
429	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	WBK	2021
430	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Panas Bumi	WBK	2021
431	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Museum Geologi - Badan Geologi	WBK	2022
432	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktorat Bioenergi	WBK	2023
433	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lapas Wanita Kelas IIA Bulu	WBK	2015
434	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Direktorat Perdata	WBK	2018
435	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Metro	WBK	2018
436	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Salemba	WBK	2018
437	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rumah Tahanan Klas I Cirebon	WBK	2018

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
438	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	WBBM	2019
439	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar	WBBM	2019
440	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cirebon	WBBM	2019
441	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang	WBBM	2019
442	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri	WBK	2019
443	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Direktorat Ijin Tinggal Keimigrasian	WBK	2019
444	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian	WBK	2019
445	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	WBK	2019
446	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam	WBK	2019
447	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat	WBK	2019
448	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura	WBK	2019
449	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkal Pinang	WBK	2019
450	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang	WBK	2019
451	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap	WBK	2019
452	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi kelas II TPI Parepare	WBK	2019
453	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kanwil Kemenkumham Jawa Barat	WBK	2019
454	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan	WBK	2019
455	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang	WBK	2019
456	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	WBK	2019
457	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen	WBK	2019
458	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone	WBK	2019
459	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes	WBK	2019
460	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim	WBK	2019
461	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Cikarang	WBK	2019
462	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon	WBK	2019
463	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang	WBK	2019
464	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rumah Tahanan Kelas I Bandung	WBK	2019
465	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rumah Tahanan Kelas I Tanjungpinang	WBK	2019

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
466	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rumah Tahanan Kelas IIB Bantul	WBK	2019
467	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rumah Tahanan Kelas IIB Pinrang	WBK	2019
468	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rumah Tahanan Kelas IIB Wonogiri	WBK	2019
469	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM	WBK	2019
470	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Wilayah Yogyakarta	WBK	2020
471	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Wilayah DKI Jakarta	WBK	2020
472	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	BPHN	WBK	2020
473	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Ditjen Administrasi Hukum Umum	WBK	2020
474	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Ditjen Kekayaan Intelektual	WBK	2020
475	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Politeknik Ilmu Keimigrasian	WBK	2020
476	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Wilayah Riau	WBK	2020
477	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Wilayah Sulawesi Selatan	WBK	2020
478	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Badiklat Jawa Tengah	WBK	2020
479	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas I Bogor	WBK	2020
480	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas I Malang	WBK	2020
481	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas II Manokwari	WBK	2020
482	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas II Pati	WBK	2020
483	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi	WBK	2020
484	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lapas Kelas II A Banceuy Bandung	WBK	2020
485	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang	WBK	2020
486	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rupbasan Kelas I Palangkaraya	WBK	2020
487	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rutan Kelas II B Kraksaan	WBK	2020
488	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rupbasan Kelas I Denpasar	WBK	2020
489	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung	WBK	2020
490	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas II Bagan Siapi-Api	WBK	2020
491	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis	WBK	2020
492	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rutan Kelas II B Pangkajene	WBK	2020
493	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Wilayah Sulawesi Tengah	WBK	2020

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
494	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lapas Kelas II B Tahuna	WBK	2020
495	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas II Bitung	WBK	2020
496	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas II Belawan	WBK	2020
497	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo	WBK	2020
498	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rupbasan Kelas I Bandung	WBK	2020
499	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rutan Kelas II B Purworejo	WBK	2020
500	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rutan Kelas II B Batang	WBK	2020
501	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas II Kediri	WBK	2020
502	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Bapas Kelas I Banjarmasin	WBK	2020
503	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang	WBK	2020
504	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal	WBK	2020
505	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru	WBK	2020
506	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta	WBK	2020
507	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat	WBK	2020
508	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lapas Perempuan Kelas II A Jakarta	WBK	2020
509	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak	WBK	2020
510	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Bapas Kelas I Surakarta	WBK	2020
511	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas I Semarang	WBK	2020
512	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas II Madiun	WBK	2020
513	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Wilayah Kalimantan Barat	WBK	2020
514	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangkaraya	WBK	2020
515	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rutan Kelas II B Tanjung Balai Karimun	WBK	2020
516	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja	WBK	2020
517	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lapas Perempuan Kelas II A Denpasar	WBK	2020
518	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai	WBK	2020
519	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Wilayah Gorontalo	WBK	2020
520	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas I Jambi	WBK	2020
521	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi	WBK	2020

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
522	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta	WBK	2020
523	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rumah Detensi Imigrasi Surabaya	WBK	2020
524	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Wilayah NTB	WBK	2020
525	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas II Sorong	WBK	2020
526	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Bapas Kelas I Jakarta Timur/Jakarta Utara	WBK	2020
527	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lapas Terbuka Kelas III Rumbai	WBK	2020
528	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara	WBK	2020
529	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas III Takengon	WBK	2020
530	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rutan Kelas II A Yogyakarta	WBK	2020
531	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo	WBK	2020
532	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan	WBK	2020
533	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Bapas Kelas II Watampone	WBK	2020
534	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rumah Detensi Imigrasi Manado	WBK	2020
535	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rutan Kelas II B Wonosari	WBK	2020
536	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rutan Kelas II B Wonosobo	WBK	2020
537	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rumah Detensi Imigrasi Semarang	WBK	2020
538	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta	WBK	2020
539	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lapas Kelas I Malang	WBBM	2020
540	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas II Karawang	WBBM	2020
541	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Pandan	WBBM	2020
542	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lapas Perempuan Kelas II A Semarang	WBBM	2020
543	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan	WBBM	2020
544	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang	WBBM	2020
545	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas I Makassar	WBBM	2020
546	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya	WBBM	2020
547	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar	WBBM	2020
548	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang	WBBM	2020
549	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lapas Kelas II A Cibinong	WBBM	2020

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
550	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rupbasan Kelas II Wates	WBBM	2021
551	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lapas Kelas I Cirebon	WBBM	2021
552	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Wilayah Jawa Timur	WBBM	2021
553	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak	WBBM	2021
554	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Muara Enim	WBBM	2021
555	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	WBBM	2021
556	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rutan Perempuan Kelas II A Medan	WBK	2021
557	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rupbasan Kelas I Surabaya	WBK	2021
558	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rupbasan Kelas II Probolinggo	WBK	2021
559	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rupbasan Kelas I Cirebon	WBK	2021
560	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Politeknik Ilmu Pemasarakatan	WBK	2021
561	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pusat Data Dan Informasi Kementerian Hukum dan HAM	WBK	2021
562	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lapas Perempuan Kelas II B Kupang	WBK	2021
563	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang	WBK	2021
564	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lapas Kelas I Surabaya	WBK	2021
565	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lapas Kelas I Palembang	WBK	2021
566	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lapas Kelas II B Sleman	WBK	2021
567	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lapas Kelas II B Pasuruan	WBK	2021
568	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lapas Kelas II B Mojokerto	WBK	2021
569	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lapas Kelas II A Mataram	WBK	2021
570	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lapas Kelas II A Kotabumi	WBK	2021
571	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lapas Kelas II A Kalianda	WBK	2021
572	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Lapas Kelas II A Bogor	WBK	2021
573	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Wilayah Sumatera Selatan	WBK	2021
574	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Wilayah Sumatera Barat	WBK	2021
575	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Wilayah Bangka Belitung	WBK	2021
576	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Wilayah Kalimantan Tengah	WBK	2021
577	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Wilayah Bali	WBK	2021

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
578	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kanim Kelas I TPI Palembang	WBK	2021
579	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kanim Kelas I TPI Pekanbaru	WBK	2021
580	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kanim Kelas I TPI Palu	WBK	2021
581	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kanim Kelas I TPI Balikpapan	WBK	2021
582	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kanim Kelas I TPI Jakarta Timur	WBK	2021
583	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kanim Kelas I Non TPI Serang	WBK	2021
584	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kanim Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta	WBK	2021
585	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kanim Kelas I Non TPI Palangkaraya	WBK	2021
586	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kanim Kelas II TPI Tembilahan	WBK	2021
587	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kanim Kelas II TPI Dumai	WBK	2021
588	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kanim Kelas II TPI Biak	WBK	2021
589	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kanim Kelas II Non TPI Wonosobo	WBK	2021
590	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kanim Kelas II Non TPI Depok	WBK	2021
591	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kanim Kelas II Non TPI Ponorogo	WBK	2021
592	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kanim Kelas II Non TPI Kotamobagu	WBK	2021
593	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Direktorat Jenderal Pemasarakatan	WBK	2021
594	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Bapas Kelas I Malang	WBK	2021
595	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Bapas Kelas I Surabaya	WBK	2021
596	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Bapas Kelas I Palembang	WBK	2021
597	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Bapas Kelas II Pati	WBK	2021
598	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Bapas Kelas II Magelang	WBK	2021
599	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Bapas Kelas II Pangkalan Bun	WBK	2021
600	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Bapas Kelas II Balikpapan	WBK	2021
601	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Bapas Kelas II Karangasem	WBK	2021
602	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Bapas Kelas II Kendari	WBK	2021
603	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Bapas Kelas II Gorontalo	WBK	2021
604	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Badiklat Sulawesi Utara	WBK	2021
605	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rupbasan Kelas II Blitar	WBK	2022

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
606	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kanim Kelas I TPI Kendari	WBK	2022
607	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kanim Kelas II Non TPI Tobelo	WBK	2022
608	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	WBK	2017
609	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar Sukabumi, Ditjen Perikanan Budidaya, KKP.	WBK	2014
610	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Balai KIPM Kelas II Semarang, Badan KIPM, KKP.	WBK	2014
611	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	WBK	2015
612	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, KKP	WBK	2016
613	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar	WBK	2019
614	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya II	WBK	2019
615	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu Jakarta II	WBK	2021
616	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi	WBK	2021
617	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	WBK	2021
618	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar	WBBM	2022
619	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	WBK	2022
620	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru	WBK	2022
621	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak	WBK	2022
622	Kementerian Kelautan dan Perikanan	BKIPM Balikpapan	WBK	2023
623	Kementerian Kesehatan	RSUP Dr. Kariadi	WBBM	2015
624	Kementerian Kesehatan	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok	WBK	2016
625	Kementerian Kesehatan	Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta III	WBK	2016
626	Kementerian Kesehatan	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta	WBK	2017
627	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang	WBK	2017
628	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten	WBK	2017
629	Kementerian Kesehatan	RS Kanker Dharmas Jakarta	WBK	2018
630	Kementerian Kesehatan	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta	WBK	2019

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
631	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. Soeharso Surakarta	WBK	2019
632	Kementerian Kesehatan	Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan	WBK	2020
633	Kementerian Kesehatan	Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang	WBK	2020
634	Kementerian Kesehatan	Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta	WBK	2020
635	Kementerian Kesehatan	Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang	WBK	2020
636	Kementerian Kesehatan	Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang	WBK	2020
637	Kementerian Kesehatan	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas (KKP) II Samarinda	WBK	2020
638	Kementerian Kesehatan	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta	WBK	2020
639	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah	WBK	2020
640	Kementerian Kesehatan	Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo	WBK	2020
641	Kementerian Kesehatan	Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya	WBK	2020
642	Kementerian Kesehatan	Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM) Makassar	WBK	2020
643	Kementerian Kesehatan	Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Jakarta	WBK	2022
644	Kementerian Kesehatan	RS Pusat Otak Nasional (RSPON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	WBK	2023
645	Kementerian Kesehatan	Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Palembang	WBK	2023
646	Kementerian Kesehatan	Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Gorontalo	WBK	2023
647	Kementerian Ketenagakerjaan	Balai Latihan Kerja Lembang	WBK	2020
648	Kementerian Keuangan	Dit Dana Perimbangan DJPK	WBBM	2014
649	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta	WBBM	2014
650	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang	WBBM	2014
651	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar III Jakarta	WBBM	2014
652	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kediri	WBBM	2014
653	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh	WBBM	2014
654	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Purwokerto	WBBM	2014
655	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II	WBBM	2014
656	Kementerian Keuangan	Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jakarta	WBBM	2014
657	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Bojonegoro	WBK	2014

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
658	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Purwakarta	WBK	2014
659	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bangko	WBK	2014
660	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Amlapura	WBBM	2016
661	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan	WBK	2016
662	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuningan	WBBM	2017
663	Kementerian Keuangan	Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, DJPK	WBK	2017
664	Kementerian Keuangan	Direktorat Surat Utang Negara, DJPPR	WBK	2017
665	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor	WBK	2017
666	Kementerian Keuangan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum, BPPK	WBK	2017
667	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kotamobagu	WBBM	2018
668	Kementerian Keuangan	Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekjen Kemenkeu	WBK	2018
669	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Kepulauan Riau	WBK	2018
670	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang	WBK	2018
671	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung	WBK	2018
672	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar	WBK	2018
673	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo	WBK	2018
674	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya	WBK	2018
675	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 2	WBK	2018
676	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 5	WBK	2018
677	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur	WBK	2018
678	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kalideres	WBK	2018
679	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan	WBK	2018
680	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan	WBK	2018
681	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh	WBK	2018
682	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak PRATAMA PANGKALAN BUN	WBK	2018

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
683	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan	WBK	2018
684	Kementerian Keuangan	KPPBC TMP B Palembang	WBK	2018
685	Kementerian Keuangan	KPPBC TMP C Purwokerto	WBK	2018
686	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi	WBK	2018
687	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cirebon	WBK	2018
688	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Liwa	WBK	2018
689	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwodadi	WBK	2018
690	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singkawang	WBK	2018
691	Kementerian Keuangan	Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan	WBK	2018
692	Kementerian Keuangan	Pusdiklat Bea Cukai	WBK	2018
693	Kementerian Keuangan	Pusdiklat KNPK	WBK	2018
694	Kementerian Keuangan	Pusintek	WBK	2018
695	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar	WBBM	2019
696	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang	WBBM	2019
697	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi	WBBM	2019
698	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang	WBBM	2019
699	Kementerian Keuangan	KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA	WBBM	2019
700	Kementerian Keuangan	KPP Wajib Pajak Besar Satu	WBBM	2019
701	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V	WBBM	2019
702	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak	WBBM	2019
703	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi	WBBM	2019
704	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Pandan	WBBM	2019
705	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ternate	WBBM	2019
706	Kementerian Keuangan	Balai Laboratorium Bea dan Cukai Jakarta	WBK	2019
707	Kementerian Keuangan	Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	WBK	2019
708	Kementerian Keuangan	Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur	WBK	2019
709	Kementerian Keuangan	Direktorat Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	WBK	2019
710	Kementerian Keuangan	Direktorat Penilaian, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	WBK	2019
711	Kementerian Keuangan	Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	WBK	2019
712	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok	WBK	2019
713	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam	WBK	2019

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
714	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta	WBK	2019
715	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB, dan NTT	WBK	2019
716	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	WBK	2019
717	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar	WBK	2019
718	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang	WBK	2019
719	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar	WBK	2019
720	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai	WBK	2019
721	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV	WBK	2019
722	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya	WBK	2019
723	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematang Siantar	WBK	2019
724	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto	WBK	2019
725	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta	WBK	2019
726	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II	WBK	2019
727	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tarakan	WBK	2019
728	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya	WBK	2019
729	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi	WBK	2019
730	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang	WBK	2019
731	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan	WBK	2019
732	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat	WBK	2019
733	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu	WBK	2019
734	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru	WBK	2019
735	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin Utara	WBK	2019
736	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng	WBK	2019
737	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi	WBK	2019
738	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi	WBK	2019
739	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi	WBK	2019
740	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan	WBK	2019

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
741	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman	WBK	2019
742	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu	WBK	2019
743	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua	WBK	2019
744	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok	WBK	2019
745	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar	WBK	2019
746	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus	WBK	2019
747	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene	WBK	2019
748	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	WBK	2019
749	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro	WBK	2019
750	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat	WBK	2019
751	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang	WBK	2019
752	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng	WBK	2019
753	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang	WBK	2019
754	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo	WBK	2019
755	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan	WBK	2019
756	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone	WBK	2019
757	Kementerian Keuangan	KPPBC Tipe Madya Cukai Malang	WBK	2019
758	Kementerian Keuangan	KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang	WBK	2019
759	Kementerian Keuangan	KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar	WBK	2019
760	Kementerian Keuangan	KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Pinang	WBK	2019
761	Kementerian Keuangan	KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan	WBK	2019
762	Kementerian Keuangan	KPPBC Tipe Madya Pabean C Ambon	WBK	2019
763	Kementerian Keuangan	KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon	WBK	2019
764	Kementerian Keuangan	KPPBC Tipe Madya Pabean C Kendari	WBK	2019
765	Kementerian Keuangan	KPPBC Tipe Madya Pabean C Kotabaru	WBK	2019
766	Kementerian Keuangan	KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal	WBK	2019
767	Kementerian Keuangan	KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda	WBK	2019
768	Kementerian Keuangan	KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak	WBK	2019
769	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Balikpapan	WBK	2019

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
770	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Banda Aceh	WBK	2019
771	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Bandung I	WBK	2019
772	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Barabai	WBK	2019
773	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Bogor	WBK	2019
774	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Bukittinggi	WBK	2019
775	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Curup	WBK	2019
776	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Denpasar	WBK	2019
777	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta I	WBK	2019
778	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta III	WBK	2019
779	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta IV	WBK	2019
780	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta VII	WBK	2019
781	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jambi	WBK	2019
782	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Kediri	WBK	2019
783	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Kupang	WBK	2019
784	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Makassar I	WBK	2019
785	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Mamuju	WBK	2019
786	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Manado	WBK	2019
787	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Mataram	WBK	2019
788	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Medan II	WBK	2019
789	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Metro	WBK	2019
790	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Mojokerto	WBK	2019
791	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Padang Sidempuan	WBK	2019
792	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Palembang	WBK	2019
793	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Palu	WBK	2019
794	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Solok	WBK	2019
795	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Tanjung Balai	WBK	2019
796	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Tanjung Pinang	WBK	2019
797	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Tasikmalaya	WBK	2019

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
798	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Waingapu	WBK	2019
799	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Bitung	WBK	2019
800	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Bojonegoro	WBK	2019
801	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Cilacap	WBK	2019
802	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ende	WBK	2019
803	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Garut	WBK	2019
804	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Karawang	WBK	2019
805	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Kolaka	WBK	2019
806	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Larantuka	WBK	2019
807	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Luwuk	WBK	2019
808	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Muara Bungo	WBK	2019
809	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Pangkalan Bun	WBK	2019
810	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Purwakarta	WBK	2019
811	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Rengat	WBK	2019
812	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ruteng	WBK	2019
813	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sampit	WBK	2019
814	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sekayu	WBK	2019
815	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Selong	WBK	2019
816	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sidikalang	WBK	2019
817	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sijunjung	WBK	2019
818	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sintang	WBK	2019
819	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sumedang	WBK	2019
820	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tanjungredep	WBK	2019
821	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tobelo	WBK	2019
822	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tual	WBK	2019
823	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Wates	WBK	2019
824	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Wonosari	WBK	2019
825	Kementerian Keuangan	KPTIK BMN Denpasar	WBK	2019
826	Kementerian Keuangan	Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	WBK	2019

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
827	Kementerian Keuangan	Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran	WBK	2020
828	Kementerian Keuangan	Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi	WBK	2020
829	Kementerian Keuangan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	WBK	2020
830	Kementerian Keuangan	Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen	WBK	2020
831	Kementerian Keuangan	Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Makassar	WBK	2020
832	Kementerian Keuangan	Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Medan	WBK	2020
833	Kementerian Keuangan	Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	WBK	2020
834	Kementerian Keuangan	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Manado	WBK	2020
835	Kementerian Keuangan	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta	WBK	2020
836	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta	WBK	2020
837	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat	WBK	2020
838	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I	WBK	2020
839	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II	WBK	2020
840	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat	WBK	2020
841	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara	WBK	2020
842	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas	WBK	2020
843	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua	WBK	2020
844	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan	WBK	2020
845	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin	WBK	2020
846	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo	WBK	2020
847	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun	WBK	2020
848	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tarakan	WBK	2020

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
849	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta	WBK	2020
850	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Amamapare	WBK	2020
851	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh	WBK	2020
852	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkulu	WBK	2020
853	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Biak	WBK	2020
854	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bitung	WBK	2020
855	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro	WBK	2020
856	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bontang	WBK	2020
857	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura	WBK	2020
858	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe	WBK	2020
859	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun	WBK	2020
860	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Magelang	WBK	2020
861	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Meulaboh	WBK	2020
862	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalan Bun	WBK	2020
863	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang	WBK	2020
864	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo	WBK	2020
865	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pulang Pisau	WBK	2020
866	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya	WBK	2020
867	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung	WBK	2020

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
868	Kementerian Keuangan	Balai Laboratorium Bea dan Cukai Medan	WBK	2020
869	Kementerian Keuangan	Balai Laboratorium Bea dan Cukai Surabaya	WBK	2020
870	Kementerian Keuangan	Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Sorong	WBK	2020
871	Kementerian Keuangan	Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	WBK	2020
872	Kementerian Keuangan	Direktorat Barang Milik Negara	WBK	2020
873	Kementerian Keuangan	Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat	WBK	2020
874	Kementerian Keuangan	Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan	WBK	2020
875	Kementerian Keuangan	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi	WBK	2020
876	Kementerian Keuangan	Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain	WBK	2020
877	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh	WBK	2020
878	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat	WBK	2020
879	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara	WBK	2020
880	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Balikpapan	WBK	2020
881	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bandung	WBK	2020
882	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bima	WBK	2020
883	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Gorontalo	WBK	2020
884	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kendari	WBK	2020
885	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Lhokseumawe	WBK	2020
886	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pamekasan	WBK	2020
887	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pangkal Pinang	WBK	2020
888	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pangkalan Bun	WBK	2020
889	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pekanbaru	WBK	2020
890	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Samarinda	WBK	2020
891	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singkawang	WBK	2020
892	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Sorong	WBK	2020
893	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Ternate	WBK	2020
894	Kementerian Keuangan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak	WBK	2020
895	Kementerian Keuangan	Direktorat Keberatan dan Banding	WBK	2020

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
896	Kementerian Keuangan	Direktorat Penegakan Hukum	WBK	2020
897	Kementerian Keuangan	Direktorat Peraturan Perpajakan I	WBK	2020
898	Kementerian Keuangan	Direktorat Peraturan Perpajakan II	WBK	2020
899	Kementerian Keuangan	Direktorat Perpajakan Internasional	WBK	2020
900	Kementerian Keuangan	Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan	WBK	2020
901	Kementerian Keuangan	Direktorat Transformasi Proses Bisnis	WBK	2020
902	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat	WBK	2020
903	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II	WBK	2020
904	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur	WBK	2020
905	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II	WBK	2020
906	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I	WBK	2020
907	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I	WBK	2020
908	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan Dan Tengah	WBK	2020
909	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara	WBK	2020
910	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi	WBK	2020
911	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing	WBK	2020
912	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang	WBK	2020
913	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur	WBK	2020
914	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan	WBK	2020
915	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai	WBK	2020
916	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang	WBK	2020
917	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat	WBK	2020
918	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon	WBK	2020
919	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo	WBK	2020
920	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga	WBK	2020
921	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran	WBK	2020
922	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo	WBK	2020
923	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit	WBK	2020
924	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua	WBK	2020

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
925	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	WBK	2020
926	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu	WBK	2020
927	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember	WBK	2020
928	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe	WBK	2020
929	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung	WBK	2020
930	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari	WBK	2020
931	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang	WBK	2020
932	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa	WBK	2020
933	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe	WBK	2020
934	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun	WBK	2020
935	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang	WBK	2020
936	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan	WBK	2020
937	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur	WBK	2020
938	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur	WBK	2020
939	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan	WBK	2020
940	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu	WBK	2020
941	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan	WBK	2020
942	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan	WBK	2020
943	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren	WBK	2020
944	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede	WBK	2020
945	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya	WBK	2020
946	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta	WBK	2020
947	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima	WBK	2020
948	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman	WBK	2020
949	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok	WBK	2020
950	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang	WBK	2020
951	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan	WBK	2020
952	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat	WBK	2020

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
953	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung	WBK	2020
954	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung	WBK	2020
955	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung	WBK	2020
956	Kementerian Keuangan	Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	WBK	2020
957	Kementerian Keuangan	Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi	WBK	2020
958	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh	WBK	2020
959	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Banjarmasin	WBK	2020
960	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Batam	WBK	2020
961	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Baturaja	WBK	2020
962	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Bengkulu	WBK	2020
963	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Buntok	WBK	2020
964	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Dumai	WBK	2020
965	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Gorontalo	WBK	2020
966	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jayapura	WBK	2020
967	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Klaten	WBK	2020
968	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Langsa	WBK	2020
969	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Lhok Seumawe	WBK	2020
970	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Medan I	WBK	2020
971	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Merauke	WBK	2020
972	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Meulaboh	WBK	2020
973	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Palangkaraya	WBK	2020
974	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Pangkalpinang	WBK	2020
975	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Pekalongan	WBK	2020
976	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Pematang Siantar	WBK	2020
977	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Poso	WBK	2020
978	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Samarinda	WBK	2020
979	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang I	WBK	2020
980	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Serang	WBK	2020

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
981	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Tanjung Selor	WBK	2020
982	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Tanjung	WBK	2020
983	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Tebingtinggi	WBK	2020
984	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Tegal	WBK	2020
985	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Atambua	WBK	2020
986	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Balige	WBK	2020
987	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Banjarnegara	WBK	2020
988	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Banyuwangi	WBK	2020
989	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Bau-Bau	WBK	2020
990	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Biak	WBK	2020
991	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Fak-Fak	WBK	2020
992	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Kuala Tungkal	WBK	2020
993	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Kutacane	WBK	2020
994	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Sikaping	WBK	2020
995	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Makale	WBK	2020
996	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Mukomuko	WBK	2020
997	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Nunukan	WBK	2020
998	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Pacitan	WBK	2020
999	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Painan	WBK	2020
1000	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Putussibau	WBK	2020
1001	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Rangkasbitung	WBK	2020
1002	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Rantau Prapat	WBK	2020
1003	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sanggau	WBK	2020
1004	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sinjai	WBK	2020
1005	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sumbawa Besar	WBK	2020
1006	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sungai Penuh	WBK	2020
1007	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Takengon	WBK	2020
1008	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tapaktuan	WBK	2020

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1009	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tarakan	WBK	2020
1010	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Timika	WBK	2020
1011	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tolitoli	WBK	2020
1012	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tuban	WBK	2020
1013	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Watampone	WBK	2020
1014	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus	WBBM	2020
1015	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung	WBBM	2020
1016	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap	WBBM	2020
1017	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi	WBBM	2020
1018	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai	WBBM	2020
1019	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Madiun	WBBM	2020
1020	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pekalongan	WBBM	2020
1021	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tangerang I	WBBM	2020
1022	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi	WBBM	2020
1023	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tegal	WBBM	2020
1024	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar	WBBM	2020
1025	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur	WBBM	2020
1026	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang	WBBM	2020
1027	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu	WBBM	2020
1028	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara	WBBM	2020
1029	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat	WBBM	2020
1030	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Bandung II	WBBM	2020
1031	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Lahat	WBBM	2020
1032	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Madiun	WBBM	2020
1033	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Pekanbaru	WBBM	2020
1034	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Surakarta	WBBM	2020

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1035	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Yogyakarta	WBBM	2020
1036	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Pelaihari	WBBM	2020
1037	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Singaraja	WBBM	2020
1038	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat	WBBM	2020
1039	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu	WBBM	2021
1040	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam	WBBM	2021
1041	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sabang	WBBM	2021
1042	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan	WBBM	2021
1043	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kuala Namu	WBBM	2021
1044	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Papua	WBBM	2021
1045	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara	WBBM	2021
1046	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta VI	WBBM	2021
1047	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik	WBBM	2021
1048	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Marisa	WBBM	2021
1049	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta	WBBM	2021
1050	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura	WBBM	2021
1051	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Ketapang	WBBM	2021
1052	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau	WBBM	2021
1053	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Benteng	WBBM	2021
1054	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Magelang	WBBM	2021
1055	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar	WBBM	2021
1056	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sorong	WBBM	2021
1057	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta II	WBBM	2021

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1058	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Makassar II	WBBM	2021
1059	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju	WBBM	2021
1060	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya	WBBM	2021
1061	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember	WBBM	2021
1062	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro	WBBM	2021
1063	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke	WBK	2021
1064	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare	WBK	2021
1065	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Luwuk	WBK	2021
1066	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili	WBK	2021
1067	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram	WBK	2021
1068	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Fakfak	WBK	2021
1069	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura	WBK	2021
1070	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat	WBK	2021
1071	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur	WBK	2021
1072	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur	WBK	2021
1073	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak	WBK	2021
1074	Kementerian Keuangan	Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Tanjung Priok	WBK	2021
1075	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis	WBK	2021
1076	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi	WBK	2021
1077	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kuala Tanjung	WBK	2021
1078	Kementerian Keuangan	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	WBK	2021
1079	Kementerian Keuangan	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis	WBK	2021
1080	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallaga	WBK	2021

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1081	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Kendari	WBK	2021
1082	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang	WBK	2021
1083	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat	WBK	2021
1084	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Ambon	WBK	2021
1085	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Pare-Pare	WBK	2021
1086	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk	WBK	2021
1087	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Bima	WBK	2021
1088	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Kotabaru	WBK	2021
1089	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna	WBK	2021
1090	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Surabaya I	WBK	2021
1091	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah	WBK	2021
1092	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua	WBK	2021
1093	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	WBK	2021
1094	Kementerian Keuangan	Direktorat Pengelolaan Kas Negara	WBK	2021
1095	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta	WBK	2021
1096	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying	WBK	2021
1097	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau	WBK	2021
1098	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh	WBK	2021
1099	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat	WBK	2021
1100	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Serui	WBK	2021
1101	Kementerian Keuangan	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	WBK	2021
1102	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan	WBK	2021
1103	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Pamekasan	WBK	2021
1104	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai	WBK	2021
1105	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Nabire	WBK	2021
1106	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi	WBK	2021

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1107	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Surabaya II	WBK	2021
1108	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat	WBK	2021
1109	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang	WBK	2021
1110	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang	WBK	2021
1111	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete	WBK	2021
1112	Kementerian Keuangan	Sekretariat Direktorat Jenderal	WBK	2021
1113	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta	WBK	2021
1114	Kementerian Keuangan	Direktorat Penindakan dan Penyidikan	WBK	2021
1115	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga	WBK	2021
1116	Kementerian Keuangan	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai	WBK	2021
1117	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ketapang	WBK	2021
1118	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen	WBK	2021
1119	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado	WBK	2021
1120	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manokwari	WBK	2021
1121	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak	WBK	2021
1122	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	WBK	2021
1123	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung	WBK	2021
1124	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jember	WBK	2021
1125	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Purworejo	WBK	2021
1126	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Purwokerto	WBK	2021
1127	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Bondowoso	WBK	2021
1128	Kementerian Keuangan	Direktorat Teknis Kepabeanan	WBK	2021
1129	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Tangerang	WBK	2021
1130	Kementerian Keuangan	Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai	WBK	2021

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1131	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sragen	WBK	2021
1132	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi	WBK	2021
1133	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat	WBK	2021
1134	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Sorong	WBK	2021
1135	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta	WBK	2021
1136	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Bantaeng	WBK	2021
1137	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Pati	WBK	2021
1138	Kementerian Keuangan	Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	WBK	2021
1139	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Madya Bogor	WBK	2021
1140	Kementerian Keuangan	Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan	WBK	2021
1141	Kementerian Keuangan	Direktorat Kepatuhan Internal	WBK	2021
1142	Kementerian Keuangan	Direktorat Fasilitas Kepabeanan	WBK	2021
1143	Kementerian Keuangan	Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	WBK	2021
1144	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Sidoarjo	WBK	2021
1145	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Blitar	WBK	2021
1146	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Majene	WBK	2021
1147	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung	WBK	2021
1148	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember	WBK	2021
1149	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nanga Badau	WBK	2021
1150	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur	WBK	2021
1151	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	WBK	2021
1152	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan	WBK	2021
1153	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Gunung Sitoli	WBK	2021
1154	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Kudus	WBK	2021
1155	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa	WBK	2021

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1156	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga	WBK	2021
1157	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua	WBK	2021
1158	Kementerian Keuangan	Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian	WBK	2021
1159	Kementerian Keuangan	Direktorat Intelijen Perpajakan	WBK	2021
1160	Kementerian Keuangan	Direktorat Data dan Informasi Perpajakan	WBK	2021
1161	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup	WBK	2021
1162	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi	WBK	2021
1163	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah	WBK	2021
1164	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara	WBK	2021
1165	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu	WBK	2021
1166	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung	WBK	2021
1167	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin	WBK	2021
1168	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya	WBK	2021
1169	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh	WBK	2021
1170	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat	WBK	2021
1171	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta	WBK	2021
1172	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat	WBK	2021
1173	Kementerian Keuangan	Lembaga Manajemen Aset Negara	WBK	2021
1174	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura	WBK	2021
1175	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram	WBK	2021
1176	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang	WBK	2021
1177	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan	WBK	2021
1178	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padangsidimpuan	WBK	2021
1179	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam	WBK	2021
1180	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin	WBK	2021
1181	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado	WBK	2021

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1182	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto	WBK	2021
1183	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo	WBK	2021
1184	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu	WBK	2021
1185	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi	WBK	2021
1186	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu	WBK	2021
1187	Kementerian Keuangan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang	WBK	2021
1188	Kementerian Keuangan	Sekretariat Badan	WBK	2021
1189	Kementerian Keuangan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan	WBK	2021
1190	Kementerian Keuangan	Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran	WBK	2021
1191	Kementerian Keuangan	Biro Sumber Daya Manusia	WBK	2021
1192	Kementerian Keuangan	Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan	WBK	2021
1193	Kementerian Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	WBK	2021
1194	Kementerian Keuangan	Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan	WBK	2021
1195	Kementerian Keuangan	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Cimahi	WBK	2021
1196	Kementerian Keuangan	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	WBBM	2023
1197	Kementerian Keuangan	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan	WBBM	2023
1198	Kementerian Keuangan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	WBBM	2023
1199	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten	WBBM	2023
1200	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali	WBBM	2023
1201	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta	WBBM	2023
1202	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	WBBM	2023
1203	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan	WBBM	2023
1204	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara	WBBM	2023
1205	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan	WBBM	2023
1206	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten	WBBM	2023
1207	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta	WBBM	2023

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1208	Kementerian Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau	WBBM	2023
1209	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Direktorat Operasi Sumber Daya	WBK	2019
1210	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi	WBK	2020
1211	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Direktorat Pos	WBK	2021
1212	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika	WBK	2021
1213	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	WBK	2020
1214	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	WBK	2021
1215	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	WBK	2020
1216	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Asdep Organisasi dan Badan Hukum Koperasi Pada Deputi Bidang Kelembagaan	WBK	2017
1217	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam	WBK	2020
1218	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta	WBK	2020
1219	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pusat Rencana dan Pengembangan SDM	WBK	2020
1220	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan	WBK	2020
1221	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera	WBK	2021
1222	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	WBK	2021
1223	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Balai Taman Nasional Boganinani Wartabone	WBK	2021
1224	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Konservasi Tanah dan Air (KTA)	WBK	2023
1225	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS)	WBK	2023
1226	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun (PLTTDLB3 dan NB3)	WBK	2023
1227	Kementerian Luar Negeri	KBRI Singapura	WBK	2017
1228	Kementerian Luar Negeri	Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia	WBK	2018
1229	Kementerian Luar Negeri	KBRI Seoul	WBBM	2019
1230	Kementerian Luar Negeri	KJRI di Hongkong	WBBM	2019
1231	Kementerian Luar Negeri	KJRI di Kota Kinabalu	WBBM	2019

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1232	Kementerian Luar Negeri	Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah	WBK	2019
1233	Kementerian Luar Negeri	Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching	WBK	2019
1234	Kementerian Luar Negeri	Konsulat Jenderal Republik Indonesia Osaka	WBK	2019
1235	Kementerian Luar Negeri	Museum Konferensi Asia Afrika	WBK	2019
1236	Kementerian Luar Negeri	Direktorat Fasilitas Diplomatik	WBK	2020
1237	Kementerian Luar Negeri	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	WBK	2020
1238	Kementerian Luar Negeri	Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney	WBBM	2021
1239	Kementerian Luar Negeri	Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok	WBK	2021
1240	Kementerian Luar Negeri	Konsulat Jenderal Republik Indonesia Frankfurt	WBK	2021
1241	Kementerian Luar Negeri	Konsulat Jenderal Republik Indonesia Davao City	WBK	2021
1242	Kementerian Luar Negeri	Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cape Town	WBK	2022
1243	Kementerian Luar Negeri	Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver, Kanada	WBK	2023
1244	Kementerian Luar Negeri	Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia	WBBM	2023
1245	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Biro Komunikasi Publik	WBK	2019
1246	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Direktorat Pemasaran Ekonomi Kreatif	WBK	2020
1247	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Direktorat Komunikasi Pemasaran	WBK	2020
1248	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Politeknik Pariwisata Medan	WBK	2020
1249	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Politeknik Pariwisata Makassar	WBK	2020
1250	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung	WBK	2020
1251	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Politeknik Pariwisata Bali	WBK	2022
1252	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	WBK	2022

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1253	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Balai Teknologi Air Minum	WBK	2020
1254	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta	WBK	2021
1255	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung	WBK	2021
1256	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	WBK	2022
1257	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Balai Sains Bangunan	WBK	2022
1258	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Balai Teknik Pantai	WBK	2023
1259	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	WBK	2023
1260	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	WBK	2022
1261	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Biro Hukip	WBK	2017
1262	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pusat Pengembangan PAUD dan PM Jawa Timur	WBK	2017
1263	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur	WBK	2018
1264	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri	WBK	2018
1265	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran	WBK	2019
1266	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	LPMP Bali	WBK	2019
1267	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	LPMP DKI Jakarta	WBK	2019
1268	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	LPMP Kalimantan Barat	WBK	2019
1269	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	LPMP Lampung	WBK	2019
1270	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	LPMP Riau	WBK	2019

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1271	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat	WBK	2019
1272	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah	WBK	2019
1273	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling	WBK	2019
1274	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pusat Penilaian Pendidikan	WBK	2019
1275	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	PPPPTK Bidang Bangunan dan Listrik	WBK	2020
1276	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	PPPPTK Bidang Bisnis dan Pariwisata	WBK	2020
1277	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Politeknik Negeri Bandung	WBK	2020
1278	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	WBK	2020
1279	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	LPMP Nusa Tenggara Barat	WBK	2020
1280	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	LPMP Jawa Barat	WBK	2020
1281	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta	WBK	2020
1282	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	PPPPTK Bidang Ilmu Pengetahuan Alam	WBK	2020
1283	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	PPPPTK Bidang Matematika	WBK	2020
1284	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	PPPPTK Bidang Seni dan Budaya	WBK	2020
1285	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	PPPPTK Bidang Pertanian	WBK	2020
1286	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali	WBK	2020
1287	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Museum Basoeki Abdullah	WBK	2020
1288	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta	WBK	2020
1289	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	WBK	2020

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1290	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	PPPPTK Bidang Otomotif dan Elektronika Malang	WBBM	2020
1291	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah	WBBM	2020
1292	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI	WBK	2021
1293	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Fakultas Teknik-Universitas Diponegoro	WBK	2021
1294	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Galeri Nasional Indonesia	WBK	2021
1295	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta	WBK	2021
1296	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Politeknik Manufaktur Bandung	WBK	2021
1297	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Politeknik Negeri Batam	WBK	2021
1298	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Balai Arkeologi Daerah Istimewa Yogyakarta	WBK	2021
1299	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	LPMP Provinsi Jambi	WBK	2021
1300	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	LPMP Banten	WBK	2021
1301	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan	WBK	2021
1302	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Fakultas Teknik-Universitas Gadjah Mada	WBK	2021
1303	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	BP PAUD dan DIKMAS Sulawesi Selatan	WBK	2021
1304	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Fakultas Teknologi Pertanian-Universitas Brawijaya	WBK	2021
1305	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Direktorat SMA	WBK	2021
1306	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Padjadjaran	WBK	2021
1307	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Fakultas Kesehatan Masyarakat-Universitas Indonesia	WBK	2021
1308	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Biro Sumber Daya Manusia	WBK	2021

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1309	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	WBK	2022
1310	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Balai Bahasa Provinsi Bali	WBK	2022
1311	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Universitas Sumatera Utara, Fakultas Keperawatan	WBK	2022
1312	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	WBK	2023
1313	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V	WBK	2023
1314	Kementerian Perdagangan	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia	WBK	2020
1315	Kementerian Perdagangan	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	WBK	2020
1316	Kementerian Perdagangan	Direktorat Metrologi	WBK	2020
1317	Kementerian Perdagangan	Pusat Pendidikan Sumber Daya Kemetrolgian	WBK	2021
1318	Kementerian Perdagangan	Indonesia Trade Promotion Center Osaka	WBK	2021
1319	Kementerian Perdagangan	Indonesia Trade Promotion Center Milan	WBK	2021
1320	Kementerian Perdagangan	Direktorat Perundingan Multilateral	WBK	2021
1321	Kementerian Perdagangan	Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional III	WBK	2021
1322	Kementerian Perdagangan	Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional II	WBK	2021
1323	Kementerian Perdagangan	Balai Sertifikasi	WBK	2021
1324	Kementerian Perdagangan	Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional I	WBK	2022
1325	Kementerian Perdagangan	Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional IV	WBK	2022
1326	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana	WBK	2020
1327	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	WBK	2022
1328	Kementerian Perhubungan	Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok	WBBM	2019
1329	Kementerian Perhubungan	Balai Kesehatan Kerja Pelayaran	WBK	2019
1330	Kementerian Perhubungan	Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi	WBK	2019
1331	Kementerian Perhubungan	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	WBK	2019
1332	Kementerian Perhubungan	Distrik Navigasi Kelas I Surabaya	WBK	2019
1333	Kementerian Perhubungan	Kantor UPBU Kalimantan Berau	WBK	2019
1334	Kementerian Perhubungan	Otoritas Pelabuhan Utama Belawan	WBK	2019

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1335	Kementerian Perhubungan	Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak	WBK	2019
1336	Kementerian Perhubungan	Politeknik Pelayaran Malahayati	WBK	2019
1337	Kementerian Perhubungan	Politeknik Pelayaran Surabaya	WBK	2019
1338	Kementerian Perhubungan	Satuan Pelayanan UPPKB Cekik - BPTD Wil. XII Provinsi Bali dan NTB	WBK	2020
1339	Kementerian Perhubungan	Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Ir Soekarno - BPTD Wil. X Provinsi Jawa Tengah dan DIY	WBK	2020
1340	Kementerian Perhubungan	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran	WBK	2020
1341	Kementerian Perhubungan	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	WBK	2020
1342	Kementerian Perhubungan	Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta	WBK	2020
1343	Kementerian Perhubungan	Politeknik Penerbangan Medan	WBK	2020
1344	Kementerian Perhubungan	Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan Kelas II Gresik	WBK	2020
1345	Kementerian Perhubungan	Distrik Navigasi Kelas I Makassar	WBK	2020
1346	Kementerian Perhubungan	Direktorat Angkutan Udara	WBK	2020
1347	Kementerian Perhubungan	Direktorat Navigasi Penerbangan	WBK	2020
1348	Kementerian Perhubungan	Otoritas Bandar Udara Wilayah VII - Balikpapan	WBK	2020
1349	Kementerian Perhubungan	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan	WBK	2020
1350	Kementerian Perhubungan	Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang	WBBM	2021
1351	Kementerian Perhubungan	Otoritas Bandar Udara Wilayah III - Surabaya	WBBM	2021
1352	Kementerian Perhubungan	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Bali	WBBM	2021
1353	Kementerian Perhubungan	Balai Kesehatan Penerbangan	WBBM	2021
1354	Kementerian Perhubungan	Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Baranangsiang	WBK	2021
1355	Kementerian Perhubungan	Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Jatijajar	WBK	2021
1356	Kementerian Perhubungan	Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	WBK	2021
1357	Kementerian Perhubungan	Balai Pengujian Perkeretaapian	WBK	2021
1358	Kementerian Perhubungan	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado	WBK	2021
1359	Kementerian Perhubungan	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan	WBK	2021
1360	Kementerian Perhubungan	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Tangerang	WBK	2021
1361	Kementerian Perhubungan	Distrik Navigasi Kelas I Dumai	WBK	2021
1362	Kementerian Perhubungan	Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok	WBK	2021
1363	Kementerian Perhubungan	Distrik Navigasi Kelas I Belawan	WBK	2021
1364	Kementerian Perhubungan	Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak	WBK	2021

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1365	Kementerian Perhubungan	Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Tirtanadi-BPTD Wil. X Provinsi Jawa Tengah dan DIY	WBK	2021
1366	Kementerian Perhubungan	Direktorat Sarana Transportasi Jalan	WBK	2021
1367	Kementerian Perhubungan	Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Guntur Melati Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Provinsi Jawa Barat	WBK	2022
1368	Kementerian Perhubungan	Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar	WBK	2022
1369	Kementerian Perhubungan	Politeknik Transportasi Darat Bali	WBK	2022
1370	Kementerian Perindustrian	BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN MAKASSAR	WBK	2018
1371	Kementerian Perindustrian	Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta	WBK	2018
1372	Kementerian Perindustrian	Balai Besar Kimia dan Kemasan Jakarta	WBK	2018
1373	Kementerian Perindustrian	Balai Diklat Industri Padang	WBK	2018
1374	Kementerian Perindustrian	Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya	WBK	2018
1375	Kementerian Perindustrian	SMK Sekolah Menengah Teknologi Industri Padang	WBBM	2019
1376	Kementerian Perindustrian	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Bandung	WBK	2019
1377	Kementerian Perindustrian	Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak	WBK	2019
1378	Kementerian Perindustrian	Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik Yogyakarta	WBK	2020
1379	Kementerian Perindustrian	Balai Besar Tekstil Bandung	WBK	2020
1380	Kementerian Perindustrian	Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru	WBK	2020
1381	Kementerian Perindustrian	Baristand Industri Padang	WBK	2020
1382	Kementerian Perindustrian	Politeknik ATI Padang	WBK	2020
1383	Kementerian Perindustrian	Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang	WBBM	2020
1384	Kementerian Perindustrian	Baristand Industri Surabaya	WBBM	2020
1385	Kementerian Perindustrian	SMK-Sekolah Menengah Analisis Kimia Bogor	WBBM	2020
1386	Kementerian Perindustrian	SMK-Sekolah Menengah Analisis Kimia Padang	WBBM	2020
1387	Kementerian Perindustrian	Balai Riset Standardisasi Industri Samarinda	WBBM	2021
1388	Kementerian Perindustrian	SMK-Sekolah Menengah Teknologi Industri Yogyakarta	WBBM	2021
1389	Kementerian Perindustrian	Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Sidoarjo	WBBM	2021
1390	Kementerian Perindustrian	SMK-Sekolah Menengah Teknologi Industri Pontianak	WBBM	2021
1391	Kementerian Perindustrian	Balai Besar Industri Agro Bogor	WBK	2021
1392	Kementerian Perindustrian	Balai Besar Logam dan Mesin Bandung	WBK	2021
1393	Kementerian Perindustrian	Balai Diklat Industri Yogyakarta	WBK	2021
1394	Kementerian Perindustrian	Balai Diklat Industri Jakarta	WBK	2021

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1395	Kementerian Perindustrian	SMK-Sekolah Menengah Teknologi Industri Bandar Lampung	WBK	2021
1396	Kementerian Perindustrian	Balai Diklat Industri Denpasar	WBK	2021
1397	Kementerian Perindustrian	Politeknik Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung	WBBM	2022
1398	Kementerian Perindustrian	Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Non Logam	WBK	2022
1399	Kementerian Perindustrian	Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru	WBK	2022
1400	Kementerian Perindustrian	SMK-Sekolah Menengah Analisis Kimia Makassar	WBK	2022
1401	Kementerian Perindustrian	Balai Diklat Industri Makassar	WBK	2022
1402	Kementerian Perindustrian	SMK-Sekolah Menengah Teknologi Industri Makassar	WBK	2022
1403	Kementerian Perindustrian	Politeknik STMI Jakarta	WBK	2023
1404	Kementerian Perindustrian	Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta	WBK	2023
1405	Kementerian Perindustrian	Politeknik ATI Makassar	WBK	2023
1406	Kementerian Pertahanan	Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan	WBK	2019
1407	Kementerian Pertahanan	Ditkes Ditjen Kuathan Kemhan	WBK	2021
1408	Kementerian Pertahanan	Pusbahasa Badiklat Kemhan	WBK	2021
1409	Kementerian Pertahanan	Biro Humas Setjen Kemhan	WBK	2021
1410	Kementerian Pertahanan	Dittekindhan Ditjen Pothan Kemhan	WBK	2022
1411	Kementerian Pertahanan	Pusat Kodifikasi Baranahan Kementerian Pertahanan	WBK	2023
1412	Kementerian Pertanian	balai besar pelatihan pertanian bangkaluku, sulawesi selatan	WBK	2017
1413	Kementerian Pertanian	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, Bogor	WBK	2017
1414	Kementerian Pertanian	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	WBBM	2018
1415	Kementerian Pertanian	Balai Besar Karantina Pertanian Makassar	WBK	2018
1416	Kementerian Pertanian	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya	WBK	2018
1417	Kementerian Pertanian	Balai Besar Veteriner Denpasar	WBK	2018
1418	Kementerian Pertanian	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturraden	WBK	2019
1419	Kementerian Pertanian	Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang	WBK	2019
1420	Kementerian Pertanian	Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas I Lampung	WBK	2019
1421	Kementerian Pertanian	Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas) Malang	WBK	2019
1422	Kementerian Pertanian	Balai Besar Karantina Pertanian Belawan	WBK	2020
1423	Kementerian Pertanian	Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta	WBK	2020
1424	Kementerian Pertanian	Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya	WBK	2020

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1425	Kementerian Pertanian	Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok	WBK	2020
1426	Kementerian Pertanian	Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang	WBK	2020
1427	Kementerian Pertanian	Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan	WBK	2020
1428	Kementerian Pertanian	Pusat Veteriner Farma, Surabaya	WBK	2020
1429	Kementerian Pertanian	Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta	WBBM	2020
1430	Kementerian Pertanian	Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar	WBK	2021
1431	Kementerian Pertanian	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPM SOH) Gunung Sindur	WBK	2021
1432	Kementerian Pertanian	Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balitro)	WBK	2021
1433	Kementerian Pertanian	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Mataram	WBK	2021
1434	Kementerian Pertanian	Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates Yogyakarta	WBK	2021
1435	Kementerian Pertanian	Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang	WBBM	2022
1436	Kementerian Pertanian	Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas II Gorontalo	WBK	2022
1437	Kementerian Pertanian	Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak	WBK	2022
1438	Kementerian Sekretariat Negara	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara	WBK	2019
1439	Kementerian Sekretariat Negara	Biro Sumber Daya Manusia	WBK	2020
1440	Kementerian Sekretariat Negara	Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Sekretariat Kementerian	WBK	2021
1441	Kementerian Sekretariat Negara	Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat, Deputi Bidang Hublemmas	WBK	2021
1442	Kementerian Sekretariat Negara	Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan, Deputi Bidang Administrasi Aparatur	WBK	2022
1443	Kementerian Sosial	Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) "Antasena" Magelang	WBK	2014
1444	Kementerian Sosial	Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	WBK	2017
1445	Kementerian Sosial	Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung	WBK	2018
1446	Kementerian Sosial	Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BBRSPDF) Prof. DR. Soeharso Surakarta	WBK	2019
1447	Kementerian Sosial	Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual (BBRSPDI) Kartini Temanggung	WBK	2019
1448	Kementerian Sosial	Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDN) Tan Miyat Bekasi	WBK	2021
1449	Kementerian Sosial	Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar	WBK	2021

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1450	Kementerian Sosial	Sentra Budi Perkasa di Palembang	WBK	2023
1451	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Kabupaten Jember	WBK	2016
1452	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Gresik	WBBM	2017
1453	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Jember	WBBM	2017
1454	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polresta Sidoarjo	WBBM	2017
1455	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Balikpapan	WBK	2017
1456	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	WBK	2017
1457	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Serang	WBK	2017
1458	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polresta Banjarmasin	WBK	2017
1459	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polresta Padang	WBK	2017
1460	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polresta Pekanbaru	WBK	2017
1461	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Kota Besar Medan	WBBM	2018
1462	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	WBBM	2018
1463	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Direktorat Intelijen Keamanan Polisi Daerah Jambi	WBK	2018
1464	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Jambi	WBK	2018
1465	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Kalimantan Selatan	WBK	2018
1466	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Asahan	WBK	2018
1467	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Banjar	WBK	2018
1468	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Banjar Baru	WBK	2018
1469	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Banjarnegara	WBK	2018
1470	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Banyumas	WBK	2018
1471	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Banyuwangi	WBK	2018
1472	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Batu	WBK	2018
1473	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Bengkalis	WBK	2018
1474	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Bitung	WBK	2018
1475	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Bukit Tinggi	WBK	2018
1476	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Cirebon	WBK	2018
1477	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Halmahera Utara	WBK	2018
1478	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara	WBK	2018

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1479	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Indramayu	WBK	2018
1480	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Jayapura	WBK	2018
1481	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Jepara	WBK	2018
1482	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Kendal	WBK	2018
1483	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Kendari	WBK	2018
1484	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Kota Bareleng	WBK	2018
1485	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Kota Palembang	WBK	2018
1486	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Kota Pontianak	WBK	2018
1487	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Kota Samarinda	WBK	2018
1488	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Kota Waringin Timur	WBK	2018
1489	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Kutai Kartanegara	WBK	2018
1490	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Magelang	WBK	2018
1491	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Manokwari	WBK	2018
1492	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Mojokerto Kota	WBK	2018
1493	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu	WBK	2018
1494	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Pangkal Pinang	WBK	2018
1495	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Prabumulih	WBK	2018
1496	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Seluma	WBK	2018
1497	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Singkawang	WBK	2018
1498	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Situbondo	WBK	2018
1499	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Tabalong	WBK	2018
1500	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Tanah Bumbu	WBK	2018
1501	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Tanah Datar	WBK	2018
1502	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Tanah Karo	WBK	2018
1503	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Tanah Laut	WBK	2018
1504	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Tapanuli Selatan	WBK	2018
1505	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Ternate	WBK	2018
1506	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Trenggalek	WBK	2018

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1507	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Tuban	WBK	2018
1508	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Lamongan	WBBM	2019
1509	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Malang	WBBM	2019
1510	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota	WBBM	2019
1511	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Mojokerto	WBBM	2019
1512	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Solok Kota	WBBM	2019
1513	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Biro SDM Polda DIY	WBK	2019
1514	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Biro SDM Polda Jawa Tengah	WBK	2019
1515	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Biro SDM Polda Kalimantan Timur	WBK	2019
1516	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Ditintelkam Polda Kalimantan Tengah	WBK	2019
1517	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Ditlantas Polda Kalimantan Tengah	WBK	2019
1518	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Bangka Tengah	WBK	2019
1519	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Bangkalan	WBK	2019
1520	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Barito Kuala	WBK	2019
1521	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Blitar Kota	WBK	2019
1522	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Bontang	WBK	2019
1523	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Cilacap	WBK	2019
1524	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Deli Serdang	WBK	2019
1525	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Gianyar	WBK	2019
1526	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan	WBK	2019
1527	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah	WBK	2019
1528	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Jombang	WBK	2019
1529	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Kediri	WBK	2019
1530	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Kota Manado	WBK	2019
1531	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Kotabaru	WBK	2019
1532	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Langkat	WBK	2019
1533	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Madiun	WBK	2019
1534	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Mempawah	WBK	2019

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1535	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Minahasa Selatan	WBK	2019
1536	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Muara Enim	WBK	2019
1537	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Sambas	WBK	2019
1538	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Semarang	WBK	2019
1539	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Sumedang	WBK	2019
1540	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Tabanan	WBK	2019
1541	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Tana Toraja	WBK	2019
1542	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Ditreskrimum Polda Bali	WBK	2020
1543	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Akpol Lemdiklat Polri	WBK	2020
1544	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Diklat Reserse Lemdiklat Polri	WBK	2020
1545	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Pacitan	WBK	2020
1546	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Bau-Bau	WBK	2020
1547	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Majalengka	WBK	2020
1548	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Ditintelkam Polda Jawa Tengah	WBK	2020
1549	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Ditintelkam Polda DIY	WBK	2020
1550	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Kaimana	WBK	2020
1551	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Kudus	WBK	2020
1552	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Ditlantas Polda Jawa Timur	WBK	2020
1553	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Ogan Komering Ulu Timur	WBK	2020
1554	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Tegal Kota	WBK	2020
1556	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Palangkaraya	WBK	2020
1557	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Penajam Paser Utara	WBK	2020
1558	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Ditbinmas Polda DIY	WBK	2020
1559	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Tanjung Jabung Barat	WBK	2020
1560	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Lhokseumawe	WBK	2020
1561	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Pamekasan	WBK	2020
1562	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Biro SDM Polda Aceh	WBK	2020
1563	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Ogan Komering Ilir	WBK	2020

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1564	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Boyolali	WBK	2020
1565	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Wonogiri	WBK	2020
1566	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Biro SDM Polda Sumatera Utara	WBK	2020
1567	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rumkit Bhayangkara Polda DIY	WBK	2020
1568	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Ditlantas Polda Jawa Tengah	WBK	2020
1569	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Bondowoso	WBK	2020
1570	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Buleleng	WBK	2020
1571	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Magelang Kota	WBK	2020
1572	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Musi Banyuasin	WBK	2020
1573	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Payakumbuh	WBK	2020
1574	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Tapin	WBK	2020
1575	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polresta Yogyakarta	WBK	2020
1576	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Purworejo	WBK	2020
1577	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Ditlantas Polda DIY	WBBM	2020
1578	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Malang Kota	WBBM	2020
1579	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah	WBBM	2020
1580	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Sleman	WBBM	2020
1581	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Bojonegoro	WBBM	2020
1582	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak	WBBM	2020
1583	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Gowa	WBBM	2020
1584	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan	WBBM	2020
1585	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah DIY	WBBM	2021
1586	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Kota Waringin Barat	WBBM	2021
1587	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Banyuasin	WBBM	2021
1588	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Ditpidkor Bareskrim Polri	WBBM	2021
1589	Kepolisian Negara Republik Indonesia	POLRES SUMBAWA BARAT	WBK	2021
1590	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Biro SDM Polda Kalimantan Selatan	WBK	2021
1591	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Ditintelkam Polda Bali	WBK	2021

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1592	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Pasuruan Kota	WBK	2021
1593	Kepolisian Negara Republik Indonesia	DITRESNARKOBA POLDA NTB	WBK	2021
1594	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Ditintelkam Polda NTB	WBK	2021
1595	Kepolisian Negara Republik Indonesia	YANMA POLDA DIY	WBK	2021
1596	Kepolisian Negara Republik Indonesia	SPN POLDA DIY	WBK	2021
1597	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Pati	WBK	2021
1598	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Purbalingga	WBK	2021
1599	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Ditintelkam Polda Sumsel	WBK	2021
1600	Kepolisian Negara Republik Indonesia	DITSAMAPTA POLDA KALIMANTAN SELATAN	WBK	2021
1601	Kepolisian Negara Republik Indonesia	BIDKUM POLDA JAWA TIMUR	WBK	2021
1602	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Lubuk Linggau	WBK	2021
1603	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Ditreskrimum Polda Kalteng	WBK	2021
1604	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Pulang Pisau	WBK	2021
1605	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Balangan	WBK	2021
1606	Kepolisian Negara Republik Indonesia	DITRESKRIMSUS POLDA JATIM	WBK	2021
1607	Kepolisian Negara Republik Indonesia	POLRES SERUYAN	WBK	2021
1608	Kepolisian Negara Republik Indonesia	RUMKIT BHAYANGKARA PALANGKARAYA POLDA KALTENG	WBK	2021
1609	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Cilegon	WBK	2021
1610	Kepolisian Negara Republik Indonesia	POLRES MERANGIN	WBK	2021
1611	Kepolisian Negara Republik Indonesia	DITRESKRIMUM POLDA KEPULAUAN RIAU	WBK	2021
1612	Kepolisian Negara Republik Indonesia	DITINTELKAM POLDA KEPULAUAN RIAU	WBK	2021
1613	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Biro SDM Polda Kalteng	WBK	2021
1614	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Belitung Timur	WBK	2021
1615	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Agam	WBK	2021
1616	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Divpropam Polri	WBK	2021
1617	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Srena Polri	WBK	2021
1618	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Ditpolairud Polda Sumbar	WBK	2021
1619	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Labuhan Batu	WBK	2021

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1620	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Puskeu Polri	WBK	2021
1621	Kepolisian Negara Republik Indonesia	SSDM Polri	WBK	2021
1622	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Bantul	WBK	2021
1623	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Pulau Buru	WBK	2021
1624	Kepolisian Negara Republik Indonesia	RUMKIT BHAYANGKARA PALEMBANG	WBK	2021
1625	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Resor Barito Selatan	WBBM	2022
1626	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Kulon Progo	WBBM	2022
1627	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Biro SDM Polda Sulsel	WBK	2022
1628	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Biro SDM Polda Sumatera Selatan	WBBM	2023
1629	Komisi Pemilihan Umum	KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	WBK	2022
1630	Lembaga Administrasi Negara	Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LAN Samarinda	WBK	2017
1631	Lembaga Administrasi Negara	Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara	WBK	2019
1632	Lembaga Administrasi Negara	Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara	WBK	2020
1633	Lembaga Administrasi Negara	Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	WBK	2020
1634	Lembaga Administrasi Negara	Politeknik STIA LAN Makassar	WBK	2020
1635	Lembaga Administrasi Negara	Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara	WBK	2021
1636	Lembaga Administrasi Negara	Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	WBK	2023
1637	Lembaga Administrasi Negara	Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan	WBBM	2023
1638	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI bogor	WBBM	2017
1639	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI purwodadi	WBBM	2017
1640	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik LIPI	WBK	2017
1641	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	BALAI MEDIA DAN REPRODUKSI (LIPI PRESS)	WBK	2019
1642	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	WBK	2020

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1643	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	WBK	2022
1644	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Direktorat Sertifikasi Profesi	WBK	2022
1645	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Pusat Sains Antariksa	WBK	2018
1646	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer	WBK	2018
1647	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Pusat Teknologi Penerbangan	WBK	2020
1648	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh	WBK	2020
1649	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare	WBK	2020
1650	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh	WBBM	2020
1651	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Kantor Pengadilan Agama Surabaya	WBK	2018
1652	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Kantor Pengadilan Militer II-08 Jakarta	WBK	2018
1653	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	WBK	2018
1654	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang - Batam	WBK	2018
1655	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Kantor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	WBK	2018
1656	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Kantor Pengadilan Tinggi Jawa Barat	WBK	2018
1657	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang	WBK	2019
1658	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Bandung	WBK	2019
1659	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Banjarbaru	WBK	2019
1660	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Banjarmasin	WBK	2019
1661	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Batam	WBK	2019
1662	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Bekasi	WBK	2019
1663	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Blitar	WBK	2019
1664	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Gorontalo	WBK	2019
1665	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Indramayu	WBK	2019
1666	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Jakarta Timur	WBK	2019
1667	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Jambi	WBK	2019
1668	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	WBK	2019
1669	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Lamongan	WBK	2019

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1670	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Makassar	WBK	2019
1671	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Martapura	WBK	2019
1672	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Mojokerto	WBK	2019
1673	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Pekanbaru	WBK	2019
1674	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Semarang	WBK	2019
1675	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Sumbawa Besar	WBK	2019
1676	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Sungguminasa	WBK	2019
1677	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Tangerang	WBK	2019
1678	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Militer III-12 Surabaya	WBK	2019
1679	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Militer Tinggi I Medan	WBK	2019
1680	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	WBK	2019
1681	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Bandung	WBK	2019
1682	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Bekasi	WBK	2019
1683	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Gianyar	WBK	2019
1684	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Gorontalo	WBK	2019
1685	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Indramayu	WBK	2019
1686	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Kediri	WBK	2019
1687	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Martapura	WBK	2019
1688	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Mojokerto	WBK	2019
1689	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Muara Enim	WBK	2019
1690	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Oelamasi	WBK	2019
1691	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Pangkal Pinang	WBK	2019
1692	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Pekanbaru	WBK	2019
1693	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Sampit	WBK	2019
1694	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Surabaya	WBK	2019
1695	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Surakarta	WBK	2019
1696	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Tangerang	WBK	2019
1697	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Yogyakarta	WBK	2019

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1698	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin	WBK	2019
1699	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	WBK	2019
1700	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya	WBK	2019
1701	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Ambon	WBK	2019
1702	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	WBK	2019
1703	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	WBK	2019
1704	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Denpasar	WBK	2019
1705	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Medan	WBK	2019
1706	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	WBK	2019
1707	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	WBK	2019
1708	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Wonosari	WBK	2020
1709	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Tasikmalaya	WBK	2020
1710	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Temanggung	WBK	2020
1711	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Tigaraksa	WBK	2020
1712	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Pemalang	WBK	2020
1713	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Tulungagung	WBK	2020
1714	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Pati	WBK	2020
1715	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Militer I-02 Medan	WBK	2020
1716	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Marabahan	WBK	2020
1717	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Jember	WBK	2020
1718	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Kendari	WBK	2020
1719	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Wonosobo	WBK	2020
1720	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Jambi	WBK	2020
1721	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Pasir Pangaraian	WBK	2020
1722	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Sentani	WBK	2020
1723	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Praya	WBK	2020
1724	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Agama Palu	WBK	2020
1725	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	WBK	2020

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1726	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Ketapang	WBK	2020
1727	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Pontianak	WBK	2020
1728	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Kefamenanu	WBK	2020
1729	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama negara banjarmasin	WBK	2020
1730	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	WBK	2020
1731	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Kota Madya Malang	WBK	2020
1732	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Kota Banjar	WBK	2020
1733	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Tenggaraong	WBK	2020
1734	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Agama Semarang	WBK	2020
1735	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Sawah Lunto	WBK	2020
1736	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Kolaka	WBK	2020
1737	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Kolaka	WBK	2020
1738	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Agama Mataram	WBK	2020
1739	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Surabaya	WBK	2020
1740	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	WBK	2020
1741	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Bangli	WBK	2020
1742	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Raba/Bima	WBK	2020
1743	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Militer III-17 Manado	WBK	2020
1744	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Tarakan	WBK	2020
1745	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Tanjung Redeb	WBK	2020
1746	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Bale Bandung	WBK	2020
1747	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Bangil	WBK	2020
1748	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Banyuwangi	WBK	2020
1749	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Sumenep	WBK	2020
1750	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Jakarta Utara	WBK	2020
1751	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	WBK	2020
1752	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Lumajang	WBK	2020
1753	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Maros	WBK	2020

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1754	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Tanggamus	WBK	2020
1755	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Militer I-05 Pontianak	WBK	2020
1756	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Jakarta Barat	WBK	2020
1757	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Barabai	WBK	2020
1758	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Purwakarta	WBK	2020
1759	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Praya	WBK	2020
1760	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Tanjung	WBK	2020
1761	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Ujung Tanjung	WBK	2020
1762	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Militer II-10 Semarang	WBK	2020
1763	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Tanah Grogot	WBK	2020
1764	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Pasuruan	WBK	2020
1765	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Luwuk	WBK	2020
1766	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	WBK	2020
1767	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	WBK	2020
1768	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Wonosari	WBK	2020
1769	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Bogor	WBK	2020
1770	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Tulang Bawang	WBK	2020
1771	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Malang	WBK	2020
1772	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tata Usaha Negara Manado	WBK	2020
1773	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Buol	WBK	2020
1774	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Nunukan	WBK	2020
1775	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Dabo Singkep	WBK	2020
1776	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Palu	WBK	2020
1777	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Banjarnegara	WBK	2020
1778	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Sungai Liat	WBK	2020
1779	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Pare-Pare	WBK	2020
1780	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Karawang	WBK	2020
1781	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Pelaihari	WBK	2020

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1782	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	WBK	2020
1783	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Masamba	WBK	2020
1784	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Majalengka	WBK	2020
1785	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Solok	WBK	2020
1786	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Agama Makassar	WBK	2020
1787	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Denpasar	WBK	2020
1788	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Singkawang	WBK	2020
1789	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Militer Utama	WBBM	2020
1790	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin	WBBM	2020
1791	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Semarang	WBBM	2020
1792	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	WBBM	2020
1793	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Wates	WBBM	2020
1794	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Militer III-13 Madiun	WBBM	2020
1795	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri Bogor	WBBM	2020
1796	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	WBBM	2020
1797	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	WBBM	2020
1798	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Agama ambon	WBBM	2021
1799	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama	WBBM	2021
1800	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	WBBM	2021
1801	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	WBBM	2021
1802	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	WBBM	2021
1803	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama sampit	WBK	2021
1804	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama yogyakarta	WBK	2021
1805	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama serang	WBK	2021
1806	Mahkamah Agung Republik Indonesia	PENGADILAN NEGERI BANTAENG	WBK	2021
1807	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri bantul	WBK	2021
1808	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Agama padang	WBK	2021
1809	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama maros	WBK	2021

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1810	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Agama bengkulu	WBK	2021
1811	Mahkamah Agung Republik Indonesia	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR	WBK	2021
1812	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama sumber	WBK	2021
1813	Mahkamah Agung Republik Indonesia	PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	WBK	2021
1814	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama purwodadi	WBK	2021
1815	Mahkamah Agung Republik Indonesia	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	WBK	2021
1816	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama situbondo	WBK	2021
1817	Mahkamah Agung Republik Indonesia	PENGADILAN AGAMA NGAWI	WBK	2021
1818	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama tual	WBK	2021
1819	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri klaten	WBK	2021
1820	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama muna-raha	WBK	2021
1821	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri amuntai	WBK	2021
1822	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri rote ndao	WBK	2021
1823	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri kalianda	WBK	2021
1824	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Agama surabaya	WBK	2021
1825	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama sarolangun	WBK	2021
1826	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri sintang	WBK	2021
1827	Mahkamah Agung Republik Indonesia	PENGADILAN NEGERI SUKADANA	WBK	2021
1828	Mahkamah Agung Republik Indonesia	PENGADILAN AGAMA CILACAP	WBK	2021
1829	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama selat panjang	WBK	2021
1830	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri raha	WBK	2021
1831	Mahkamah Agung Republik Indonesia	PENGADILAN AGAMA KARANG ASEM	WBK	2021
1832	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Militer III-18 Ambon	WBK	2021
1833	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri pangkalan bun	WBK	2021
1834	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama muara bungo	WBK	2021
1835	Mahkamah Agung Republik Indonesia	PENGADILAN AGAMA KANDANGAN	WBK	2021
1836	Mahkamah Agung Republik Indonesia	PENGADILAN NEGERI TANJUNG	WBK	2021
1837	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Agama bandar lampung	WBK	2021

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1838	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	WBK	2021
1839	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama kebumen	WBK	2021
1840	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Negeri karanganyar	WBK	2021
1841	Mahkamah Agung Republik Indonesia	PENGADILAN AGAMA TABANAN	WBK	2021
1842	Mahkamah Agung Republik Indonesia	PENGADILAN NEGERI KOTABARU	WBK	2021
1843	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama kendal	WBK	2021
1844	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Toli-Toli	WBK	2021
1845	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama kabanjahe	WBK	2021
1846	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	WBBM	2022
1847	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	WBK	2022
1848	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Agama Kendari	WBK	2022
1849	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Tinggi Agama Medan	WBK	2022
1850	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Mimika	WBK	2022
1851	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Unaaha	WBK	2022
1852	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Agama Magelang	WBBM	2023
1853	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	WBK	2020
1854	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	Pusat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	WBK	2021
1855	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	WBK	2022
1856	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka)	WBK	2023
1857	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Rumah Sakit Paru Respira Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	WBK	2017
1858	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman	WBK	2020
1859	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan DIY	WBK	2020
1860	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial pada Dinas Kesehatan DIY	WBK	2020
1861	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta	WBBM	2021
1862	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo	WBK	2021
1863	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta	WBK	2021

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1864	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Badan Kepegawaian Daerah DIY	WBK	2021
1865	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Balai Layanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	WBK	2021
1866	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial UPT Dinas Kesehatan Provinsi DIY	WBBM	2023
1867	Pemerintah Kabupaten Badung	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada Kabupaten Badung	WBK	2017
1868	Pemerintah Kabupaten Badung	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Badung	WBK	2019
1869	Pemerintah Kabupaten Badung	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	WBK	2020
1870	Pemerintah Kabupaten Badung	UPTD Puskesmas Mengwi I	WBK	2022
1871	Pemerintah Kabupaten Badung	Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung	WBK	2023
1872	Pemerintah Kabupaten Bandung	Puskesmas Ciparay DTP Kabupaten Bandung	WBK	2023
1873	Pemerintah Kabupaten Banggai	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda	WBK	2020
1874	Pemerintah Kabupaten Bangka	Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin	WBK	2021
1875	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara	WBK	2020
1876	Pemerintah Kabupaten Bantul	Dinas Perijinan Kabupaten Bantul	WBK	2016
1877	Pemerintah Kabupaten Bantul	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	WBBM	2020
1878	Pemerintah Kabupaten Bantul	Kapanewon Pundong	WBK	2021
1879	Pemerintah Kabupaten Banyuasin	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin	WBK	2019
1880	Pemerintah Kabupaten Banyumas	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banyumas	WBK	2019
1881	Pemerintah Kabupaten Banyumas	RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas	WBK	2020
1882	Pemerintah Kabupaten Banyumas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil)	WBK	2021
1883	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi	WBK	2020
1884	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Puskesmas Sempu Kecamatan Sempu	WBK	2021
1885	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	WBK	2023
1886	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	UPTD Puskesmas Sempu Kabupaten Banyuwangi	WBBM	2023
1887	Pemerintah Kabupaten Batang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang	WBK	2020
1888	Pemerintah Kabupaten Belitung	UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung	WBK	2021

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1889	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Dinas Perhubungan	WBK	2021
1890	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	WBK	2021
1891	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro	WBK	2022
1892	Pemerintah Kabupaten Boyolali	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Boyolali	WBK	2019
1893	Pemerintah Kabupaten Boyolali	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali	WBK	2022
1894	Pemerintah Kabupaten Buleleng	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng	WBK	2020
1895	Pemerintah Kabupaten Cilacap	Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap	WBK	2020
1896	Pemerintah Kabupaten Cilacap	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap	WBK	2020
1897	Pemerintah Kabupaten Cilacap	Puskesmas Dayeuhluhur II	WBK	2021
1898	Pemerintah Kabupaten Demak	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak	WBK	2020
1899	Pemerintah Kabupaten Gresik	Kecamatan Gresik	WBK	2018
1900	Pemerintah Kabupaten Gresik	Kecamatan Sangkapura	WBK	2018
1901	Pemerintah Kabupaten Grobogan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan	WBK	2020
1902	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	WBK	2020
1903	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	WBK	2021
1904	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	WBK	2020
1905	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	WBK	2022
1906	Pemerintah Kabupaten Jepara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara	WBK	2020
1907	Pemerintah Kabupaten Jombang	Puskesmas Cukir	WBK	2021
1908	Pemerintah Kabupaten Jombang	Puskesmas Bareng	WBK	2022
1909	Pemerintah Kabupaten Kebumen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	WBK	2022
1910	Pemerintah Kabupaten Kediri	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	WBK	2022
1911	Pemerintah Kabupaten Kendal	RSUD dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	WBK	2020
1912	Pemerintah Kabupaten Klungkung	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung	WBK	2021

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1913	Pemerintah Kabupaten Klungkung	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung	WBK	2023
1914	Pemerintah Kabupaten Klungkung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung	WBK	2023
1915	Pemerintah Kabupaten Klungkung	UPTD. Puskesmas Banjarangkan I Kabupaten Klungkung	WBK	2023
1916	Pemerintah Kabupaten Kudus	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmonohadi Kabupaten Kudus	WBK	2017
1917	Pemerintah Kabupaten Kudus	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus	WBK	2020
1918	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo	WBK	2017
1919	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kabupaten Kulon Progo	WBK	2017
1920	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo	WBK	2023
1921	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	RSUD A.M. Parikesit	WBK	2016
1922	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara	WBK	2017
1923	Pemerintah Kabupaten Lamongan	Kecamatan Lamongan	WBK	2018
1924	Pemerintah Kabupaten Lamongan	PUSKESMAS KALITENGAH	WBK	2019
1925	Pemerintah Kabupaten Lamongan	Puskesmas Laren	WBK	2019
1926	Pemerintah Kabupaten Lamongan	PUSKESMAS MANTUP	WBK	2019
1927	Pemerintah Kabupaten Lamongan	Puskesmas Sekaran Kabupaten Lamongan	WBK	2020
1928	Pemerintah Kabupaten Lamongan	Puskesmas Brondong Kabupaten Lamongan	WBK	2020
1929	Pemerintah Kabupaten Lamongan	Puskesmas Karanggeneng Kabupaten Lamongan	WBK	2020
1930	Pemerintah Kabupaten Lamongan	Puskesmas Dradah Kabupaten Lamongan	WBK	2020
1931	Pemerintah Kabupaten Lamongan	Puskesmas Deket Kabupaten Lamongan	WBK	2020
1932	Pemerintah Kabupaten Lamongan	RSUD dr. Soegiri Kabupaten Lamongan	WBK	2020
1933	Pemerintah Kabupaten Lumajang	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. HARYOTO	WBK	2021
1934	Pemerintah Kabupaten Lumajang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	WBK	2022
1935	Pemerintah Kabupaten Lumajang	UPT Puskesmas Penanggal	WBK	2022
1936	Pemerintah Kabupaten Magetan	Kecamatan Magetan	WBK	2018
1937	Pemerintah Kabupaten Magetan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan	WBK	2019
1938	Pemerintah Kabupaten Magetan	Puskesmas Plaosan	WBK	2019

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1939	Pemerintah Kabupaten Magetan	Kecamatan Poncol	WBK	2021
1940	Pemerintah Kabupaten Magetan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	WBK	2022
1941	Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Kecamatan Puri	WBK	2021
1942	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	RSUD dr. H. M. Rabain Muara Enim	WBK	2020
1943	Pemerintah Kabupaten Ngawi	Puskesmas Padas	WBK	2018
1944	Pemerintah Kabupaten Ngawi	Puskesmas Ngawi	WBK	2019
1945	Pemerintah Kabupaten Ngawi	UPT PUSKESMAS KENDAL	WBK	2020
1946	Pemerintah Kabupaten Ngawi	UPT PUSKESMAS KWADUNGAN	WBK	2020
1947	Pemerintah Kabupaten Ngawi	RSUD Dr. Soeroto	WBK	2022
1948	Pemerintah Kabupaten Ngawi	Puskesmas Kwadungan Kabupaten Ngawi	WBBM	2023
1949	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Puskesmas Bubakan	WBK	2020
1950	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	WBK	2022
1951	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Puskesmas Gemaharjo	WBK	2022
1952	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	WBK	2022
1953	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	UPTD Puskesmas Padaherang	WBK	2020
1954	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	UPTD Puskesmas Cigugur	WBK	2021
1955	Pemerintah Kabupaten Pasuruan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	WBK	2022
1956	Pemerintah Kabupaten Pematang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang	WBK	2020
1957	Pemerintah Kabupaten Ponorogo	Puskesmas Bungkal Kabupaten Ponorogo	WBK	2020
1958	Pemerintah Kabupaten Probolinggo	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	WBK	2020
1959	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	WBK	2021
1960	Pemerintah Kabupaten Purworejo	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	WBK	2021
1961	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo	WBK	2019
1962	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo	WBK	2020
1963	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	RSUD Kab. Sidoarjo	WBBM	2021
1964	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Kecamatan Sukodono	WBBM	2021
1965	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	WBK	2021

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1966	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Badan Pelayanan Pajak Daerah	WBK	2022
1967	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Kecamatan Taman	WBK	2022
1968	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Puskesmas Taman Kabupaten Sidoarjo	WBK	2023
1969	Pemerintah Kabupaten Sleman	Puskesmas Gamping 1 Kabupaten Sleman	WBK	2017
1970	Pemerintah Kabupaten Sleman	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman	WBK	2020
1971	Pemerintah Kabupaten Sleman	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	WBK	2021
1972	Pemerintah Kabupaten Sumedang	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang	WBK	2019
1973	Pemerintah Kabupaten Sumedang	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang	WBK	2023
1974	Pemerintah Kabupaten Sumenep	Puskesmas Bluto Kabupaten Sumenep	WBK	2020
1975	Pemerintah Kabupaten Sumenep	PUSKESMAS GULUK - GULUK	WBK	2021
1976	Pemerintah Kabupaten Tabalong	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	WBK	2023
1977	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu	WBK	2019
1978	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kabupaten Tanah Laut	WBK	2020
1979	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut	WBK	2020
1980	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Kecamatan Panggul Kab. Trenggalek	WBK	2018
1981	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	WBK	2022
1982	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Puskesmas Trenggalek	WBK	2022
1983	Pemerintah Kabupaten Tuban	UPTD Puskesmas Tuban	WBK	2020
1984	Pemerintah Kabupaten Tuban	UPTD PUSKESMAS JENU	WBK	2021
1985	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	RSUD dr. ISKAK	WBK	2021
1986	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung	WBK	2023
1987	Pemerintah Kabupaten Wonogiri	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri	WBK	2017
1988	Pemerintah Kabupaten Wonogiri	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri	WBBM	2022
1989	Pemerintah Kabupaten Wonosobo	Pusat Kesehatan Masyarakat Kaliwiro Kabupaten Wonosobo	WBK	2020
1990	Pemerintah Kabupaten Wonosobo	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KRT Setjonegoro Kabupaten Wonosobo	WBK	2023

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
1991	Pemerintah Kota Balikpapan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan	WBK	2016
1992	Pemerintah Kota Balikpapan	RSKB Sayang Ibu Balikpapan	WBK	2018
1993	Pemerintah Kota Balikpapan	Rumah Sakit Umum Daerah Beriman	WBK	2019
1994	Pemerintah Kota Bandung	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung	WBK	2020
1995	Pemerintah Kota Bandung	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandung	WBBM	2021
1996	Pemerintah Kota Bandung	Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak	WBK	2021
1997	Pemerintah Kota Bandung	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	WBK	2021
1998	Pemerintah Kota Banjar	Puskesmas Banjar 3	WBK	2020
1999	Pemerintah Kota Banjarbaru	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru	WBK	2021
2000	Pemerintah Kota Banjarmasin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	WBK	2019
2001	Pemerintah Kota Banjarmasin	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	WBK	2020
2002	Pemerintah Kota Bekasi	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid	WBK	2020
2003	Pemerintah Kota Blitar	Kecamatan Kepanjenkidul	WBK	2022
2004	Pemerintah Kota Bontang	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada	WBK	2022
2005	Pemerintah Kota Cilegon	UPTD Puskesmas Pulomerak Kota Cilegon	WBK	2023
2006	Pemerintah Kota Denpasar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	WBK	2023
2007	Pemerintah Kota Denpasar	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	WBK	2023
2008	Pemerintah Kota Kediri	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	WBK	2022
2009	Pemerintah Kota Madiun	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun	WBK	2019
2010	Pemerintah Kota Magelang	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang	WBK	2023
2011	Pemerintah Kota Malang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang	WBK	2019
2012	Pemerintah Kota Malang	Badan Pendapatan Daerah	WBK	2022
2013	Pemerintah Kota Metro	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro	WBK	2021
2014	Pemerintah Kota Mojokerto	Puskesmas Wates	WBK	2019
2015	Pemerintah Kota Mojokerto	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	WBK	2021
2016	Pemerintah Kota Mojokerto	RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo	WBK	2021
2017	Pemerintah Kota Mojokerto	Puskesmas Gedongan	WBK	2022
2018	Pemerintah Kota Palembang	RSUD Palembang Bari	WBK	2015
2019	Pemerintah Kota Pekalongan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan	WBK	2020
2020	Pemerintah Kota Pekalongan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan	WBK	2020

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
2021	Pemerintah Kota Pekalongan	RSUD Bendan Kota Pekalongan	WBK	2023
2022	Pemerintah Kota Pontianak	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak	WBK	2019
2023	Pemerintah Kota Pontianak	RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak	WBBM	2022
2024	Pemerintah Kota Probolinggo	Kecamatan Kademangan	WBBM	2022
2025	Pemerintah Kota Probolinggo	Puskesmas Kanigaran	WBK	2022
2026	Pemerintah Kota Samarinda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	WBK	2017
2027	Pemerintah Kota Semarang	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil kota Semarang	WBK	2019
2028	Pemerintah Kota Semarang	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Semarang	WBK	2019
2029	Pemerintah Kota Semarang	RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang	WBK	2019
2030	Pemerintah Kota Semarang	Puskesmas Halmahera Kota Semarang	WBK	2020
2031	Pemerintah Kota Semarang	Dinas Kesehatan Kota Semarang	WBK	2020
2032	Pemerintah Kota Semarang	Puskesmas Gayamsari Kota Semarang	WBK	2021
2033	Pemerintah Kota Semarang	Puskesmas Gunungpati Kota Semarang	WBK	2021
2034	Pemerintah Kota Semarang	UPTD Puskesmas Manyaran Kota Semarang	WBK	2023
2035	Pemerintah Kota Semarang	RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang	WBBM	2023
2036	Pemerintah Kota Singkawang	UPT Puskesmas Singkawang Selatan II Kota Singkawang	WBK	2023
2037	Pemerintah Kota Sukabumi	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi	WBK	2017
2038	Pemerintah Kota Sukabumi	Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi	WBK	2018
2039	Pemerintah Kota Sukabumi	Puskesmas Sukabumi	WBK	2022
2040	Pemerintah Kota Sukabumi	Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi	WBK	2023
2041	Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya	WBK	2023
2042	Pemerintah Kota Surabaya	RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya	WBK	2023
2043	Pemerintah Kota Surakarta	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta	WBK	2017
2044	Pemerintah Kota Surakarta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta	WBK	2017
2045	Pemerintah Kota Surakarta	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Surakarta	WBK	2020
2046	Pemerintah Kota Surakarta	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta	WBBM	2021
2047	Pemerintah Kota Surakarta	Kecamatan Jebres Kota Surakarta	WBK	2021

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
2048	Pemerintah Kota Surakarta	Kecamatan Banjarsari	WBK	2022
2049	Pemerintah Kota Tangerang	Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang	WBK	2019
2050	Pemerintah Kota Tanjungpinang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tanjung Pinang	WBK	2017
2051	Pemerintah Kota Tegal	Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal	WBK	2019
2052	Pemerintah Kota Tegal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal	WBK	2020
2053	Pemerintah Kota Tegal	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal	WBK	2020
2054	Pemerintah Kota Yogyakarta	Dinas Perizinan	WBK	2014
2055	Pemerintah Kota Yogyakarta	Kantor Pengelolaan Taman Pintar	WBK	2014
2056	Pemerintah Kota Yogyakarta	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	WBK	2019
2057	Pemerintah Kota Yogyakarta	Puskesmas Mantrijeron	WBK	2019
2058	Pemerintah Kota Yogyakarta	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	WBK	2020
2059	Pemerintah Provinsi Bali	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	WBBM	2022
2060	Pemerintah Provinsi Bali	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	WBK	2023
2061	Pemerintah Provinsi Bali	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali	WBK	2023
2062	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Mal Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PEMPROV DKI	WBK	2019
2063	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan PEMPROV DKI	WBK	2019
2064	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu PEMPROV DKI	WBK	2019
2065	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng PEMPROV DKI	WBK	2019
2066	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke Pemprov DKI Jakarta	WBK	2020
2067	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Laboratorium Lingkungan Daerah Pemprov DKI Jakarta	WBK	2020
2068	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pemprov DKI Jakarta	WBK	2020
2069	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat Pemprov DKI Jakarta	WBK	2020
2070	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Pemprov DKI Jakarta	WBK	2020
2071	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebon Jeruk Pemprov DKI Jakarta	WBK	2020

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
2072	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Pemprov DKI Jakarta	WBK	2020
2073	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	WBBM	2021
2074	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulogadung PEMPROV DKI	WBBM	2021
2075	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	SMK Negeri 57	WBK	2021
2076	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru Provinsi DKI Jakarta	WBK	2023
2077	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Laboratorium Kesehatan Daerah Pemprov DKI Jakarta	WBBM	2023
2078	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat	WBK	2020
2079	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Barat	WBBM	2021
2080	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Rumah Sakit Jiwa	WBK	2021
2081	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	WBK	2021
2082	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	WBK	2021
2083	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat	WBBM	2023
2084	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo	WBK	2017
2085	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Rumah Sakit Umum Daerah Kelet	WBK	2017
2086	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Margono Soekarjo	WBBM	2019
2087	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi KLATEN	WBK	2019
2088	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	RSJD Surakarta	WBK	2019
2089	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah I	WBK	2020
2090	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dinas Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	WBK	2020
2091	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	RSUD Tugurejo	WBBM	2020
2092	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	RSUD Dr. Moewardi	WBBM	2020
2093	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	WBK	2021
2094	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Balai Latihan Koperasi Provinsi Jawa Tengah	WBK	2021
2095	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	WBK	2021
2096	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	RS Jiwa Menur	WBK	2019
2097	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	RSU Haji Surabaya	WBK	2019

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
2098	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (Kantor Bersama SAMSAT) Jombang	WBK	2019
2099	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK) Disnakertrans Prov. Jatim	WBK	2019
2100	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Sidoarjo	WBK	2019
2101	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Jember	WBK	2019
2102	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah (Kantor Bersama Samsat) Nganjuk, Bapenda Provinsi Jawa Timur	WBK	2020
2103	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Pasuruan, Badan Pendapatan Daerah	WBK	2021
2104	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Trenggalek, Badan Pendapatan Daerah	WBK	2022
2105	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	RSUD Dr. Soedono Madiun Provinsi Jawa Timur	WBK	2023
2106	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	UPT Keselamatan Kerja Provinsi Jawa Timur	WBK	2023
2107	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso	WBK	2020
2108	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum	WBK	2019
2109	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Rumah Sakit Umum Daerah Kanujoso Djiatibowo Balikpapan	WBK	2017
2110	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara	WBK	2020
2111	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat	WBK	2017
2112	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	WBK	2017
2113	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi	WBK	2020
2114	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	WBK	2020
2115	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno	WBK	2020
2116	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APUPPT)	WBK	2021
2117	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Direktorat Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri	WBK	2023
2118	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Badan Kerja Sama Antar Parlemen	WBK	2020
2119	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	WBK	2020

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
2120	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Pusat Kajian Anggaran	WBK	2021
2121	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Biro Persidangan II	WBK	2021
2122	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI	WBK	2023
2123	Sekretariat Kabinet	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	WBK	2020
2124	Tentara Nasional Indonesia	Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara	WBK	2019
2125	Tentara Nasional Indonesia	Korem 082/CPYJ Kodam V/BRW Mojokerto	WBK	2019
2126	Tentara Nasional Indonesia	RSPAD Gatot Subroto	WBK	2019
2127	Tentara Nasional Indonesia	Rumah Sakit Tk. IV Dr. Bratanata Jambi	WBK	2019
2128	Tentara Nasional Indonesia	Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat	WBK	2019
2129	Tentara Nasional Indonesia	Grup 1 Komando Pasukan Khusus	WBK	2020
2130	Tentara Nasional Indonesia	Grup 3 Komando Pasukan Khusus	WBK	2020
2131	Tentara Nasional Indonesia	Rumah Sakit Dustira	WBK	2020
2132	Tentara Nasional Indonesia	Rumah Sakit Ciremai	WBK	2020
2133	Tentara Nasional Indonesia	Rumah Sakit TK II dr. Soejono Kesda IV/DIP	WBK	2020
2134	Tentara Nasional Indonesia	Akademi Angkatan Laut	WBK	2020
2135	Tentara Nasional Indonesia	Lembaga Kedokteran Gigi R.E. Martadinata	WBK	2020
2136	Tentara Nasional Indonesia	Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut	WBK	2020
2137	Tentara Nasional Indonesia	Rumah Sakit Marinir Cilandak	WBK	2020
2138	Tentara Nasional Indonesia	Dinas Penerangan Angkatan Laut	WBK	2020
2139	Tentara Nasional Indonesia	RSAU dr. Esnawan Antariksa	WBK	2020
2140	Tentara Nasional Indonesia	DISJARAHAD	WBK	2021
2141	Tentara Nasional Indonesia	PUSSENARHANUD	WBK	2021
2142	Tentara Nasional Indonesia	PASPAMPRES	WBK	2021
2143	Tentara Nasional Indonesia	AAU	WBK	2021
2144	Tentara Nasional Indonesia	KORMAR	WBK	2021
2145	Tentara Nasional Indonesia	KOARMADA II	WBK	2021
2146	Tentara Nasional Indonesia	PUSDIKARMED PUSSENARMED	WBK	2021
2147	Tentara Nasional Indonesia	BRIGIF PR 18/TRISULA DIVIF 2 KOSTRAD	WBK	2022
2148	Tentara Nasional Indonesia	LANUD ROEMIN NURJADIN	WBK	2022
2149	Tentara Nasional Indonesia	PUSHIDROSAL	WBK	2022
2150	Tentara Nasional Indonesia	PUSDIKARHANUD PUSSENARHANUD KODIKLATAD	WBK	2022
2151	Tentara Nasional Indonesia	PUSPOMAD	WBK	2022
2152	Tentara Nasional Indonesia	PUSSENARMED KODIKLATAD	WBK	2022
2153	Tentara Nasional Indonesia	Rumah Sakit Tk. II Pelamonia Kesda XIV/Hsn	WBK	2023
2154	Tentara Nasional Indonesia	Pusat Kesenjataan Kavaleri TNI AD	WBK	2023

No	Instansi	Unit/ Satuan Kerja	Predikat	Tahun
2155	Tentara Nasional Indonesia	Resimen Induk Kodam XVI/Ptm	WBK	2023
2156	Tentara Nasional Indonesia	Divisi Infanteri 2 Kostrad	WBK	2023
2157	Tentara Nasional Indonesia	Korem 044/Gapo Kodam II/Swj.	WBK	2023
2158	Tentara Nasional Indonesia	Korem 073/Makutarama Kodam IV/Dip.	WBK	2023
2159	Tentara Nasional Indonesia	Akademi Militer	WBK	2023
2160	Tentara Nasional Indonesia	Resimen Arhanud 1/Faletehan Kodam Jaya	WBK	2023
2161	Tentara Nasional Indonesia	Komando Lintas Laut Militer	WBK	2023
2162	Tentara Nasional Indonesia	Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun	WBK	2023



SALINAN

MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 795 TAHUN 2023

TENTANG

**HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH DAN
BUMN TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada unit penyelenggaraan pelayanan publik lingkup kementerian, lembaga dan pemerintah daerah tahun 2023, perlu menetapkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

- 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 672);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 7. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 November 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 795 TAHUN 2023
TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK TAHUN 2023

HASIL NILAI PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023

A. HASIL NILAI PEKPPP LINGKUP KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	LAYANAN ADMINISTRASI			LAYANAN BARANG			LAYANAN JASA			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
1	Badan Pusat Statistik	Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Bengkulu	4,73	A	Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Jawa Timur	4,84	A	Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Utara	4,79	A	4,79	A

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	LAYANAN ADMINISTRASI			LAYANAN BARANG			LAYANAN JASA			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
2	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Balai Besar POM di Surabaya	4,88	A	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	4,71	A	Balai Besar POM di Serang	4,75	A	4,78	A
3	Kementerian Keuangan	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai	4,72	A	KPKNL Balikpapan	4,71	A	KPPN Tipe A2 Ketapang	4,76	A	4,73	A
4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga	4,69	A	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah DKI Jakarta	4,73	A	Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4,72	A	4,71	A
5	Kementerian Perhubungan	Stasiun Gambir	4,67	A	Pelabuhan Merak	4,68	A	Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai	4,76	A	4,70	A

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	LAYANAN ADMINISTRASI			LAYANAN BARANG			LAYANAN JASA			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
6	Badan Kepegawaian Negara	Kantor Regional V Jakarta	4,83	A	Kanreg XII Pekanbaru	4,64	A	Kantor Regional XI BKN Manado	4,6	A	4,69	A
7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Direktorat Pos, Ditjen PPI (Layanan Perizinan Penyelenggaraan Pos)	4,66	A	Biro Hubungan Masyarakat (PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika)	4,55	A	Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT)	4,85	A	4,69	A
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak	4,68	A	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	4,43	A-	Balai Uji Standar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	4,8	A	4,64	A
9	Kementerian Pertanian	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	4,31	A-	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden	4,71	A	Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta	4,76	A	4,59	A

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	LAYANAN ADMINISTRASI			LAYANAN BARANG			LAYANAN JASA			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
10	Kementerian Perindustrian	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda	4,78	A	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim, Makassar	4,49	A-	Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia	4,48	A-	4,58	A
11	Komisi Pemilihan Umum	Layanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Provinsi Jawa Timur	4,53	A	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Biro Logistik KPU RI	4,58	A	Layanan Pendidikan Pemilih, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	4,61	A	4,57	A
12	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Direktorat Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Tata Kelola Ilmiah	4,52	A	Pusat Data dan Informasi	4,51	A	Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran	4,69	A	4,57	A

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	LAYANAN ADMINISTRASI			LAYANAN BARANG			LAYANAN JASA			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
13	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN	Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung	4,68	A	Kantor Pertanahan Kota Denpasar	4,51	A	Kantor Pertanahan Kota Surabaya I	4,51	A	4,57	A
14	Kementerian Dalam Negeri	Unit Layanan Administrasi, Biro Organisasi dan Tatalaksana	4,6	A	Direktorat Politik Dalam Negeri	4,23	A-	PPSDM Regional Bukittinggi	4,84	A	4,56	A
15	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur	4,49	A-	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa	4,57	A	Politeknik Negeri Batam	4,6	A	4,55	A
16	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa	4,56	A	Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut	4,52	A	Rumah Sakit Tk. II 03.06.1 Ciremai Kesdam III/Siliwangi	4,56	A	4,55	A

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	LAYANAN ADMINISTRASI			LAYANAN BARANG			LAYANAN JASA			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
17	Kementerian Agama	Kantor Kementerian Agama Kab. Purbalingga	4,64	A	Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem	4,4	A-	Kantor Kementerian Agama Kota Malang	4,48	A-	4,51	A
18	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Biro Hukum, Penyediaan Informasi Progres Permohonan Paraf Menteri	4,52	A	Biro Perencanaan, Layanan Penyediaan Bahan, Rekaman, dan Risalah Rapat	4,43	A-	PPID	4,52	A	4,49	A-
19	Kementerian Sekretariat Negara	Biro Personel TNI dan Polri	4,55	A	Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Wakil Presiden	4,72	A	Asisten Deputi Hubungan Masyarakat,	4,14	A-	4,47	A-
20	Kementerian Ketenagakerjaan	Pelayanan Terpadu Satu Atap	4,47	A-	Biro Umum	4,34	A-	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda	4,57	A	4,46	A-
21	Kepolisian Republik Indonesia	Layanan SIM Internasional	4,16	A-	Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan	4,51	A	SSDM Mabes Polri	4,56	A	4,41	A-

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	LAYANAN ADMINISTRASI			LAYANAN BARANG			LAYANAN JASA			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
22	Kementerian Perdagangan	Balai Sertifikasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	4,52	A	Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal, Direktorat Metrologi	4,31	A-	Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan, Direktorat Metrologi	4,38	A-	4,40	A-
23	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI	Bagian Perjalanan Biro Keuangan	4,46	A-	Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma : Pengelolaan Wisma DPR RI	4,24	A-	Bagian Layanan Kesehatan Biro Umum	4,5	A-	4,40	A-
24	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Sertifikat Nomor Induk Koperasi, Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi	4,3	A-	Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Umum dan Keuangan	4,5	A-	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	4,39	A-	4,40	A-
25	Lembaga Administrasi Negara	Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan	4,22	A-	Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi ASN	4,53	A	Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial ASN	4,28	A-	4,34	A-

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	LAYANAN ADMINISTRASI			LAYANAN BARANG			LAYANAN JASA			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
26	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	PLBN Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat	4,35	A-	PLBN Motaain, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur	4,37	A-	PLBN Motamasin, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur	4,3	A-	4,34	A-
27	Kementerian Pertahanan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan	4,34	A-	Pelayanan Perlengkapan Perorangan	4,17	A-	Rumah Sakit dr. Suyoto Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan	4,51	A	4,34	A-
28	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Biro Hukum dan Komunikasi	4,47	A-	Biro Umum dan PBJ Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	4,19	A-	Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta	4,28	A-	4,31	A-
29	Kejaksaan Agung	Kejaksaan Tinggi Lampung	4,32	A-	Kejaksaan Negeri Pekanbaru	4,34	A-	Kejaksaan Tinggi Jambi	4,27	A-	4,31	A-

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	LAYANAN ADMINISTRASI			LAYANAN BARANG			LAYANAN JASA			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
30	Badan Intelijen Negara	Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur	4,61	A	Biro Logistik	4,12	A-	Deputi Intelijen Teknologi	4,14	A-	4,29	A-
31	Komisi Pemberantasan Korupsi	Unit Layanan LHKPN	4,25	A-	Unit Layanan Perpustakaan	4,3	A-	Pelayanan Informasi Publik (PIP), Biro Humas	4,27	A-	4,27	A-
32	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	BP3MI Nusa Tenggara Barat	4,47	A-	Biro Keuangan dan Umum	4,09	A-	BP3MI Kalimantan Utara	4,22	A-	4,26	A-
33	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Sekretariat PPID	4,44	A-	Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	4,35	A-	Perpustakaan	3,97	B	4,25	A-
34	Kementerian Kesehatan	Politeknik Kesehatan Jakarta III	4,6	A	RSUP Dr. Sardjito	4,54	A	RSPON Prof Dr dr Mahar Mardjono Jakarta	3,6	B	4,25	A-

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	LAYANAN ADMINISTRASI			LAYANAN BARANG			LAYANAN JASA			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
35	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Penelaahan Permohonan	4,41	A-	Biro Umum dan Kepegawaian	4,42	A-	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	3,83	B	4,22	A-
36	Perpustakaan Nasional	Pusat Pembinaan Pustakawan	4,17	A-	Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus	4,2	A-	UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno	4,23	A-	4,20	A-
37	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pelayanan Terpadu Satu Pintu KLHK	3,86	B	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Unda Anyar	4,43	A-	Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sumatera	4,29	A-	4,19	A-
38	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Politeknik Pariwisata NHI Bandung	4,34	A-	Direktorat Komunikasi Pemasaran	4,23	A-	Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores	3,98	B	4,18	A-
39	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	4,24	A-	Biro Umum dan Keuangan	3,71	B	Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik	4,48	A-	4,14	A-

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	LAYANAN ADMINISTRASI			LAYANAN BARANG			LAYANAN JASA			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
40	Badan Pengusahaan Batam	Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,76	B	Badan Usaha Pelabuhan	4,34	A-	Badan Usaha Rumah Sakit	4,3	A-	4,13	A-
41	Dewan Ketahanan Nasional	Biro Perencanaan Keuangan	4,14	A-	Biro Umum	4,13	A-	Biro Persidangan Sistem Informasi dan Pengawasan Internal	4,13	A-	4,13	A-
42	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan	4,58	A	Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya	3,64	B	Gerai Pelayanan Publik Direktorat Jenderal AHU Cikini	4,13	A-	4,12	A-
43	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	Layanan Informasi Publik Melalui Website PPID	4,2	A-	Layanan Jasa Penggunaan Sound System Untuk Penyelenggaraan Siaran di Luar Auditorium dan/atau Studio RRI	3,99	B	Layanan Jasa Penyiaran Siaran Iklan	4,09	A-	4,09	A-

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	LAYANAN ADMINISTRASI			LAYANAN BARANG			LAYANAN JASA			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
44	Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan	Klinik Pratama PPATK	4,2	A-	UKPBJ PPATK	3,38	B-	Pusdiklat APUPPT	4,63	A	4,07	A-
45	Badan Informasi Geospasial	Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial	3,86	B	Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika	4,57	A	Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial	3,65	B	4,03	A-
46	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI	Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kepegawaian	3,88	B	Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro Umum	3,94	B	Klinik Pratama DPD RI	4,09	A-	3,97	B
47	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)	Direktorat Sistem Komunikasi, Registrasi Radio Beacon BASARNAS	3,86	B	UKPBJ (Layanan Pengadaan Secara Elektronik/LPSE) BASARNAS	4,17	A-	Inspektorat BASARNAS	3,8	B	3,94	B

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	LAYANAN ADMINISTRASI			LAYANAN BARANG			LAYANAN JASA			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
48	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	4,2	A-	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	3,65	B	Layanan pengaduan SIPEMANDU Desa (Sistem Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu)	3,92	B	3,92	B
49	Kementerian Sosial	Unit Layanan Pengangkata n Anak Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak	3,56	B	Biro Umum	3,71	B	Sentra Terpadu Inten Soeweno	4,23	A-	3,83	B
50	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kepegawaian Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	3,54	B	Perpustakaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3,57	B	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	4,33	A-	3,81	B

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	LAYANAN ADMINISTRASI			LAYANAN BARANG			LAYANAN JASA			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
51	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	3,66	B	Asisten Deputi Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana dan Sarana Olahraga	3,82	B	Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda	3,84	B	3,77	B
52	Mahkamah Konstitusi	Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelola Perpustakaan	3,81	B	Biro Umum	4,05	A-	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	3,4	B-	3,75	B
53	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan	3,61	B	Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	3,33	B-	Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis	4,24	A-	3,73	B
54	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Sekretariat Jenderal Kawasan Ekonomi	2,39	C-	Siaran Pers Humas Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan	4,41	A-	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Biro	4,35	A-	3,72	B

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	LAYANAN ADMINISTRASI			LAYANAN BARANG			LAYANAN JASA			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
		Khusus (KEK)			0,1501760061Persida ngan			Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan				
55	Komisi Aparatur Sipil Negara	Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I dan II	3,62	B	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	3,6	B	Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I	3,9	B	3,71	B
56	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Layanan Perijinan Panas Bumi	3,91	B	Layanan Laboratorium Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan , Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi	3,54	B	Layanan Informasi dan Investasi (LINTAS) Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE)	3,65	B	3,70	B

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	LAYANAN ADMINISTRASI			LAYANAN BARANG			LAYANAN JASA			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
57	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, E-Proposal Pascabencana	4,13	A-	Layanan Peningkatan Aparatur, Sarpras Pusdalops Daerah	3	C	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulanga n Bencana	3,75	B	3,63	B
58	Badan Keamanan Laut	Direktorat Kebijakan	2,83	C	Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut (Puskodal)	4,22	A-	Direktorat Operasi Laut	3,72	B	3,59	B
59	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Direktorat Analisis dan Penyelarasan	3,64	B	Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama	3,34	B-	Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi	3,71	B	3,56	B

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	LAYANAN ADMINISTRASI			LAYANAN BARANG			LAYANAN JASA			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
60	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Bagian Keuangan, Biro Umum	3,21	B-	Biro Umum	3,36	B-	Biro Dukungan Penegakan HAM	3,63	B	3,40	B-
61	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	JDIH BNPT	3,93	B	Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha	2,9	C	Sub Direktorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme	3,28	B-	3,37	B-
62	Badan Narkotika Nasional	Biro Perencanaan	3,08	B-	Biro Umum	3,22	B-	BNNP DKI Jakarta	3,32	B-	3,21	B-
63	Badan Pengawasan Pemilihan Umum	Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	3,35	B-	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum	3,35	B-	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum	2,79	C	3,16	B-
64	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	3,85	B	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	1,11	E	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	4,04	A-	3,00	C

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	LAYANAN ADMINISTRASI			LAYANAN BARANG			LAYANAN JASA			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
65	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Direktorat Bina Pergerakan Lini Lapangan	2,6	C	Biro Umum dan Humas	2,14	C-	Direktorat Bina Ketahanan Remaja	3,82	B	2,85	C
66	Lembaga Ketahanan Nasional	Biro Kerja Sama dan Hukum	2,54	C	Bagian Rumah Rangka dan Pengadaan Biro Umum	2,63	C	Direktorat Pembinaan Peserta Pendidikan, Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional	3,05	B-	2,74	C
67	Televisi Republik Indonesia	Direktorat Umum LPP TVRI Pusat	2,13	C-	Direktorat Umum LPP TVRI Pusat	2,36	C-	Direktorat Pengembangan dan Usaha Kantor TVRI Pusat	3,27	B-	2,59	C

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	LAYANAN ADMINISTRASI			LAYANAN BARANG			LAYANAN JASA			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
68	Ombudsman RI	Tata Persuratan dan Kearsipan Ombudsman RI	2,59	C	Perpustakaan Ombudsman RI	1,85	D	Inspektorat Ombudsman RI	3,09	B-	2,51	C

B. HASIL NILAI PEKPPP LINGKUP KEMENTERIAN/LEMBAGA KURANG DARI 3 LOKUS

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	LAYANAN ADMINISTRASI			LAYANAN BARANG			LAYANAN JASA			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
1	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI	Subbagian Peraturan Perundang-Undang an, Bagian Hukum,Biro SDM, Organisasi dan Hukum	4,03	A-	-	-	-	Subbagian Hubungan Antar Lembaga, Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi	4,27	A-	4,15	A-
2	Mahkamah Agung	Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Barat	3,5	B-	-	-	-	Pengadilan Agama Kelas IB Cilegon	4,74	A	4,12	A-
3	Badan Standardisasi Nasional	-	-	-	Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi	4,35	A-	Pusat Pengembangan SDM SPK	3,88	B	4,12	A-
4	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	4,14	A-	-	-	-	Balai Pendidikan dan Pelatihan	3,93	B	4,04	A-

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	LAYANAN ADMINISTRASI			LAYANAN BARANG			LAYANAN JASA			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
5	Badan Siber dan Sandi Negara	Direktorat Operasi Keamanan Siber, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi	4,03	A-	-	-	-	Balai Sertifikasi Elektronik	3,16	B-	3,60	B
6	Sekretariat Kabinet	-	-	-	-	-	-	Pusat Pembinaan Penerjemah	4,53	A	4,53	A
7	Kementerian Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia	4,15	A-	4,15	A-
8	Arsip Nasional Republik Indonesia	-	-	-	-	-	-	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	3,92	B	3,92	B

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	LAYANAN ADMINISTRASI			LAYANAN BARANG			LAYANAN JASA			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
9	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	3,22	B-	-	-	-	-	-	-	3,22	B-
10	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA
11	Badan Pemeriksa Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA
12	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA
13	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	LAYANAN ADMINISTRASI			LAYANAN BARANG			LAYANAN JASA			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
14	Komisi Yudisial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA

C. HASIL NILAI PEKPPP LINGKUP BUMN SEKTOR TRANSPORTASI

NO.	BANDAR UDARA			PELABUHAN			STASIUN KERETA API		
	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat
1.	Bandara Ngurah Rai	4,76	A	Pelabuhan Merak	4,68	A	Stasiun Gambir	4,67	A
2.	Bandara Soekarno Hatta	4,66	A	Pelabuhan Bakauheni	4,67	A	Stasiun Yogyakarta	4,57	A
3.	Bandara Juanda	4,62	A	Pelabuhan Ketapang	4,63	A	Stasiun Bandung	4,54	A
4.	Bandara Sultan Aji M. Sulaiman	4,52	A	Pelabuhan Ajibata	4,58	A	Stasiun Pasar Turi	4,53	A

NO.	BANDAR UDARA			PELABUHAN			STASIUN KERETA API		
	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat
5.	Bandara Sultan Syarif Kasyim II	4,4	A-	Pelabuhan Gilimanuk	4,38	A-	Stasiun Cirebon	4,51	A
6.	Bandara Sultan Hasanudin	4,22	A-	Pelabuhan Bolok	4,31	A-	Stasiun Kertapati	4,48	A-
7.	Bandara Sentani	4,09	A-	Pelabuhan Pagimana	3,85	B	Stasiun Jember	4,44	A-
8.	Bandara YIA	3,9	B	Pelabuhan Hunimua	3,81	B	Stasiun Semarang Tawang	4,28	A-
9.	Bandara Zainudin Madjid	3,83	B	Pelabuhan Penajam	3,55	B	Stasiun Madiun	4,2	A-

NO.	BANDAR UDARA			PELABUHAN			STASIUN KERETA API		
	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat
10.	Bandara Syamsudin Noor	3,7	B	-	-	-	Stasiun Tanjung Karang	4,18	A-
11.	-	-	-	-	-	-	Stasiun Purwokerto	4,14	A-
12.	-	-	-	-	-	-	Stasiun Padang	4,03	A-
13.	-	-	-	-	-	-	Stasiun Medan	3,85	B

D. HASIL NILAI PEKPPP LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI

NO.	PROVINSI	BAPPENDA/SAMSAT			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
1.	Pemerintah Provinsi D,I, Yogyakarta	KPPD DIY di Kabupaten Bantul	4,68	A	Dinas Sosial	4,59	A	RS Paru Respira	4,54	A	4,57	A
2.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	4,65	A	Dinas Sosial	4,33	A-	RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat	4,62	A	4,53	A
3.	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Samsat Batu	4,51	A	Dinas Sosial	4,34	A-	RSUD Dr. Saiful Anwar	4,22	A-	4,36	A-
4.	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Ilir I	4,25	A-	Dinas Sosial	4,1	A-	RSUD Siti Fatimah Az-Zahra	4,70	A	4,35	A-

NO.	PROVINSI	BAPPENDA/SAMSAT			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
5.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	UPT Pendapatan Wilayah Gowa	4,43	A-	Dinas Sosial	4,13	A-	RSUD Labuang Baji	4,47	A-	4,34	A-
6.	Pemerintah Provinsi Aceh	UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah XII Kabupaten Aceh Barat (SAMSAT Aceh Barat)	4,55	A	Dinas Sosial	4,05	A-	RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh	4,41	A-	4,34	A-
7.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Singkawang	4,39	A-	Dinas Sosial	4,3	A-	RSUD dr. Soedarso	4,28	A-	4,32	A-
8.	Pemerintah Provinsi Gorontalo	UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo	4,27	A-	Dinas Sosial	4,1	A-	RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo	4,36	A-	4,24	A-

NO.	PROVINSI	BAPPENDA/SAMSAT			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
9.	Pemerintah Provinsi Bali	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	4,22	A-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,83	B	RSUD Bali Mandara	4,59	A	4,21	A-
10.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD PPD SAMSAT Minahasa Utara	4,43	A-	Dinas Sosial	3,72	B	RSUD ODSK	4,44	A-	4,20	A-
11.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	UPTD PPD Tanjungpinang	4,35	A-	Dinas Sosial	4,01	A-	RSUD Raja Ahmad Tabib	4,02	A-	4,13	A-
12.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	UPPD Kota Surakarta	4,01	A-	Dinas Sosial	3,65	B	RSUD dr. Moewardi	4,66	A	4,11	A-
13.	Pemerintah Provinsi Lampung	UPTD Pengelolaan Pendapatan Wilayah VIII Bapenda Provinsi Lampung	4,11	A-	Dinas Sosial	3,81	B	RSUD Dr. H. Abdul Moeloek	4,23	A-	4,05	A-

NO.	PROVINSI	BAPPENDA/SAMSAT			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
14.	Pemerintah Provinsi Riau	UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang 3	4,45	A-	Dinas Sosial	4,01	A-	RSUD Arifin Achmad	3,66	B	4,04	A-
15.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Administrasi Jakarta Barat	3,42	B-	Dinas Sosial	4,03	A-	RSUD Tarakan	4,65	A	4,03	A-
16.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	UPPD Banjarmasin II	3,52	B	Dinas Sosial	4,01	A-	RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh	4,57	A	4,03	A-
17.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	UPTD PPRD Balikpapan	3,89	B	Dinas Sosial	3,71	B	RSUD Abdul Wahab Sjahanie	4,40	A-	4,00	B
18.	Pemerintah Provinsi NTB	UPTB-UPPD Gerung	3,61	B	Dinas Sosial	3,66	B	RSUD Provinsi NTB	4,65	A	3,97	B

NO.	PROVINSI	BAPPENDA/SAMSAT			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
19.	Pemerintah Provinsi Banten	Samsat Cikande	3,9	B	Dinas Sosial	2,83	C	RSUD Banten	4,50	A-	3,74	B
20.	Pemerintah Provinsi Bengkulu	UPTD PPD SAMSAT Kabupaten Bengkulu Utara	4,23	A-	Dinas Sosial	3,36	B-	RSUD Dr. M. Yunus	3,51	B	3,70	B
21.	Pemerintah Provinsi NTT	Uptd Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang	3,25	B-	Dinas Sosial	3,56	B	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	3,98	B	3,60	B
22.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kolaka Timur	3,38	B-	Dinas Sosial	2,73	C	Rumah Sakit Umum Bahteramas	4,42	A-	3,51	B
23.	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Binjai (SAMSAT Binjai)	3,38	B-	Dinas Sosial	2,73	C	UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan	4,42	A-	3,51	B

NO.	PROVINSI	BAPPENDA/SAMSAT			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
24.	Pemerintah Provinsi Kep, Bangka Belitung	UPTB Provinsi Bangka Belitung Kota Pangkal Pinang	3,43	B-	Dinas Sosial	4,27	A-	RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno	2,81	C	3,50	B-
25.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	UPT Pendapatan Daerah Wilayah XI Sigi	2,59	C	Dinas Sosial	3,88	B	RSUD Undata	3,78	B	3,42	B-
26.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	UPT Bapenda Wilayah Tarakan	2,88	C	Dinas Sosial	3,94	B	RSUD dr.H. Jusuf SK	3,4	B-	3,41	B-
27.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Samsat Majene	2,44	C-	Dinas Sosial	3,89	B	RSUD Provinsi Sulawesi Barat	3,78	B	3,37	B-
28.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	UPTD PPD Bapenda Sumbar, Samsat Kota Payakumbuh	3,5	B-	Dinas Sosial	2,7	C	RSUD Dr. Achmad Muchtar Bukittinggi	3,83	B	3,34	B-

NO.	PROVINSI	BAPPENDA/SAMSAT			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
29.	Pemerintah Provinsi Jambi	SAMSAT Kabupaten Bungo	3,29	B-	Dinas Sosial	3,07	B-	RSUD Raden Mattaher	3,49	B-	3,28	B-
30.	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	SAMSAT Halmahera Barat	2,6	C	Dinas Sosial	2,54	C	RSUD Dr. H. Chasan Boesorie	3,61	B	2,92	C
31.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Kantor Bersama SAMSAT Pangkalan Bun	2,54	C	Dinas Sosial	1,52	D	RSUD dr. Doris Sylvanus	2,26	C-	2,11	C-
32.	Pemerintah Provinsi Maluku	UPT Pelayanan Pendapatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah	1,05	E	Dinas Sosial	2,42	C-	RSUD dr. M. Haulussy	1,84	D	1,77	D
33.	Pemerintah Provinsi Papua Barat	Kantor Bersama SAMSAT Provinsi Papua Barat	2,71	C	Dinas Sosial	0,14	F	RSUD Provinsi Papua Barat	2,24	C-	1,70	D

NO.	PROVINSI	BAPPENDA/SAMSAT			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
34.	Pemerintah Provinsi Papua	SAMSAT Sentani	1,22	E	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,67	F	RSUD Jayapura	1,43	F	1,11	E

E. HASIL NILAI PEKPPP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
1.	Kabupaten Banyuwangi	Kecamatan Banyuwangi	4,52	A	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	4,51	A	RSUD Blambangan	4,7	A	4,58	A
2.	Kabupaten Kebumen	Kecamatan Kebumen	4,45	A-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,53	A	RSUD dr. Soedirman	4,68	A	4,55	A
3.	Kabupaten Badung	Kecamatan Kuta	4,42	A-	Dinas Sosial	4,56	A	RSD Mangusada	4,65	A	4,54	A
4.	Kabupaten Sleman	Kapanewon Gamping	4,56	A	Dinas Sosial	4,42	A-	RSUD Sleman	4,64	A	4,54	A

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
5.	Kota Surabaya	Kecamatan Bubutan	4,51	A	Dinas Sosial	4,55	A	RSUD Bhakti Dharma Husada	4,53	A	4,53	A
6.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Kecamatan Labuan Amas Utara	4,46	A-	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	4,42	A-	RSUD H. Damanhuri Barabai	4,67	A	4,52	A
7.	Kota Surakarta	Kecamatan Jebres	4,60	A	Dinas Sosial	4,48	A-	RSUD Ibu Fatmawati Soekarno	4,47	A-	4,52	A
8.	Kota Magelang	Kecamatan Magelang Tengah	4,46	A-	Dinas Sosial	4,54	A	RSUD Tidar	4,53	A	4,51	A
9.	Kabupaten Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	4,52	A	Dinas Sosial	4,32	A-	RSUD Ir. Soekarno	4,68	A	4,51	A

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
10.	Kabupaten Jember	Kecamatan Sumbersari	4,41	A-	Dinas Sosial	4,57	A	RSD dr. Soebandi Jember	4,54	A	4,51	A
11.	Kota Balikpapan	Kecamatan Balikpapan Selatan	4,55	A	Dinas Sosial	4,48	A-	RSUD Beriman	4,49	A-	4,51	A
12.	Kota Semarang	Kecamatan Gajahmungkur	4,51	A	Dinas Sosial	4,36	A-	RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro	4,57	A	4,48	A-
13.	Kota Bogor	Kecamatan Bogor Utara	4,37	A-	Dinas Sosial	4,49	A-	RSUD Kota Bogor	4,57	A	4,48	A-
14.	Kota Denpasar	Kecamatan Denpasar Selatan	4,5	A-	Dinas Sosial	4,46	A-	RSUD Wangaya	4,46	A-	4,47	A-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
15.	Kabupaten Karanganyar	Kecamatan Karanganyar	4,35	A-	Dinas Sosial	4,51	A	RSUD Karanganyar	4,55	A	4,47	A-
16.	Kabupaten Klaten	Kecamatan Klaten Utara	4,48	A-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4,45	A-	RSUD Bagas Waras	4,47	A-	4,47	A-
17.	Kabupaten Cilacap	Kecamatan Majenang	4,31	A-	Dinas Sosial	4,47	A-	RSUD Cilacap	4,54	A	4,44	A-
18.	Kabupaten Sidoarjo	Kecamatan Taman	4,39	A-	Dinas Sosial	4,19	A-	RSUD Kabupaten Sidoarjo	4,72	A	4,43	A-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
19.	Kota Banjar	Kecamatan Purwaharja	4,34	A-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,5	A-	RSUD Asih Husada Langensari	4,46	A-	4,43	A-
20.	Kota Bekasi	Kecamatan Medansatria	4,39	A-	Dinas Sosial	4,46	A-	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid	4,44	A-	4,43	A-
21.	Kota Madiun	Kecamatan Mangunharjo	4,47	A-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,34	A-	RSUD Kota Madiun	4,47	A-	4,43	A-
22.	Kabupaten Bantul	Kapanewon Kasihan	4,49	A-	Dinas Sosial	4,44	A-	RSUD Panembahan Senopati	4,34	A-	4,42	A-
23.	Kabupaten Kendal	Kecamatan Brangsong	4,29	A-	Dinas Sosial	4,45	A-	RSUD dr. H. Soewondo	4,51	A	4,42	A-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
24.	Kota Yogyakarta	Kemantren Umbulharjo	4,29	A-	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4,42	A-	RSUD Kota Yogyakarta	4,53	A	4,41	A-
25.	Kota Pekalongan	Kecamatan Pekalongan Timur	4,33	A-	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4,42	A-	RSUD Bendan	4,49	A-	4,41	A-
26.	Kabupaten Kepulauan Talaud	Kecamatan Melonguane	4,34	A-	Dinas Sosial	4,39	A-	RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud	4,5	A-	4,41	A-
27.	Kabupaten Pematang	Kecamatan Pematang	4,46	A-	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,46	A-	RSUD dr. M. Ashari	4,31	A-	4,41	A-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
28.	Kota Payakumbuh	Kecamatan Payakumbuh Timur	4,44	A-	Dinas Sosial	4,36	A-	RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh	4,42	A-	4,41	A-
29.	Kabupaten Banyumas	Kecamatan Kembaran	4,10	A-	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4,41	A-	RSUD Ajibarang	4,69	A	4,40	A-
30.	Kota Palembang	Kecamatan Ilir Timur Satu	4,46	A-	Dinas Sosial	3,86	B	RSUD Palembang Bari	4,88	A	4,40	A-
31.	Kabupaten Pinrang	Kecamatan Lanrisang	4,36	A-	Dinas Sosial	4,46	A-	RSUD Masiding	4,37	A-	4,40	A-
32.	Kabupaten Rembang	Kecamatan Rembang	4,30	A-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	4,42	A-	RSUD dr. R. Soetrasno	4,45	A-	4,39	A-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
33.	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kecamatan Kelapa Gading	4,38	A-	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Utara	4,41	A-	RSUD Koja	4,38	A-	4,39	A-
34.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Sawah Besar	4,13	A-	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	4,49	A-	RSUD Cempaka Putih	4,53	A	4,38	A-
35.	Kabupaten Blora	Kecamatan Bogorejo	4,38	A-	Dinas Sosial	4,39	A-	RSUD dr. R. Soetijono Blora	4,36	A-	4,38	A-
36.	Kabupaten Bogor	Kecamatan Jonggol	4,47	A-	Dinas Sosial	4,29	A-	RSUD Leuwiliang	4,31	A-	4,36	A-
37.	Kabupaten Gunungkidul	Kapanewon Paliyan	4,29	A-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,32	A-	RSUD Wonosari	4,41	A-	4,34	A-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
38.	Kabupaten Kediri	Kecamatan Badas	4,33	A-	Dinas Sosial	4,35	A-	UOBK RSUD Simpang Lima Gumul Kediri	4,34	A-	4,34	A-
39.	Kota Salatiga	Kecamatan Sidomukti	4,07	A-	Dinas Sosial	4,46	A-	RSUD Kota Salatiga	4,47	A-	4,33	A-
40.	Kabupaten Pesisir Selatan	Kecamatan Batang Kapas	4,19	A-	Dinas Sosial	4,49	A-	RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	4,31	A-	4,33	A-
41.	Kabupaten Garut	Kecamatan Garut Kota	4,21	A-	Dinas Sosial	4,45	A-	RSUD dr. Slamet Garut	4,3	A-	4,32	A-
42.	Kota Mataram	Kecamatan Ampenan	4,24	A-	Dinas Sosial	4,2	A-	RSUD Kota Mataram	4,49	A-	4,31	A-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
43.	Kabupaten Sukabumi	Kecamatan palabuhanratu	4,17	A-	Dinas Sosial	4,28	A-	RSUD Sekarwangi	4,48	A-	4,31	A-
44.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Kecamatan Buay Madang Timur	4,12	A-	Dinas Sosial	4,16	A-	RSUD Ogan Komering Ulu Timur	4,64	A	4,31	A-
45.	Kabupaten Musi Banyuasin	Kecamatan Sekayu	3,96	B	Dinas Sosial	4,38	A-	RSUD Sekayu	4,57	A	4,30	A-
46.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kecamatan Kebayoran Lama	4,3	A-	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	3,86	B	RSUD Pasar Minggu	4,74	A	4,30	A-
47.	Kabupaten Tapin	Kecamatan Binuang	4,30	A-	Dinas Sosial	4,16	A-	RSUD Datu Sanggul	4,42	A-	4,29	A-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
48.	Kabupaten Madiun	Kecamatan Dolopo	4,66	A	Dinas Sosial	3,44	B-	RSUD Dolopo	4,76	A	4,29	A-
49.	Kota Tomohon	Kecamatan Tomohon Barat	4,32	A-	Dinas Sosial	4,08	A-	RSUD Anugerah Tomohon	4,45	A-	4,28	A-
50.	Kabupaten Bekasi	Kecamatan Cikarang Barat	4,34	A-	Dinas Sosial	3,82	B	RSUD Kabupaten Bekasi	4,69	A	4,28	A-
51.	Kota Sukabumi	Kecamatan Citamiang	4,1	A-	Dinas Sosial	4,24	A-	UOBK RSUD R. Syamsudin, SH	4,49	A-	4,28	A-
52.	Kota Banjarmasin	Kecamatan Banjarmasin Utara	4,17	A-	Dinas Sosial	4,4	A-	RSUD Sultan Suriansyah	4,25	A-	4,27	A-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
53.	Kabupaten Jepara	Kecamatan Tahunan	4,26	A-	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4,15	A-	RSUD R.A. Kartini	4,4	A-	4,27	A-
54.	Kabupaten Mojokerto	Kecamatan Puri	4,21	A-	Dinas Sosial	4,23	A-	RSUD R.A Basoeni	4,36	A-	4,27	A-
55.	Kabupaten Kulon Progo	Kapanewon Nanggulan	4,13	A-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,28	A-	RSUD Wates	4,38	A-	4,26	A-
56.	Kabupaten Demak	Kecamatan Mranggen	4,23	A-	Dinas Sosial	4,02	A-	RSUD Sunan Kalijaga	4,53	A	4,26	A-
57.	Kota Tangerang	Kecamatan Benda	4,28	A-	Dinas Sosial	4,09	A-	RSUD Kota Tangerang	4,41	A-	4,26	A-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
58.	Kabupaten Jombang	Kecamatan Mojoagung	4,06	A-	Dinas Sosial	4,25	A-	RSUD Kabupaten Jombang	4,47	A-	4,26	A-
59.	Kabupaten Tabalong	Kecamatan Tanjung	3,97	B	Dinas Sosial	4,4	A-	RSUD H. Badaruddin Kasim	4,38	A-	4,25	A-
60.	Kabupaten Tulungagung	Kecamatan Tulungagung	4,04	A-	Dinas Sosial	4,15	A-	UOBK RSUD Dr Iskak Tulungagung	4,56	A	4,25	A-
61.	Kabupaten Pasuruan	Kecamatan Sukorejo	4,18	A-	Dinas Sosial	4,12	A-	UOBK RSUD BANGIL	4,45	A-	4,25	A-
62.	Kota Bandung	Kecamatan Kiaracondong	4,11	A-	Dinas Sosial	4,43	A-	RSUD Bandung Kiwari	4,21	A-	4,25	A-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
63.	Kabupaten Tanah Datar	Kecamatan Lima Kaum	4,21	A-	Dinas Sosial	4,22	A-	RSUD M. Ali Hanafiah SM Batusangkar	4,31	A-	4,25	A-
64.	Kabupaten Grobogan	Kecamatan Klambu	4,27	A-	Dinas Sosial	4,06	A-	RSUD dr. R. Soedjati Soemodiardjo	4,4	A-	4,24	A-
65.	Kabupaten Kutai Kartanegara	Kecamatan Anggana	4,18	A-	Dinas Sosial	4,3	A-	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	4,24	A-	4,24	A-
66.	Kota Singkawang	Kecamatan Singkawang Tengah	4,02	A-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,3	A-	RSUD dr. Abdul Aziz	4,35	A-	4,22	A-
67.	Kabupaten Magetan	Kecamatan Magetan	3,99	B	Dinas Sosial	4,26	A-	RSUD dr. Sayidiman Magetan	4,41	A-	4,22	A-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
68.	Kabupaten Agam	Kecamatan Ampek Angkek	4,15	A-	Dinas Sosial	4,18	A-	RSUD Lubuk Basung	4,33	A-	4,22	A-
69.	Kota Mojokerto	Kecamatan Magersari	4,35	A-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,84	B	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo	4,46	A-	4,22	A-
70.	Kabupaten Muara Enim	Kecamatan Ujan Mas	3,91	B	Dinas Sosial	4,11	A-	RSUD Dr. H. Mohamad Rabain	4,6	A	4,21	A-
71.	Kabupaten Tegal	Kecamatan Slawi	3,98	B	Dinas Sosial	4,15	A-	RSUD dr. Soeselo	4,48	A-	4,20	A-
72.	Kabupaten Kudus	Kecamatan Jati	3,90	B	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian	4,14	A-	RSUD dr. Loekmono Hadi	4,55	A	4,20	A-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
					Penduduk dan Keluarga Berencana							
73.	Kabupaten Subang	Kecamatan jalancagak	4,02	A-	Dinas Sosial	4,12	A-	RSUD Subang	4,45	A-	4,20	A-
74.	Kabupaten Musi Rawas	Kecamatan Tuah Negeri	4,39	A-	Dinas Sosial	3,81	B	Rumah Sakit Dr. Sobirin	4,39	A-	4,20	A-
75.	Kabupaten Sumedang	Kecamatan sumedang selatan	4,07	A-	Dinas Sosial	4,11	A-	RSUD Kabupaten Sumedang	4,4	A-	4,19	A-
76.	Kota Bitung	Kecamatan Matuari	4,25	A-	Dinas Sosial	4,28	A-	RSUD Pratama Kota Bitung	4,02	A-	4,18	A-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
77.	Kota Cimahi	Kecamatan Cimahi Tengah	4,29	A-	Dinas Sosial	4,12	A-	RSUD Cibabat Kota Cimahi	4,09	A-	4,17	A-
78.	Kabupaten Lima Puluh Kota	Kecamatan Harau	3,73	B	Dinas Sosial	4,44	A-	RSUD dr. Achmad Darwis	4,31	A-	4,16	A-
79.	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kecamatan Grogol Petamburan	4,35	A-	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Barat	4,29	A-	RSUD Cengkareng	3,84	B	4,16	A-
80.	Kabupaten Ogan Ilir	Kecamatan Indralaya Selatan	4,06	A-	Dinas Sosial	3,99	B	RSUD Kabupaten Ogan Ilir	4,41	A-	4,15	A-
81.	Kota Pasuruan	Kecamatan Panggungrejo	4,18	A-	Dinas Sosial	3,98	B	RSUD dr. R. Soedarsono	4,28	A-	4,15	A-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
82.	Kota Manado	Kecamatan Mapanget	4,06	A-	Dinas Sosial	3,93	B	RSUD Kota Manado	4,4	A-	4,13	A-
83.	Kota Padang	Kecamatan Nanggalo	4,48	A-	Dinas Sosial	3,67	B	RSUD dr. Rasidin Padang	4,21	A-	4,12	A-
84.	Kabupaten Banjarnegara	Kecamatan Wanayasa	3,57	B	Dinas Sosial	4,3	A-	RSUD Hj. Anna Lasmanah	4,48	A-	4,12	A-
85.	Kota Bontang	Kecamatan Bontang Utara	3,7	B	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	4,2	A-	RSUD Taman Husada	4,44	A-	4,11	A-
86.	Kabupaten Bireuen	Kecamatan Kuala	3,72	B	Dinas Sosial	4,21	A-	RSUD dr. Fauziah Bireuen	4,4	A-	4,11	A-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
87.	Kabupaten Tanah Laut	Kecamatan Pelaihari	3,44	B-	Dinas Sosial	4,33	A-	RSUD Hadji Boejasin	4,54	A	4,10	A-
88.	Kabupaten Nganjuk	Kecamatan Pace	3,87	B	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,08	A-	RSD Nganjuk	4,35	A-	4,10	A-
89.	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kecamatan Ciracas	4,26	A-	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	4,14	A-	RSKD Duren Sawit	3,9	B	4,10	A-
90.	Kota Tegal	Kecamatan Tegal Timur	4,20	A-	Dinas Sosial	3,71	B	RSUD Kardinah	4,37	A-	4,09	A-
91.	Kabupaten Trenggalek	Kecamatan Tugu	3,78	B	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,23	A-	RSUD dr. Soedomo	4,27	A-	4,09	A-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
92.	Kota Pariaman	Kecamatan Pariaman Tengah	3,94	B	Dinas Sosial	4,1	A-	RSUD dr. Sadikin Pariaman	4,24	A-	4,09	A-
93.	Kabupaten Solok	Kecamatan Kubung	3,72	B	Dinas Sosial	4,25	A-	RSUD Arosuka	4,3	A-	4,09	A-
94.	Kabupaten Ketapang	Kecamatan Delta Pawan	4,13	A-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	4,01	A-	RSUD dr. Agoesdjam	4,13	A-	4,09	A-
95.	Kota Pontianak	Kecamatan Pontianak Utara	3,53	B	Dinas Sosial	4,47	A-	RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie	4,26	A-	4,09	A-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
96.	Kabupaten Bima	Kecamatan Bolo	4,04	A-	Dinas Sosial	4,28	A-	RSUD Bima	3,94	B	4,09	A-
97.	Kabupaten Pohnuato	Kecamatan Randangan	4,35	A-	Dinas Sosial	4,08	A-	RSUD Bumi Panua	3,83	B	4,09	A-
98.	Kabupaten Tangerang	Kecamatan Kelapa Dua	4,33	A-	Dinas Sosial	4,16	A-	RSUD Balaraja	3,76	B	4,08	A-
99.	Kabupaten Aceh Singkil	Kecamatan Singkohor	3,79	B	Dinas Sosial	4,1	A-	RSUD Aceh Singkil	4,33	A-	4,07	A-
100.	Kabupaten Batang	Kecamatan Batang	3,34	B-	Dinas Sosial	4,45	A-	RSUD Batang	4,42	A-	4,07	A-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
101.	Kabupaten Pangandaran	Kecamatan Cijulang	4,24	A-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,6	B	RSUD Pandega Pangandaran	4,36	A-	4,07	A-
102.	Kabupaten Sragen	Kecamatan Sragen	3,71	B	Dinas Sosial	4,11	A-	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro	4,35	A-	4,06	A-
103.	Kabupaten Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	3,94	B	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,76	B	RSUD KRT. Setjonegoro	4,46	A-	4,05	A-
104.	Kabupaten Klungkung	Kecamatan Banjarangkan	3,84	B	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak	4	B	RSUD Kabupaten Klungkung	4,31	A-	4,05	A-
105.	Kota Blitar	Kecamatan Kepanjenkidul	3,72	B	Dinas Sosial	4,28	A-	RSUD Mardi Waluyo	4,15	A-	4,05	A-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
106.	Kabupaten Semarang	Kecamatan Tengaran	4,01	A-	Dinas Sosial	3,75	B	RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo	4,38	A-	4,05	A-
107.	Kota Padangsidimpuan	Kecamatan Padangsidimpuan utara	3,91	B	Dinas Sosial	3,98	B	RSUD Kota Padangsidimpuan	4,24	A-	4,04	A-
108.	Kabupaten Lamongan	Kecamatan Brondong	4,2	A-	Dinas Sosial	3,79	B	RSUD Ngimbang	4,13	A-	4,04	A-
109.	Kabupaten Cianjur	Kecamatan Sindangbarang	3,29	B-	Dinas Sosial	4,34	A-	RSUD Cimacan	4,48	A-	4,04	A-
110.	Kabupaten Lampung Tengah	Kecamatan Gunung Sugih	3,93	B	Dinas Sosial	3,94	B	RSUD Demang Sepulau Raya	4,24	A-	4,04	A-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
111.	Kota Pekanbaru	Kecamatan Bukitraya	3,87	B	Dinas Sosial	3,76	B	RSD Madani	4,47	A-	4,03	A-
112.	Kota Samarinda	Kecamatan Samarinda	4,37	A-	Dinas Sosial	3,23	B-	RSUD Inche Abdoel Moeis	4,47	A-	4,02	A-
113.	Kabupaten Balangan	Kecamatan Juai	3,96	B	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak	3,72	B	RSUD Kabupaten Balangan	4,35	A-	4,01	A-
114.	Kabupaten Barru	Kecamatan Barru	3,68	B	Dinas Sosial	4,14	A-	RSUD La Patarai	4,21	A-	4,01	A-
115.	Kabupaten Boyolali	Kecamatan Banyudono	4,06	A-	Dinas Sosial	3,38	B-	RSUD Pandan Arang Boyolali	4,58	A	4,01	A-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
116.	Kabupaten Bandung	Kecamatan Baleendah	4,11	A-	Dinas Sosial	4,05	A-	RSUD Oto Iskandar Di Nata	3,83	B	4,00	B
117.	Kabupaten Wonogiri	Kecamatan Slogohimo	3,71	B	Dinas Sosial	3,88	B	RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso	4,39	A-	3,99	B
118.	Kabupaten Ponorogo	Kecamatan Ponorogo	3,74	B	Dinas Sosial	3,95	B	RSUD dr. Harjono S Ponorogo	4,28	A-	3,99	B
119.	Kabupaten Bangka Selatan	Kecamatan Toboali	3,87	B	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,95	B	RSUD Kabupaten Bangka Selatan	4,12	A-	3,98	B
120.	Kabupaten Kuantan Singingi	Kecamatan Gunung Toar	3,9	B	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat	3,76	B	RSUD Teluk Kuantan	4,25	A-	3,97	B

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
121.	Kota Tanjungpinang	Kecamatan Tanjungpinang Barat	3,89	B	Dinas Sosial	3,98	B	RSUD Kota Tanjungpinang	4,01	A-	3,96	B
122.	Kabupaten Pekalongan	Kecamatan Wiradesa	3,54	B	Dinas Sosial	4	B	RSUD KAJEN	4,32	A-	3,95	B
123.	Kabupaten Karawang	Kecamatan Karawang Barat	3,73	B	Dinas Sosial	3,71	B	RSUD Kabupaten Karawang	4,41	A-	3,95	B
124.	Kabupaten Purbalingga	Kecamatan Kutasari	3,81	B	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,66	B	RSUD dr. R. Goeteng Taronadibrata	4,36	A-	3,94	B

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
125.	Kabupaten Lebak	Kecamatan Kalanganyar	3,72	B	Dinas Sosial	4	B	RSUD Dr. Adjidarmo	4,09	A-	3,94	B
126.	Kabupaten Bolaang Mongondow	Kecamatan Bolaang	3,98	B	Dinas Sosial	3,71	B	RSUD Datoe Binangkang	4,11	A-	3,93	B
127.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Kecamatan Baturaja Timur	3,33	B-	Dinas Sosial	3,75	B	RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja	4,68	A	3,92	B
128.	Kabupaten Pakpak Bharat	Kecamatan Salak	3,52	B	Dinas Sosial	4,02	A-	RSUD Salak	4,21	A-	3,92	B
129.	Kabupaten Paser	Kecamatan Tanah Grogot	3,38	B-	Dinas Sosial	3,92	B	RSUD Panglima Sebaya	4,43	A-	3,91	B

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
130.	Kabupaten Malang	Kecamatan Kepanjen	3,95	B	Dinas Sosial	3,62	B	RSUD Kanjuruhan	4,16	A-	3,91	B
131.	Kota Tangerang Selatan	Kecamatan Ciputat Timur	3,93	B	Dinas Sosial	3,92	B	RSUD Kota Tangerang Selatan	3,85	B	3,90	B
132.	Kota Jambi	Kecamatan Paal Merah	3,86	B	Dinas Sosial	3,71	B	RSUD H. Abdul Manap	4,12	A-	3,90	B
133.	Kabupaten Probolinggo	Kecamatan Leces	3,81	B	Dinas Sosial	3,79	B	UOBK RSUD Waluyo Jati	4,08	A-	3,89	B
134.	Kabupaten Belitung	Kecamatan Badau	3,59	B	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,9	B	RSUD Dr. H. Marsidi Judono	4,18	A-	3,89	B

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
135.	Kabupaten Barito Kuala	Kecamatan Anjir Muara	3,83	B	Dinas Sosial	3,95	B	RSUD H. Abdul Aziz	3,86	B	3,88	B
136.	Kabupaten Padang Pariaman	Kecamatan Lubuk Alung	2,89	C	Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	4,11	A-	RSUD Padang Pariaman	4,63	A	3,88	B
137.	Kabupaten Indramayu	Kecamatan Kedokanbunder	3,29	B-	Dinas Sosial	3,86	B	RSUD Indramayu	4,48	A-	3,88	B
138.	Kabupaten Buleleng	Kecamatan Tejakula	3,46	B-	Dinas Sosial	4,02	A-	RSUD Kabupaten Buleleng	4,15	A-	3,88	B
139.	Kabupaten Majalengka	Kecamatan Ligung	2,9	C	Dinas Sosial	4,39	A-	RSUD Cideres	4,32	A-	3,87	B

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
140.	Kota Depok	Kecamatan Beji	3,12	B-	Dinas Sosial	4,02	A-	RSUD Khidmat Sehat Afiat	4,46	A-	3,87	B
141.	Kabupaten Ngawi	Kecamatan Ngawi	3,36	B-	Dinas Sosial	3,77	B	RSUD dr. Soeroto	4,46	A-	3,86	B
142.	Kabupaten Pamekasan	Kecamatan Pamekasan	4,31	A-	Dinas Sosial	3,16	B-	RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan	4,12	A-	3,86	B
143.	Kabupaten Dharmasraya	Kecamatan Koto Besar	3,65	B	Dinas Sosial	4,27	A-	RSUD Sungai Rumbai	3,65	B	3,86	B
144.	Kabupaten Lampung Utara	Kecamatan Bukit Kemuning	3,52	B	Dinas Sosial	3,92	B	RSUD HM Ryacudu	4,12	A-	3,85	B

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
145.	Kabupaten Bintan	Kecamatan Gunung Kijang	3,97	B	Dinas Sosial	3,8	B	RSUD Kabupaten Bintan	3,78	B	3,85	B
146.	Kabupaten Bangkalan	Kecamatan Tanah Merah	3,25	B-	Dinas Sosial	3,79	B	UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu	4,5	A-	3,85	B
147.	Kabupaten Banyuasin	Kecamatan Talang Kelapa	3,41	B-	Dinas Sosial	4	B	RSUD Banyuasin	4,13	A-	3,85	B
148.	Kabupaten Gianyar	Kecamatan Gianyar	3,23	B-	Dinas Sosial	3,85	B	RSUD Sanjiwani	4,45	A-	3,84	B
149.	Kabupaten Simalungun	Kecamatan Tapian Dolok	3,78	B	Dinas Sosial	3,65	B	RSUD Tuan Rondahaim	4,1	A-	3,84	B

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
150.	Kabupaten Lombok Barat	Kecamatan Narmada	3,57	B	Dinas Sosial	4	B	RSUD Patut Patuh Patju	3,95	B	3,84	B
151.	Kota Padang Panjang	Kecamatan Padang Panjang Barat	3,61	B	Dinas Sosial	3,67	B	Kecamatan Padang Panjang Barat	4,22	A-	3,83	B
152.	Kota Medan	Kecamatan Medan Johor	3,76	B	Dinas Sosial	3,54	B	RSUD Dr. Pirngadi	4,2	A-	3,83	B
153.	Kabupaten Sijunjung	Kecamatan Sijunjung	3,47	B-	Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	3,57	B	RSUD Sijunjung	4,45	A-	3,83	B
154.	Kabupaten Serdang Bedagai	Kecamatan Perbaungan	3,45	B-	Dinas Sosial	4,45	A-	RSUD Sultan Sulaiman	3,58	B	3,83	B

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
155.	Kabupaten Cirebon	Kecamatan Sumber	3,13	B-	Dinas Sosial	3,96	B	RSUD Waled	4,38	A-	3,82	B
156.	Kabupaten Aceh Tenggara	Kecamatan Babussalam	4,43	A-	Dinas Sosial	3,33	B-	RSUD H. Sahudin Kutacane	3,68	B	3,81	B
157.	Kabupaten Bengkulu	Kecamatan Bengkulu	3,7	B	Dinas Sosial	3,8	B	RSUD Kabupaten Bengkulu	3,93	B	3,81	B
158.	Kota Metro	Kecamatan Metrotimur	3,72	B	Dinas Sosial Kota Metro	3,39	B-	UPTD RSUD Jenderal Ahmad Yani	4,31	A-	3,81	B
159.	Kota Tanjungbalai	Kecamatan Datuk Bandar	3,99	B	Dinas Sosial	3,63	B	RSUD Dr. Tengku Mansyur	3,8	B	3,81	B

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
160.	Kota Probolinggo	Kecamatan Kademangan	3,96	B	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,69	B	RSUD Dokter Mohamad Saleh	3,77	B	3,81	B
161.	Kabupaten Kampar	Kecamatan XIII Koto Kampar	3,69	B	Dinas Sosial	3,87	B	RSUD Bangkinang	3,85	B	3,80	B
162.	Kabupaten Langkat	Kecamatan Stabat	3,98	B	Dinas Sosial	3,83	B	RSUD Tanjung Pura	3,6	B	3,80	B
163.	Kabupaten Soppeng	Kecamatan Lalabata	3,65	B	Dinas Sosial	3,76	B	RSUD Temmamala	3,98	B	3,80	B
164.	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Kecamatan Bolaang Uki	4,06	A-	Dinas Sosial	3,42	B-	RSUD Bolaang Mongondow Selatan	3,88	B	3,79	B

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
165.	Kota Cirebon	Kecamatan Kejaksan	2,86	C	Dinas Sosial	4,48	A-	RSD Gunung Jati Kota Cirebon	4,01	A-	3,78	B
166.	Kabupaten Sampang	Kecamatan Ketapang	3,64	B	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,51	B	RSUD dr. Mohammad Zyn	4,19	A-	3,78	B
167.	Kabupaten Bangka Tengah	Kecamatan Simpangkatis	3,45	B-	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,98	B	RSUD Drs. H. Abu Hanifah	3,91	B	3,78	B
168.	Kota Kotamobagu	Kecamatan Kotamobagu Barat	3,03	B-	Dinas Sosial	4,01	A-	RSUD Kota Kotamobagu	4,3	A-	3,78	B
169.	Kabupaten Sintang	Kecamatan Tempunak	3,62	B	Dinas Sosial	3,51	B	RSUD Ade Muhammad Djoen	4,2	A-	3,78	B

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
170.	Kabupaten Bangka	Kecamatan Sungailiat	3,34	B-	Dinas Sosial	3,92	B	RSUD DR. Eko Maulana Ali	4,07	A-	3,78	B
171.	Kabupaten Minahasa Utara	Kecamatan Airmadidi	3,27	B-	Dinas Sosial	3,7	B	RSUD Maria Walanda Maramis	4,31	A-	3,76	B
172.	Kabupaten Bulukumba	Kecamatan Ujung Loe	3,57	B	Dinas Sosial	3,85	B	RSUD H. Andi Sulthan Dg Radja	3,86	B	3,76	B
173.	Kabupaten Indragiri Hilir	Kecamatan Tembilahan	3,24	B-	Dinas Sosial	3,84	B	RSUD Puri Husada	4,18	A-	3,75	B
174.	Kabupaten Padang Lawas Utara	Kecamatan Batang Onang	3,05	B-	Dinas Sosial	4,05	A-	RSUD Gunungtua	4,15	A-	3,75	B

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
175.	Kota Pangkalpinang	Kecamatan Girimaya	3,21	B-	Dinas Sosial	3,96	B	RSUD Depati Hamzah	4,07	A-	3,75	B
176.	Kabupaten Merangin	Kecamatan Tabir Selatan	3,4	B-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,85	B	RSD Kolonel Abunjani Bangko	3,99	B	3,75	B
177.	Kota Bima	Kecamatan Rasanae	3,31	B-	Dinas Sosial	3,91	B	RSUD Kota Bima	3,97	B	3,73	B
178.	Kabupaten Sinjai	Kecamatan Sinjai Timur	2,94	C	Dinas Sosial	3,85	B	RSUD Sinjai	4,4	A-	3,73	B
179.	Kabupaten Lombok Tengah	Kecamatan Pringgarata	3,68	B	Dinas Sosial	3,49	B-	RSUD Praya	4	B	3,72	B

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
180.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Kecamatan Kuala Jambi	3,36	B-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,9	B	RSUD Nurdin Hamzah	3,91	B	3,72	B
181.	Kabupaten Serang	Kecamatan Waringinkurung	3,19	B-	Dinas Sosial	3,99	B	RSUD Dr. Dradjat Prawiranegara	3,97	B	3,72	B
182.	Kabupaten Tabanan	Kecamatan Selemadeg	3,27	B-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak	3,53	B	RSUD Kabupaten	4,35	A-	3,72	B
183.	Kabupaten Bondowoso	Kecamatan Bondowoso	2,69	C	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4,05	A-	RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso	4,39	A-	3,71	B

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
184.	Kota Banda Aceh	Kecamatan Meuraxa	3,44	B-	Dinas Sosial	3,21	B-	RSUD Meuraxa	4,47	A-	3,71	B
185.	Kabupaten Bone Bolango	Kecamatan Kabila	3,3	B-	Dinas Sosial	3,43	B-	RSUD Toto Kabila	4,33	A-	3,69	B
186.	Kota Pematang Siantar	Kecamatan Siantar Utara	3,88	B	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,9	B	RSUD dr. Djasamen Saragih	3,27	B-	3,68	B
187.	Kabupaten Nias Utara	Kecamatan Lotu	3,72	B	Dinas Sosial	3,66	B	Rumah Sakit Pratama kab. Nias Utara	3,67	B	3,68	B
188.	Kabupaten Brebes	Kecamatan Brebes	3,17	B-	Dinas Sosial	3,93	B	RSUD Brebes	3,94	B	3,68	B

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
189.	Kabupaten Ciamis	Kecamatan Rancah	3,69	B	Dinas Sosial	3,86	B	RSUD Kabupaten Ciamis	3,47	B-	3,67	B
190.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kecamatan Kandangan	3,01	B-	Dinas Sosial	3,15	B-	RSUD Brigjend. H. Hasan Basry	4,85	A	3,67	B
191.	Kabupaten Tasikmalaya	Kecamatan Sukaresik	3,07	B-	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,71	B	RSUD Singaparna Medika Citrautama	4,22	A-	3,67	B
192.	Kabupaten Pacitan	Kecamatan Pringkuku	3,11	B-	Dinas Sosial	3,81	B	RSUD dr Darsono	4,06	A-	3,66	B

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
193.	Kabupaten Kubu Raya	Kecamatan Rasau Jaya	3,29	B-	Dinas Sosial	3,77	B	RSUD Kubu Raya	3,91	B	3,66	B
194.	Kota Batu	Kecamatan Bumiaji	3,64	B	Dinas Sosial	3,66	B	-	-	-	3,65	B
195.	Kota Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	3,94	B	Dinas Sosial	3,67	B	RSUD Dr. H. Kumpulan Pane	3,35	B-	3,65	B
196.	Kabupaten Luwu Utara	Kecamatan Masamba	3,82	B	Dinas Sosial	3,26	B-	RSUD Andi Djemma	3,87	B	3,65	B
197.	Kabupaten Belitung Timur	Kecamatan Manggar	3,74	B	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,39	B-	RSUD Muhammad Zein	3,81	B	3,65	B

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
198.	Kota Serang	Kecamatan Kasemen	3,35	B-	Dinas Sosial	3,6	B	RSUD Kota Serang	3,99	B	3,65	B
199.	Kabupaten Temanggung	Kecamatan Temanggung	3,31	B-	Dinas Sosial	3,98	B	RSUD Kab Temanggung	3,65	B	3,65	B
200.	Kabupaten Karangasem	Kecamatan Karangasem	3,78	B	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak	3,48	B-	RSUD Kabupaten Karangasem	3,67	B	3,64	B
201.	Kabupaten Aceh Tamiang	Kecamatan Karang Baru	2,98	C	Dinas Sosial	3,64	B	RSUD Aceh Tamiang	4,3	A-	3,64	B
202.	Kota Makassar	Kecamatan Tamalate	3,09	B-	Dinas Sosial	3,63	B	RSUD Daya Kota Makassar	4,19	A-	3,64	B

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
203.	Kota Prabumulih	Kecamatan Prabumulih Utara	2,79	C	Dinas Sosial	4,24	A-	RSUD Kota Prabumulih	3,88	B	3,64	B
204.	Kabupaten Tulang Bawang	Kecamatan Menggala	3,31	B-	Dinas Sosial	3,77	B	RSUD Menggala	3,8	B	3,63	B
205.	Kabupaten Pandeglang	Kecamatan Pandeglang	3,23	B-	Dinas Sosial	3,53	B	RSUD Kabupaten Pandeglang	4,11	A-	3,62	B
206.	Kabupaten Minahasa Selatan	Kecamatan Kumelembuai	2,56	C	Dinas Sosial	4,33	A-	RSUD Amurang	3,98	B	3,62	B
207.	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Kecamatan Kaidipang	3,12	B-	Dinas Sosial	3,75	B	RSUD Bolaang Mongondow Utara	3,95	B	3,61	B

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
208.	Kabupaten Raja Ampat	Distrik Waisai Kota	3,31	B-	Dinas Sosial	3,74	B	RSUD Kabupaten Raja Ampat	3,77	B	3,61	B
209.	Kabupaten Sumenep	Kecamatan Kota Sumenep	3,48	B-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,32	B-	RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep	3,99	B	3,60	B
210.	Kabupaten Purworejo	Kecamatan Ngombol	3,45	B-	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3,54	B	RSUD dr. Tjitrowardojo	3,78	B	3,59	B
211.	Kabupaten Magelang	Kecamatan Borobudur	3,15	B-	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,15	B-	RSUD Muntilan	4,46	A-	3,59	B

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
212.	Kabupaten Jenepono	Kecamatan Binamu	2,80	C	Dinas Sosial	3,73	B	RSUD Lanto Dg. Pasewang	4,2	A-	3,58	B
213.	Kabupaten Lumajang	Kecamatan Lumajang	3,02	B-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,45	B-	RSUD dr. Haryoto	4,25	A-	3,57	B
214.	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Kecamatan Kota Kayuagung	2,96	C	Dinas Sosial	3,57	B	RSUD Kayuagung	4,19	A-	3,57	B
215.	Kabupaten Solok Selatan	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	3,56	B	Dinas Sosial	3,33	B-	RSUD Solok Selatan	3,82	B	3,57	B
216.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kecamatan Tebing Tinggi	3,49	B-	Dinas Sosial	3,33	B-	RSUD K.H. Daud Arif	3,87	B	3,56	B

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
217.	Kota Sawahlunto	Kecamatan Lembah Segar	3,16	B-	Dinas Sosial	3,05	B-	RSUD Sawahlunto	4,47	A-	3,56	B
218.	Kabupaten Pati	Kecamatan Margorejo	3,90	B	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2,45	C-	RSUD RAA Soewondo	4,33	A-	3,56	B
219.	Kabupaten Kolaka	Kecamatan Kolaka	2,78	C	Dinas Sosial	3,96	B	RSUD Benyamin Guluh	3,94	B	3,56	B
220.	Kabupaten Musi Rawas Utara	Kecamatan Nibung	2,89	C	Dinas Sosial	3,6	B	RSUDrupit	4,15	A-	3,55	B

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
221.	Kabupaten Kayong Utara	Kecamatan Sukadana	3,41	B-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,42	B-	RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I	3,81	B	3,55	B
222.	Kabupaten Purwakarta	Kecamatan Darangdan	3,48	B-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,83	B	RSUD Bayu Asih	3,32	B-	3,54	B
223.	Kabupaten Kutai Barat	Kecamatan Melak	3,07	B-	Dinas Sosial	3,58	B	RSUD Harapan Insan Sendawar	3,94	B	3,53	B
224.	Kabupaten Empat Lawang	Kecamatan Tebing Tinggi	2,25	C-	Dinas Sosial	3,69	B	RSUD Kabupaten Empat Lawang	4,64	A	3,53	B

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
225.	Kabupaten Tapanuli Selatan	Kecamatan Batangtoru	3,78	B	Dinas Sosial	3,66	B	RSUD Kab. Tapanuli	3,13	B-	3,52	B
226.	Kabupaten Kotawaringin Timur	Kecamatan Kota Besi	3,33	B-	Dinas Sosial	3,48	B-	RSUD DR Murjani	3,72	B	3,51	B
227.	Kabupaten Bojonegoro	Kecamatan Baureno	3,46	B-	Dinas Sosial	3,99	B	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	3,08	B-	3,51	B
228.	Kabupaten Lingga	Kecamatan Singkep	3,93	B	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak	2,8	C	RSUD Dabo	3,75	B	3,49	B-
229.	Kabupaten Bulungan	Kecamatan Tanjung Selor	3,71	B	Dinas Sosial	3,38	B-	RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	3,39	B-	3,49	B-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
230.	Kabupaten Bangli	Kecamatan Bangli	2,84	C	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak	3,74	B	RSUD Bangli	3,89	B	3,49	B-
231.	Kota Ambon	Kecamatan Sirimau	3,48	B-	Dinas Sosial	3,5	B-	-	-	-	3,49	B-
232.	Kota Malang	Kecamatan Klojen	3,15	B-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3,54	B	RSUD Kota Malang	3,77	B	3,49	B-
233.	Kabupaten Polewali Mandar	Kecamatan Polewali Mandar	2,5	C-	Dinas Sosial	3,61	B	RSUD Hj. Andi Depu	4,35	A-	3,49	B-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
234.	Kabupaten Gresik	Kecamatan Kebomas	2,44	C-	Dinas Sosial	3,64	B	RSUD Ibnu Sina	4,37	A-	3,48	B-
235.	Kabupaten Deli Serdang	Kecamatan Galang	2,88	C	Dinas Sosial	3,58	B	RSUD Drs. H. Amri Tambunan	3,99	B	3,48	B-
236.	Kota Tasikmalaya	Kecamatan Cibeureum	3,04	B-	Dinas Sosial	3,91	B	RSUD DR Soekardjo Kota Tasikmalaya	3,46	B-	3,47	B-
237.	Kabupaten Tuban	Kecamatan Tuban	2,82	C	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,35	B-	RSUD dr. R. Koesma	4,23	A-	3,47	B-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
238.	Kabupaten Banggai Laut	Kecamatan Banggai	3,16	B-	Dinas Sosial	3,23	B-	RSUD Kabupaten Banggai Laut	4,01	A-	3,47	B-
239.	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Kecamatan Tahuna	3,25	B-	Dinas Sosial	3,17	B-	RSD Liun Kendage Tahuna	3,98	B	3,47	B-
240.	Kabupaten Banjar	Kecamatan Hanyar	3,36	B-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	3,02	B-	RSUD Ratu Zalecha	4	B	3,46	B-
241.	Kabupaten Blitar	Kecamatan Wlingi	2,83	C	Dinas Sosial	3,9	B	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi	3,64	B	3,46	B-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
242.	Kabupaten Dompu	Kecamatan Dompu	2,51	C	Dinas Sosial	3,8	B	RSUD Kab. Dompu	4,06	A-	3,46	B-
243.	Kabupaten Penajam Paser Utara	Kecamatan Waru	3,72	B	Dinas Sosial	3,28	B-	RSUD Ratu Aji Putri Botung	3,34	B-	3,45	B-
244.	Kota Subulussalam	Kecamatan Simpang Kiri	2,71	C	Dinas Sosial	3,56	B	RSUD Kota Subulussalam	4,06	A-	3,44	B-
245.	Kabupaten Tapanuli Utara	Kecamatan Tarutung	3,5	B-	Dinas Sosial	3,01	B-	RSUD Tarutung	3,77	B	3,43	B-
246.	Kabupaten Nias	Kecamatan Gido	3,6	B	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	3,49	B-	RSUD dr. M. Thomsen Nias	3,18	B-	3,42	B-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
247.	Kabupaten Kapuas Hulu	Kecamatan Putussibau Utara	3,57	B	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,96	B	RSUD dr. Achmad Diponegoro	2,73	C	3,42	B-
248.	Kabupaten Batanghari	Kecamatan Muara Bulan	3,03	B-	Dinas Sosial	3,31	B-	RSUD Abdoel Madjid Batoe	3,9	B	3,41	B-
249.	Kota Lubuklinggau	Kecamatan Lubuklinggau Timur I	2,38	C-	Dinas Sosial	3,38	B-	RSUD Siti Aisyah	4,47	A-	3,41	B-
250.	Kabupaten Aceh Barat	Kecamatan Johan Pahlawan	3,43	B-	Dinas Sosial	3,46	B-	RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh	3,34	B-	3,41	B-
251.	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)	Kecamatan Siau Timur	2,77	C	Dinas Sosial	3,75	B	RSUD Tagulandang	3,7	B	3,41	B-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
252.	Kabupaten Way Kanan	Kecamatan Blambangan Umpu	2,83	C	Dinas Sosial	3,79	B	UPT RSUD Zainal Abidin Pagaram	3,6	B	3,41	B-
253.	Kota Bengkulu	Kecamatan Muara Bangkahulu	3,15	B-	Dinas Sosial	2,53	C	RSUD Harapan dan Doa Kota Bengkulu	4,5	A-	3,39	B-
254.	Kota Bandar Lampung	Kecamatan Tanjungkarang Pusat	2,41	C-	Dinas Sosial	3,54	B	Rumah Sakit Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo	4,23	A-	3,39	B-
255.	Kabupaten Rokan Hilir	Kecamatan Bangko	2,74	C	Dinas Sosial	3,18	B-	RSUD dr. RM Pratomo Bagansiapiapi	4,2	A-	3,37	B-
256.	Kabupaten Sanggau	Kecamatan Kembayan	2,45	C-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga	3,61	B	RSUD M.Th. Djaman	4,06	A-	3,37	B-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
					Berencana							
257.	Kabupaten Kotawaringin Barat	Kecamatan Arut Selatan	2,73	C	Dinas Sosial	3,36	B-	RSUD Sultan Imanuddin	4,02	A-	3,37	B-
258.	Kota Tarakan	Kecamatan Tarakan Utara	3	C	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	3,32	B-	RSU Kota Tarakan	3,75	B	3,36	B-
259.	Kabupaten Bandung Barat	Kecamatan Ngamprah	3,68	B	Dinas Sosial	2,91	C	RSUD Cililin	3,47	B-	3,35	B-
260.	Kabupaten Bungo	Kecamatan Rimbo Tengah	3,46	B-	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,24	B-	RSUD H. Hanafie Muara Bungo	3,35	B-	3,35	B-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
261.	Kota Palangkaraya	Kecamatan Pahandut	2,47	C-	Dinas Sosial	4,19	A-	RSUD Palangka Raya	3,37	B-	3,34	B-
262.	Kabupaten Gowa	Kecamatan Pattallassang	2,73	C	Dinas Sosial	3,24	B-	RSUD Syekh Yusuf	3,99	B	3,32	B-
263.	Kabupaten Lahat	Kecamatan Lahat	2,44	C-	Dinas Sosial	3,28	B-	RSUD Lahat	4,19	A-	3,30	B-
264.	Kabupaten Bone	Kecamatan Tanete Riattang	3,33	B-	Dinas Sosial	2,82	C	RSUD Tenriawaru	3,75	B	3,30	B-
265.	Kabupaten Labuhan Batu	Kecamatan Rantau Utara	3,54	B	Dinas Sosial	2,56	C	RSUD Rantauprapat	3,78	B	3,29	B-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
266.	Kabupaten Pasaman	Kecamatan Bonjol	3,08	B-	Dinas Sosial	3,86	B	RSUD Lubuk Sikaping	2,93	C	3,29	B-
267.	Kota Kupang	Kecamatan Maulafa	2,27	C-	Dinas Sosial	3,54	B	RSUD S.K Lerik Kota Kupang	4,05	A-	3,29	B-
268.	Kabupaten Melawi	Kecamatan Nanga Pinoh	3,52	B	Dinas Sosial	2,39	C-	RSUD Melawi	3,9	B	3,27	B-
269.	Kabupaten Batu Bara	Kecamatan Air Putih	2,68	C	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,27	B-	RSUD Kabupaten Batu Bara	3,86	B	3,27	B-
270.	Kabupaten Takalar	Kecamatan Polongbangkeng Utara	3,19	B-	Dinas Sosial	2,94	C	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	3,68	B	3,27	B-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
271.	Kabupaten Pringsewu	Kecamatan Pringsewu	2,56	C	Dinas Sosial	3,82	B	RSUD Pringsewu	3,43	B-	3,27	B-
272.	Kota Cilegon	Kecamatan Jombang	3,04	B-	Dinas Sosial	3,52	B	RSUD Kota Cilegon	3,21	B-	3,26	B-
273.	Kota Dumai	Kecamatan Dumai Selatan	3,74	B	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2,46	C-	RSUD Kota Dumai	3,56	B	3,25	B-
274.	Kabupaten Aceh Selatan	Kecamatan Tapaktuan	3,00	C	Dinas Sosial	3,35	B-	RSUD Dr. H. Yuliddin Away	3,37	B-	3,24	B-
275.	Kota Batam	Kecamatan Lubuk Baja	2,92	C	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2,86	C	RSUD Embung Fatimah	3,94	B	3,24	B-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
276.	Kota Banjarbaru	Kecamatan Landasan Ulin	3,01	B-	Dinas Sosial	3,07	B-	RSUD Idaman	3,62	B	3,23	B-
277.	Kabupaten Landak	Kecamatan Jelimpo	3,5	B-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	2,56	C	RSUD Landak	3,63	B	3,23	B-
278.	Kabupaten Aceh Tengah	Kecamatan Atu Lintang	2,82	C	Dinas Sosial	3,54	B	RSUD Datu Beru	3,33	B-	3,23	B-
279.	Kabupaten Sekadau	Kecamatan Sekadau Hilir	2,73	C	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,53	B	RSUD Sekadau	3,4	B-	3,22	B-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
280.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kecamatan Minasatene	1,55	D	Dinas Sosial	3,93	B	RSUD Batara Siang	4,17	A-	3,22	B-
281.	Kabupaten Humbang Hasundutan	Kecamatan Doloksanggul	2,31	C-	Dinas Sosial	3,52	B	RSUD Doloksanggul	3,82	B	3,22	B-
282.	Kota Bukittinggi	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	3,93	B	Dinas Sosial	1,51	D	RSUD Kota Bukittinggi	4,2	A-	3,21	B-
283.	Kota Sabang	Kecamatan Sukajaya	3,23	B-	Dinas Sosial	3,17	B-	RSUD Kota Sabang	3,22	B-	3,21	B-
284.	Kabupaten Bangka Barat	Kecamatan Muntok	3,11	B-	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2,88	C	RSUD Sejiran Setason	3,62	B	3,20	B-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
285.	Kabupaten Kotabaru	Kecamatan Pulau Laut Utara	3,03	B-	Dinas Sosial	3,29	B-	RSUD Pangeran Jaya Sumitra	3,29	B-	3,20	B-
286.	Kabupaten Pesawaran	Kecamatan Gedong Tataan	1,92	D	Dinas Sosial	3,53	B	RSUD Pesawaran	4,15	A-	3,20	B-
287.	Kabupaten Tanah Bumbu	Kecamatan Simpang Empat	3,22	B-	Dinas Sosial	3,11	B-	RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor	3,27	B-	3,20	B-
288.	Kabupaten Sigi	Kecamatan Sigi Biromaru	3,07	B-	Dinas Sosial	2,67	C	RSUD Tora Belo	3,84	B	3,19	B-
289.	Kabupaten Tojo Unauna	Kecamatan Ampana	3,27	B-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,19	B-	RSUD Ampana	3,09	B-	3,18	B-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
290.	Kabupaten Situbondo	Kecamatan Situbondo	3,26	B-	Dinas Sosial	2,79	C	RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo	3,48	B-	3,18	B-
291.	Kabupaten Manggarai Timur	Kecamatan Borong	2,42	C-	Dinas Sosial	3,68	B	UPTD RSUD Borong	3,39	B-	3,16	B-
292.	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Kecamatan Mooat	3,80	B	Dinas Sosial	3,19	B-	RSUD Bolaang Mongondow Timur	2,49	C-	3,16	B-
293.	Kabupaten Jemberana	Kecamatan Mendoyo	2,01	C-	Dinas Sosial	3,34	B-	RSU Negara	4,09	A-	3,15	B-
294.	Kabupaten Mukomuko	Kecamatan Ipuh	3,22	B-	Dinas Sosial	3,23	B-	RSUD Mukomuko	2,93	C	3,13	B-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
295.	Kabupaten Toba	Kecamatan Balige	2,16	C-	Dinas Sosial	3,1	B-	RSUD Porsea	3,99	B	3,08	B-
296.	Kabupaten Mempawah	Kecamatan Jongkat	2,66	C	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	2,98	C	RSUD Dokter Rubini	3,6	B	3,08	B-
297.	Kabupaten Sumbawa Barat	Kecamatan Taliwang	1,25	E	Dinas Sosial	3,92	B	RSUD Asy-Syifa'	4,05	A-	3,07	B-
298.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kecamatan Sungai Pandan	2,3	C-	Dinas Sosial	3,13	B-	RSUD Pambalah Batung	3,79	B	3,07	B-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
299.	Kabupaten Tanggamus	Kecamatan Gisting	3,17	B-	Dinas Sosial	3,11	B-	RSUD Batin Mangunang	2,91	C	3,06	B-
300.	Kabupaten Bantaeng	Kecamatan Bantaeng	2,00	D	Dinas Sosial	2,77	C	RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu	4,39	A-	3,05	B-
301.	Kabupaten Banggai	Kecamatan Luwuk	2,85	C	Dinas Sosial	2,84	C	RSUD Kabupaten Banggai	3,42	B-	3,04	B-
302.	Kabupaten Poso	Kecamatan Poso	2,74	C	Dinas Sosial	3,53	B	RSUD Kabupaten Poso	2,83	C	3,03	B-
303.	Kota Langsa	Kecamatan Langsa Barat	2,08	C-	Dinas Sosial	3,14	B-	RSUD Langsa	3,85	B	3,02	B-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
304.	Kabupaten Lombok Utara	Kecamatan Kayangan	3,19	B-	Dinas Sosial	2,54	C	RSUD Kab. Lombok Utara	3,34	B-	3,02	B-
305.	Kota Palu	Kecamatan Tawaeli	1,48	E	Dinas Sosial	3,55	B	RSUD Anutapura	4,03	A-	3,02	B-
306.	Kota Pare-Pare	Kecamatan Soreang	2	D	Dinas Sosial	2,8	C	RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	4,25	A-	3,02	B-
307.	Kabupaten Malinau	Kecamatan Malinau Utara	3,44	B-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial	2,52	C	RSUD Kabupaten Malinau	3,06	B-	3,01	B-
308.	Kabupaten Boalemo	Kecamatan Tilamuta	2,1	C-	Dinas Sosial	3,44	B-	RSUD Tani Dan Nelayan	3,42	B-	2,99	C

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
309.	Kabupaten Kupang	Kecamatan Amabi Oefeto	3,1	B-	Dinas Sosial	2,57	C	RSUD Naibonat	3,29	B-	2,99	C
310.	Kabupaten Buton Utara	Kecamatan Kulisusu	2,37	C-	Dinas Sosial	3,39	B-	RSUD Kabupaten Buton Utara	3,16	B-	2,97	C
311.	Kabupaten Indragiri Hulu	Kecamatan Sungai Lala	2,19	C-	Dinas Sosial	3,47	B-	RSUD Indrasari Rengat	3,22	B-	2,96	C
312.	Kota Solok	Kecamatan Lubuk Sikarah	2,19	C-	Dinas Sosial	3,69	B	-	-	-	2,94	C
313.	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Sumbawa	2,85	C	Dinas Sosial	3,53	B	RSUD Sumbawa	2,44	C-	2,94	C

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
314.	Kabupaten Kuningan	Kecamatan Subang	2,86	C	Dinas Sosial	3,49	B-	RSUD 45 Kabupaten Kuningan	2,44	C-	2,93	C
315.	Kabupaten Mesuji	Kecamatan Way Serdang	2,6	C	Dinas Sosial	3,07	B-	RSUD Ragab Begawe Caram	3,1	B-	2,92	C
316.	Kabupaten Pasaman Barat	Kecamatan Pasaman	2,93	C	Dinas Sosial	2,72	C	RSUD Pasaman Barat	3,1	B-	2,92	C
317.	Kota Kediri	Kecamatan Pesantren	2,85	C	Dinas Sosial	3,02	B-	RSUD Gambiran	2,86	C	2,91	C
318.	Kabupaten Manggarai	Kecamatan Langke Rembong	1,92	D	Dinas Sosial	3,04	B-	RSUD Ruteng	3,75	B	2,90	C

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
319.	Kabupaten Lombok Timur	Kecamatan Selong	1,65	D	Dinas Sosial	2,8	C	RSUD Dr R Soedjono Selong	4,17	A-	2,87	C
320.	Kabupaten Aceh Besar	Kecamatan Peukan Bada	2,24	C-	Dinas Sosial	3,5	B-	RSUD Aceh Besar	2,85	C	2,86	C
321.	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Kecamatan Talang Ubi	2,03	C-	Dinas Sosial	2,31	C-	RSUD Talang Ubi	4,23	A-	2,86	C
322.	Kabupaten Tana Tidung	Kecamatan Betayau	1,13	E	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3,47	B-	RSUD Akhmad Berahim	3,93	B	2,84	C
323.	Kabupaten Natuna	Kecamatan Bunguran Timur	2,2	C-	Dinas Sosial	3,29	B-	RSUD Natuna	3,04	B-	2,84	C

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
324.	Kabupaten Aceh Barat Daya	Kecamatan Blangpidie	1,5	E	Dinas Sosial	2,97	C	RSUD Teungku Peukan	4,06	A-	2,84	C
325.	Kabupaten Aceh Jaya	Kecamatan Krueng Sabee	2,01	C-	Dinas Sosial	3,2	B-	RSUD Teuku Umar	3,29	B-	2,83	C
326.	Kabupaten Nagan Raya	Kecamatan Seunagan	2,73	C	Dinas Sosial	2,4	C-	RSUD Sultan Iskandar Muda	3,34	B-	2,82	C
327.	Kabupaten Dairi	Kecamatan Sidikalang	2,4	C-	Dinas Sosial	2,49	C-	RSUD Sidikalang	3,57	B	2,82	C
328.	Kabupaten Siak	Kecamatan Siak	NA	NA	Dinas Sosial	2,39	C-	RSUD Tengku Rafi'an	3,25	B-	2,82	C

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
329.	Kabupaten Kepulauan Anambas	Kecamatan Siantan	2,59	C	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak	2,77	C	UPT RSUD Palmatak	3,04	B-	2,80	C
330.	Kabupaten Maluku Tenggara	Kecamatan Kei Kecil	1,64	D	Dinas Sosial	3,59	B	Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun	3,14	B-	2,79	C
331.	Kabupaten Sambas	Kecamatan Tebas	3,15	B-	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,86	D	RSUD Pemangkat	3,35	B-	2,79	C
332.	Kabupaten Parigi Moutong	Kecamatan Parigi	2,79	C	Dinas Sosial	2,65	C	RSUD Anuntaloko Parigi	2,91	C	2,78	C
333.	Kabupaten Toraja Utara	Kecamatan Rantepao	2,98	C	Dinas Sosial	2,66	C	RSUD Pongtiku	2,71	C	2,78	C

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
334.	Kota Sibolga	Kecamatan Sibolga Sambas	3,22	B-	Dinas Sosial	1,98	D	RSUD Dr. Ferdinand Lumbantobing	3,1	B-	2,77	C
335.	Kabupaten Morowali	Kecamatan Bungku Tengah	3,35	B-	Dinas Sosial	2,6	C	RSUD Morowali	2,34	C-	2,76	C
336.	Kabupaten Padang Lawas	Kecamatan Sosa	1,16	E	Dinas Sosial	3,91	B	RSUD Sibuhuan	3,19	B-	2,75	C
337.	Kabupaten Majene	Kecamatan Banggae	2,84	C	Dinas Sosial	2,61	C	RSUD Kabupaten Majene	2,79	C	2,75	C
338.	Kabupaten Sabu Raijua	Kecamatan Sabu Timur	2,74	C	Dinas Sosial	3,16	B-	RSUD Sabu Raijua	2,33	C-	2,74	C

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
339.	Kabupaten Karimun	Kecamatan Karimun	1,71	D	Dinas Sosial	3,18	B-	RSUD Muhammad Sani	3,33	B-	2,74	C
340.	Kabupaten Bengkulu Utara	Kecamatan Kota Arga Makmur	1,54	D	Dinas Sosial	3,31	B-	RSUD Arga Makmur	3,36	B-	2,74	C
341.	Kabupaten Tebo	-	1,33	E	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,96	C	RSUD Sultan Thaha Saifuddin	3,9	B	2,73	C
342.	Kabupaten Kepulauan Meranti	Kecamatan Tebing Tinggi	2,37	C-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	2,63	C	RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti	3,15	B-	2,72	C

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
343.	Kabupaten Rejang Lebong	Kecamatan Curup	2,01	C-	Dinas Sosial	3,1	B-	RSUD Curup	3,02	B-	2,71	C
344.	Kota Palopo	Kecamatan Wara	NA	NA	Dinas Sosial	1,52	D	RSUD Sawerigading	3,88	B	2,70	C
345.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	3,16	B-	Unit Kerja Teknis 1 - Seksi Sosial	2,29	C-	RSUD kepulauan seribu	2,63	C	2,69	C
346.	Kabupaten Kepahiang	Kecamatan Kepahiang	1,74	D	Dinas Sosial	2,79	C	RSUD Kepahiang	3,53	B	2,69	C
347.	Kabupaten Kapuas	Kecamatan Selat	2,16	C-	Dinas Sosial	2,79	C	RSUD Dr.H. Soemarno Sosroatmodjo	3,09	B-	2,68	C

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
348.	Kabupaten Muaro Jambi	Kecamatan Sekernan	1,44	E	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,64	B	RSUD Ahmad Ripin	2,96	C	2,68	C
349.	Kabupaten Wajo	Kecamatan Tempe	2,91	C	Dinas Sosial	2,77	C	RSUD Lamaddukkelleng	2,34	C-	2,67	C
350.	Kabupaten Bengkulu Tengah	Kecamatan Karang Tinggi	2,69	C	Dinas Sosial	2,64	C	RSUD Bengkulu Tengah	NA	NA	2,67	C
351.	Kabupaten Gayo Lues	Kecamatan Blangpegayo	1,97	D	Dinas Sosial	2,6	C	Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim	3,42	B-	2,66	C
352.	Kabupaten Mamuju	Kecamatan Mamuju	2,38	C-	Dinas Sosial	1,63	D	RSUD Mamuju	3,93	B	2,65	C

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
353.	Kabupaten Pelalawan	Kecamatan Pangkalan Kuras	2,28	C-	Dinas Sosial	1,81	D	RSUD Selasih	3,85	B	2,65	C
354.	Kabupaten Gorontalo	Kecamatan Telaga Biru	2,3	C-	Dinas Sosial	1,83	D	RSUD Dr.M.M. Dunda Limboto	3,8	B	2,64	C
355.	Kabupaten Morowali Utara	Kecamatan Petasia	1,72	D	Dinas Sosial	2,92	C	RSUD Kolonodale	3,29	B-	2,64	C
356.	Kabupaten Jayapura	Distrik Sentani	NA	NA	Dinas Sosial	NA	NA	RSUD Yowari	2,64	C	2,64	C
357.	Kabupaten Nunukan	Kecamatan Sebatik Tengah	2,82	C	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,06	C-	RSUD Kabupaten Nunukan	2,98	C	2,62	C

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
358.	Kabupaten Banggai Kepulauan	Kecamatan Tinangkung	2,1	C-	Dinas Sosial	3,24	B-	RSUD Trikora Salakan	2,49	C-	2,61	C
359.	Kabupaten Barito Selatan	Kecamatan Jenamas	2,15	C-	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2,56	C	RSUD Jaraga Sasameh	3,06	B-	2,59	C
360.	Kota Pagar Alam	Kecamatan Pagar Alam Utara	2,03	C-	Dinas Sosial	2,72	C	RSUD Besemah	3,02	B-	2,59	C
361.	Kabupaten Murung Raya	Kecamatan Murung	NA	NA	Dinas Sosial	NA	NA	RSUD Puruk Cahu	2,59	C	2,59	C
362.	Kota Sorong	-	NA	NA	Dinas Sosial	NA	NA	Rumah Sakit	2,59	C	2,59	C

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
363.	Kabupaten Simeulue	Kecamatan Simeulue Barat	1,56	D	Dinas Sosial	2,15	C-	Uptd RSUD Simeulue	3,99	B	2,57	C
364.	Kabupaten Kaur	Kecamatan Kaur Selatan	2,58	C	Dinas Sosial	2,33	C-	RSUD Kaur	2,78	C	2,56	C
365.	Kabupaten Pidie Jaya	Kecamatan Meurah Dua	2,29	C-	Dinas Sosial	2,29	C-	RSUD Pidie Jaya	3,07	B-	2,55	C
366.	Kabupaten Tana Toraja	Kecamatan Makale Selatan	1,79	D	Dinas Sosial	2,85	C	RSUD Lakipadada	2,98	C	2,54	C
367.	Kabupaten Kolaka Utara	Kecamatan Lasusua	NA	NA	Dinas Sosial	2,04	C-	RSUD Djafar Harun	3,01	B-	2,53	C

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
368.	Kabupaten Halmahera Selatan	Kecamatan Bacan	NA	NA	Dinas Sosial	1,75	D	RSUD Labuha	3,26	B-	2,51	C
369.	Kabupaten Lampung Selatan	Kecamatan Kalianda	1,6	D	Dinas Sosial	2,91	C	RSUD Dr. H. Bob Bazar	3	C	2,50	C-
370.	Kabupaten Buton Selatan	Kecamatan Sampolawa	NA	NA	Dinas Sosial	2,67	C	RSUD Kabupaten Buton Selatan	2,33	C-	2,50	C-
371.	Kabupaten Maros	Kecamatan Turikale	1,45	E	Dinas Sosial	3,17	B-	RSUD La Lapalaoi	2,87	C	2,50	C-
372.	Kabupaten Katingan	Kecamatan Katingan Ilir	2,56	C	Dinas Sosial	2,31	C-	RSUD Mas Amsyar	2,61	C	2,49	C-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
373.	Kabupaten Mandailing Natal	Kecamatan Panyabungan	2,95	C	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,99	D	RSUD Panyabungan	2,53	C	2,49	C-
374.	Kabupaten Luwu	Kecamatan Belopa	1,24	E	Dinas Sosial	2,27	C-	RSUD Batara Guru	3,94	B	2,48	C-
375.	Kabupaten Pulang Pisau	Kecamatan Maluku	2,72	C	Dinas Sosial	1,54	D	RSUD Pulang Pisau	3,11	B-	2,46	C-
376.	Kabupaten Ende	Kecamatan Ende Selatan	1,6	D	Dinas Sosial	2,45	C-	RSUD Ende	3,31	B-	2,45	C-
377.	Kabupaten Aceh Timur	Kecamatan Idi Rayeuk	1,78	D	Dinas Sosial	2,57	C	RSUD Dr. Zubir Mahmud	3	C	2,45	C-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
378.	Kabupaten Aceh Utara	Kecamatan Cot Girek	1,65	D	Dinas Sosial	3,14	B-	RSUD Cut Meutia	2,56	C	2,45	C-
379.	Kabupaten Bengkulu Selatan	Kecamatan Kota Manna	1,13	E	Dinas Sosial	3,09	B-	RSUD HD Manna	3,11	B-	2,44	C-
380.	Kabupaten Kepulauan Selayar	Kecamatan Benteng	1,56	D	Dinas Sosial	3,57	B	RSUD K.H. Hayyung	2,18	C-	2,44	C-
381.	Kabupaten Mamasa	Kecamatan Mamasa	2,20	C-	Dinas Sosial	2,26	C-	RSUD Kondosapata	2,84	C	2,43	C-
382.	Kabupaten Maluku Tengah	Kecamatan Kota Masohi	1,38	E	Dinas Sosial	1,95	D	RSUD Kota Masohi	3,92	B	2,42	C-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
383.	Kabupaten Pesisir Barat	Kecamatan Karya Penggawa	NA	NA	Dinas Sosial	2,69	C	RSUD KH. Muhammad Thohir	2,09	C-	2,39	C-
384.	Kabupaten Minahasa	Kecamatan Tompaso	2,35	C-	Dinas Sosial	NA	NA	RSUD Dr. Sam Ratulangi	NA	NA	2,35	C-
385.	Kabupaten Manggarai Barat	Kecamatan Komodo	1,98	D	Dinas Sosial	2,34	C-	RSUD Komodo Labuan Bajo	2,72	C	2,35	C-
386.	Kabupaten Luwu Timur	Kecamatan Malili	1,71	D	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,97	D	RSUD I Lagaligo	3,36	B-	2,35	C-
387.	Kabupaten Gorontalo Utara	Kecamatan Kwandang	1,18	E	Dinas Sosial	2,86	C	RSUD Dr. Hi. Zainal Umar Sidiki	2,96	C	2,33	C-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
388.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Kecamatan Sipora Utara	1,40	E	Dinas Sosial	2,26	C-	RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai	3,24	B-	2,30	C-
389.	Kabupaten Tapanuli Tengah	Kecamatan Sarudik	1,3	E	Dinas Sosial	2,05	C-	UPTD RSUD Pandan	3,49	B-	2,28	C-
390.	Kabupaten Belu	Kecamatan Atambua Barat	1,68	D	Dinas Sosial	1,76	D	RSUD Mgr. Gabriel Manek, Svd Atambua	3,39	B-	2,28	C-
391.	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Kecamatan Kotapinang	1,91	D	Dinas Sosial	1,99	D	RSUD Kotapinang	2,89	C	2,26	C-
392.	Kabupaten Konawe Utara	Kecamatan Lasolo	1,37	E	Dinas Sosial	1,72	D	RSUD Kabupaten Konawe Utara	3,69	B	2,26	C-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
393.	Kabupaten Pidie	Kecamatan Kota Sigli	1,25	E	Dinas Sosial	2,8	C	RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli Aceh	2,71	C	2,25	C-
394.	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kecamatan Panca Lautang	1,02	E	Dinas Sosial	2,65	C	RSUD Nene Mallomo	3,06	B-	2,24	C-
395.	Kabupaten Samosir	Kecamatan Pangururan	2,75	C	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,28	E	RSUD dr. Hadrianus Sinaga	2,7	C	2,24	C-
396.	Kota Binjai	Kecamatan Binjai Timur	1,79	D	Dinas Sosial	2,1	C-	RSUD Dr. R.M. Djoelham	2,78	C	2,22	C-
397.	Kabupaten Seruyan	Kecamatan Seruyan Ilir	1,93	D	Dinas Sosial	2,77	C	RSUD Kuala Pembuang	1,94	D	2,21	C-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
398.	Kabupaten Buton	Kecamatan Pasarwajo	1,89	D	Dinas Sosial	2,56	C	RSUD Kabupaten Buton	2,12	C-	2,19	C-
399.	Kabupaten Pasangkayu	Kecamatan Pasangkayu	1,14	E	Dinas Sosial	2,05	C-	RSUD Pasangkayu	3,35	B-	2,18	C-
400.	Kabupaten Seluma	Kecamatan Sukaraja	2,43	C-	Dinas Sosial	2,06	C-	RSUD Tais	2,04	C-	2,18	C-
401.	Kabupaten Buru Selatan	Kecamatan Waesama	1,79	D	Dinas Sosial	2,06	C-	RSUD dr Salim Alkatiri Namrole	2,29	C-	2,18	C-
402.	Kabupaten Halmahera Utara	-	NA	NA	-	1,91	D	RSUD Tobelo	2,42	C-	2,17	C-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
403.	Kota Kendari	Kecamatan Poasia	NA	NA	Dinas Sosial	1,65	D	RSUD Kota Kendari	2,65	C	2,15	C-
404.	Kabupaten Halmahera Timur	Kecamatan Maba Buli	1,65	D	Dinas Sosial	2,37	C-	RSUD Maba Halmahera Timur	2,33	C-	2,12	C-
405.	Kabupaten Lampung Timur	Kecamatan Metro Kibang	1,5	E	Dinas Sosial	2,29	C-	RSUD Sukadana	2,52	C	2,10	C-
406.	Kabupaten Barito Utara	Kecamatan Teweh Tengah	2,14	C-	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2,14	C-	RSUD Muara Teweh	2,01	C-	2,10	C-
407.	Kabupaten Asahan	Kecamatan Kota Kisaran Timur	1,88	D	Dinas Sosial	2,1	C-	RSUD Haji Abdul Manan Simatupang	2,3	C-	2,09	C-

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
408.	Kabupaten Lampung Barat	Kecamatan Balik Bukit	1,89	D	Dinas Sosial	2,35	C-	RSUD Alimuddin Umar	2,04	C-	2,09	C-
409.	Kabupaten Gunung Mas	Kecamatan Kurun	2,07	C-	Dinas Sosial	1,8	D	RSUD Kuala Kurun	2,39	C-	2,09	C-
410.	Kabupaten Maluku Barat Daya	Kecamatan Moa Lakot	1,34	E	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,8	C	RSUD Tiakur	NA	NA	2,07	C-
411.	Kota Gorontalo	Kecamatan Dumbo Raya	1,84	D	Dinas Sosial	1,8	D	RSUD Prof. Dr. H. Aloe Saboe	2,53	C	2,06	C-
412.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Kecamatan Muaradua	1,15	E	Dinas Sosial	2,27	C-	RSUD Muaradua Ogan Komering Ulu Selatan	2,44	C-	1,95	D

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
413.	Kabupaten Konawe Kepulauan	Kecamatan Wawoni Tengah	2,1	C-	Dinas Sosial	1,79	D	RSUD Kabupaten Konawe Kepulauan	NA	NA	1,95	D
414.	Kabupaten Flores Timur	Kecamatan Larantuka	2,12	C-	Dinas Sosial	1,4	E	RSUD Dr.Hendrikus Fernandez Larantuka	2,31	C-	1,94	D
415.	Kabupaten Halmahera Barat	-	NA	NA	-	NA	NA	RSUD Jailolo	1,92	D	1,92	D
416.	Kabupaten Tolitoli	Kecamatan Baolan	2,09	C-	Dinas Sosial	NA	NA	RSUD Mokopido	1,73	D	1,91	D
417.	Kabupaten Sukamara	Kecamatan Sukamara	1,53	D	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,15	E	RSUD Sukamara	3	C	1,89	D

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
418.	Kabupaten Sarolangun	Kecamatan Sarolangun	1,84	D	Dinas Sosial	1,55	D	RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain	2,29	C-	1,89	D
419.	Kabupaten Nias Selatan	Kecamatan Teluk Dalam	2,34	C-	Dinas Sosial	1,89	D	RSUD Nias Selatan	1,45	E	1,89	D
420.	Kabupaten Sumba Timur	Kecamatan Kota Waingapu	1,68	D	Dinas Sosial	1,22	E	RSUD Umbu Rara Meha Waingapu	2,74	C	1,88	D
421.	Kota Lhokseumawe	Kecamatan Blang Mangat	1,66	D	Dinas Sosial	2,07	C-	-	-	-	1,87	D
422.	Kabupaten Kolaka Timur	Kecamatan Tirawuta	NA	NA	Dinas Sosial	1,7	D	RSUD Kabupaten Kolaka Timur	2	D	1,85	D

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
423.	Kabupaten Mahakam Ulu	Kecamatan Long Bagun	2,09	C-	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1,33	E	RSP Gerbang Sehat Mahulu	2,03	C-	1,82	D
424.	Kabupaten Lamandau	Kecamatan Bulik	2,45	C-	Dinas Sosial	1,18	E	RSUD Lamandau	NA	NA	1,82	D
425.	Kabupaten Muna Barat	Kecamatan Lawa	1,93	D	Dinas Sosial	1,88	D	RSUD Kabupaten Muna Barat	1,56	D	1,79	D
426.	Kabupaten Buru	-	NA	NA	Dinas Sosial	1,79	D	-	NA	NA	1,79	D
427.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	-	NA	NA	Dinas Sosial	1,5	E	RSUD Tulang Bawang Barat	2,06	C-	1,78	D

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
428.	Kabupaten Konawe	Kecamatan Unaaha	NA	NA	Dinas Sosial	NA	NA	RSUD Kabupaten Konawe	1,78	D	1,78	D
429.	Kabupaten Enrekang	Kecamatan Enrekang	1,59	D	Dinas Sosial	1,27	E	RSUD Massenrempulu	2,37	C-	1,74	D
430.	Kabupaten Bengkayang	Kecamatan Bengkayang	1,79	D	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,77	D	RSUD Drs. Jacobus Luna M.Si	1,56	D	1,71	D
431.	Kabupaten Donggala	Kecamatan Banawa	1,65	D	Dinas Sosial	1,37	E	RSUD Kabelota	2,08	C-	1,70	D
432.	Kabupaten Barito Timur	Kecamatan Benua Lima	1,24	E	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial	1,64	D	RSUD Tamiang Layang	2,16	C-	1,68	D

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
433.	Kabupaten Buol	Kecamatan Biau	1,12	E	Dinas Sosial	1,96	D	RSUD Mokyurli	1,79	D	1,62	D
434.	Kabupaten Bener Meriah	Kantor Camat Pintu Rime Gayo	1,01	E	Dinas Sosial	1,09	E	RSUD Munyang	2,75	C	1,62	D
435.	Kabupaten Buton Tengah	Kecamatan Mawasangka	1,02	E	Dinas Sosial	1,96	D	RSUD Kabupaten Buton Tengah	1,86	D	1,61	D
436.	Kabupaten Sumba Tengah	Kecamatan Katikutana Selatan	2,15	C-	Dinas Sosial	1,05	E	RSUD Waibakul	NA	NA	1,60	D
437.	Kabupaten Teluk Wondama	Distrik Wasior	1,57	D	Dinas Sosial	NA	NA	RSUD Dr. Alberth H. Torey	NA	NA	1,57	D

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
438.	Kabupaten Rote Ndao	Kecamatan Loaholu	1,31	E	Dinas Sosial	1,21	E	RSUD Kabupaten Rote Ndao	2,15	C-	1,56	D
439.	Kabupaten Kutai Timur	Kecamatan Sangatta Utara	1,46	E	Dinas Sosial	NA	NA	RSUD Kudungga	1,44	E	1,45	E
440.	Kabupaten Muna	Kecamatan Duruka	1,39	E	Dinas Sosial	1,16	E	RSUD dr. H.L.M. Baharudin, M.Kes	NA	NA	1,28	E
441.	Kabupaten Wakatobi	Kecamatan Wangi-wangi	1,14	E	Dinas Sosial	NA	NA	RSUD Kabupaten Wakatobi	1,31	E	1,23	E
442.	Kota Gunungsitoli	-	1,15	E	Dinas Sosial	1,22	E	-	NA	NA	1,19	E

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
443.	Kota Jayapura	Distrik Jayapura Utara	NA	NA	Dinas Sosial	1,03	E	RSUD Ramela Muara Tami	1,29	E	1,16	E
444.	Kabupaten Kerinci	Kecamatan Siulak	1,04	E	Dinas Sosial	NA	NA	-	1,19	E	1,12	E
445.	Kabupaten Berau	Kecamatan Tanjung Redeb	1,09	E	Dinas Sosial	NA	NA	RSUD dr. Abdul Rivai	NA	NA	1,09	E
446.	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kecamatan Kota Kefamenanu	1,03	E	Dinas Sosial	1,09	E	RSUD Kefamenanu	1,11	E	1,08	E
447.	Kabupaten Lebong	Kecamatan Amen	1,09	E	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial	1,05	E	-	NA	NA	1,07	E

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
448.	Kabupaten Karo	-	NA	NA	Dinas Sosial	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
449.	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Kecamatan Kualuh Selatan	NA	NA	Dinas Sosial	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
450.	Kabupaten Nias Barat	Kecamatan Sirombu	NA	NA	Dinas Sosial	NA	NA	Rumah Sakit Pratama Kab. Nias Barat	NA	NA	NA	NA
451.	Kabupaten Rokan Hulu	Kecamatan Kepenuhan	NA	NA	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	NA	NA	RSUD Kabupaten Rokan Hulu	NA	NA	NA	NA
452.	Kota Sungaipenuh	Kecamatan Sungai Penuh	NA	NA	-	NA	NA	RSUD Mayjen HA. Thalib	NA	NA	NA	NA

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
453.	Kabupaten Nagekeo	Kecamatan Aesesa	NA	NA	Dinas Sosial	NA	NA	RSUD Aeramo	NA	NA	NA	NA
454.	Kabupaten Alor	Kecamatan Teluk Mutiata, Amri Rafii	NA	NA	Dinas Sosial	NA	NA	RSUD Kalabahi	NA	NA	NA	NA
455.	Kabupaten Lembata	-	NA	NA	Dinas Sosial	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
456.	Kabupaten Malaka	Kecamatan Kobalima	NA	NA	Dinas Sosial	NA	NA	Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan	NA	NA	NA	NA
457.	Kabupaten Ngada	Kecamatan Bajawa	NA	NA	Dinas Sosial	NA	NA	RSUD Bajawa	NA	NA	NA	NA

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
458.	Kabupaten Sikka	Kecamatan Alok	NA	NA	Dinas Sosial	NA	NA	RSUD Dr. T.C Hillers Maumere	NA	NA	NA	NA
459.	Kabupaten Sumba Barat	-	NA	NA	Dinas Sosial	NA	NA	RSUD Waikabubak	NA	NA	NA	NA
460.	Kabupaten Sumba Barat Daya	Kecamatan Kota Tambolaka	NA	NA	Dinas Sosial	NA	NA	RSUD Redabolo	NA	NA	NA	NA
461.	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Kecamatan Kota Soe	NA	NA	Dinas Sosial	NA	NA	RSUD Timor Tengah Selatan	NA	NA	NA	NA
462.	Kabupaten Minahasa Tenggara	Kecamatan Ratahan	NA	NA	Dinas Sosial	NA	NA	RSUD Mitra Sehat	NA	NA	NA	NA

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
463.	Kabupaten Mamuju Tengah	Kecamatan Topoyo	NA	NA	Dinas Sosial	NA	NA	RSUD Mamuju Tengah	NA	NA	NA	NA
464.	Kabupaten Bombana	Kecamatan Poleang Timur	NA	NA	Dinas Sosial	NA	NA	RSUD Kabupaten Bombana	NA	NA	NA	NA
465.	Kabupaten Konawe Selatan	Kecamatan Benua	NA	NA	Dinas Sosial	NA	NA	RSUD Kabupaten Konawe Selatan	NA	NA	NA	NA
466.	Kota Baubau	Kecamatan Murhum	NA	NA	Dinas Sosial	NA	NA	RSUD Kota Baubau	NA	NA	NA	NA
467.	Kota Tual	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
468.	Kabupaten Kepulauan Aru	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
469.	Kab, Seram Bagian Timur	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
470.	Kab, Seram Bagian Barat	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
471.	Kabupaten Tanimbar	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
472.	Kota Ternate	-	NA	NA	-	NA	NA	RSUD Kota Ternate	NA	NA	NA	NA

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
473.	Kabupaten Pulau Morotai	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
474.	Kota Tidore	-	NA	NA	-	NA	NA	RSUD Kota Tidore Kepulauan	NA	NA	NA	NA
475.	Kabupaten Halmahera Tengah	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
476.	Kabupaten Kepulauan Sula	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
477.	Kabupaten Pulau Taliabu	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
478.	Kabupaten Merauke	Distrik Merauke	NA	NA	Dinas Sosial	NA	NA	RSUD Merauke	NA	NA	NA	NA
479.	Kabupaten Biak Numfor	Distrik Biak Kota	NA	NA	-	NA	NA	RSUD Kabupaten Biak	NA	NA	NA	NA
480.	Kabupaten Nabire	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
481.	Kabupaten Asmat	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
482.	Kabupaten Mappi	-	NA	NA	-	NA	NA	RSUD Kabupaten Mappi	NA	NA	NA	NA

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
483.	Kabupaten Mimika	Distrik Mimika Baru	NA	NA	-	NA	NA	RSUD Mimika	NA	NA	NA	NA
484.	Kabupaten Jayawijaya	Distrik Wamena	NA	NA	Dinas Sosial	NA	NA	RSUD Wamena	NA	NA	NA	NA
485.	Kabupaten Kepulauan Yapen	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
486.	Kabupaten Paniai	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
487.	Kabupaten Puncak Jaya	Distrik Mulia	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
488.	Kabupaten Boven Digoel	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
489.	Kabupaten Keerom	Distrik Skanto	NA	NA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	NA	NA	RSUD Kwaingga	NA	NA	NA	NA
490.	Kabupaten Sarmi	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
491.	Kabupaten Pegunungan Bintang	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
492.	Kabupaten Tolikara	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
493.	Kabupaten Waropen	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
494.	Kabupaten Yahukimo	Distrik Dekai	NA	NA	-	NA	NA	RSUD Dekai	NA	NA	NA	NA
495.	Kabupaten Supiori	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
496.	Kabupaten Mamberamo Raya	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
497.	Kabupaten Mamberamo Tengah	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
498.	Kabupaten Yalimo	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
499.	Kabupaten Lanny Jaya	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
500.	Kabupaten Nduga	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
501.	Kabupaten Puncak	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
502.	Kabupaten Dogiyai	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
503.	Kabupaten Intan Jaya	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
504.	Kabupaten Deiyai	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
505.	Kabupaten Sorong	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
506.	Kabupaten Manokwari	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
507.	Kabupaten Teluk Bintuni	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
508.	Kabupaten Fak-fak	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
509.	Kabupaten Kaimana	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
510.	Kabupaten Sorong Selatan	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
511.	Kabupaten Tambrau	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA

NO.	KAB/KOTA	KECAMATAN			DINAS SOSIAL			RSUD			RATA-RATA	
		ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
512.	Kabupaten Maybrat	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
513.	Kabupaten Manokwari Selatan	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA
514.	Kabupaten Pegunungan Arfak	-	NA	NA	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI
NOMOR 795 TAHUN 2023
TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK TAHUN 2023

KATEGORI PENILAIAN
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023

Indeks	Kategori
4,51 – 5,00	A
4,01 – 4,50	A-
3,51 – 4,00	B
3,01 – 3,50	B-
2,51 – 3,00	C
2,01 – 2,50	C-
1,51 – 2,00	D

Indeks	Kategori
1,01 – 1,50	E
0 – 1,00	F

Keterangan:

- 1. ULE adalah singkatan dari Unit Lokus Evaluasi , yaitu Organisasi Penyelenggara yang ditunjuk untuk dilaksanakan PEKPPP.
- 2. NA adalah singkatan dari *Not Available*, yaitu kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang dievaluasi tidak memenuhi syarat untuk dilakukan kalkulasi nilai sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan evaluasi, sehingga tidak mendapatkan nilai indeks dan tidak masuk dalam kategori yang ada.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 November 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah, telah dilakukan kegiatan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, telah diperoleh nilai indeks dan predikat sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994); dan
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 621 (*enam ratus dua puluh satu*) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menghimbau kepada Pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Januari 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA INSTANSI
PUSAT DAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2023

HASIL EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

Hasil Evaluasi SPBE Kementerian

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	3,01	Baik
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	3,72	Sangat Baik
3	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3,13	Baik
4	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	3,31	Baik
5	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	3,50	Sangat Baik
6	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	4,41	Memuaskan
7	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,41	Baik
8	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	3,97	Sangat Baik
9	Kementerian Pemuda dan Olahraga	3,35	Baik
10	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	3,87	Sangat Baik
11	Kementerian Dalam Negeri	3,64	Sangat Baik
12	Kementerian Luar Negeri	3,26	Baik
13	Kementerian Pertahanan	3,43	Baik
14	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	4,21	Memuaskan
15	Kementerian Keuangan	4,66	Memuaskan
16	Kementerian Pertanian	3,86	Sangat Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
17	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	3,52	Sangat Baik
18	Kementerian Perhubungan	3,71	Sangat Baik
19	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	3,90	Sangat Baik
20	Kementerian Kesehatan	3,31	Baik
21	Kementerian Agama	3,58	Sangat Baik
22	Kementerian Ketenagakerjaan	3,27	Baik
23	Kementerian Sosial	3,04	Baik
24	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3,62	Sangat Baik
25	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,58	Sangat Baik
26	Kementerian Komunikasi dan Informatika	4,52	Memuaskan
27	Kementerian Perdagangan	4,16	Sangat Baik
28	Kementerian Perindustrian	2,89	Baik
29	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	3,81	Sangat Baik
30	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,67	Memuaskan
31	Kementerian Sekretariat Negara	3,38	Baik
32	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	4,11	Sangat Baik
33	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	2,83	Baik
34	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	3,95	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Badan Siber dan Sandi Negara	3,94	Sangat Baik
2	Badan Kepegawaian Negara	3,66	Sangat Baik
3	Lembaga Administrasi Negara	4,26	Memuaskan
4	Badan Pusat Statistik	4,17	Sangat Baik
5	Arsip Nasional Republik Indonesia	3,16	Baik
6	Badan Informasi Geospasial	3,28	Baik
7	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	3,20	Baik
8	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	4,13	Sangat Baik
9	Perpustakaan Nasional RI	3,56	Sangat Baik
10	Badan Standardisasi Nasional	3,38	Baik
11	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3,26	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
12	Badan Pengawas Obat dan Makanan	4,08	Sangat Baik
13	Lembaga Ketahanan Nasional RI	3,16	Baik
14	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	3,34	Baik
15	Badan Narkotika Nasional	2,47	Cukup
16	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2,69	Baik
17	Badan Keamanan Laut	3,18	Baik
18	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan	3,42	Baik
19	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3,47	Baik
20	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	2,46	Cukup
21	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	3,25	Baik
22	Badan Pangan Nasional	2,77	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Alat Negara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Kejaksaan Agung	3,45	Baik
2	Badan Intelijen Negara	3,93	Sangat Baik
3	Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia	3,00	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Sekretariat Kabinet

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Sekretariat Kabinet	3,02	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Sekretariat Jenderal Lembaga Negara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2,93	Baik
2	Dewan Perwakilan Rakyat	3,57	Sangat Baik
3	Mahkamah Agung RI	3,19	Baik
4	Badan Pemeriksa Keuangan	3,63	Sangat Baik
5	Mahkamah Konstitusi	3,36	Baik
6	Komisi Yudisial	3,21	Baik
7	Dewan Perwakilan Daerah	2,24	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Pemerintah Lainnya

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Badan Riset dan Inovasi Nasional	4,12	Sangat Baik
2	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	3,11	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Penyiaran Publik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Televisi Republik Indonesia	2,47	Cukup
2	Radio Republik Indonesia	3,32	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Non Struktural (LNS)

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Dewan Ketahanan Nasional	3,05	Baik
2	Komisi Pemilihan Umum	3,62	Sangat Baik
3	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	2,82	Baik
4	Komisi Pemberantasan Korupsi	4,10	Sangat Baik
5	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	4,24	Memuaskan
6	Ombudsman Republik Indonesia	3,75	Sangat Baik
7	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	2,76	Baik
8	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	2,32	Cukup
9	Badan Pengawas Pemilihan Umum	3,12	Baik
10	Komisi Penyiaran Indonesia	2,64	Baik
11	Komisi Kejaksaan	1,46	Kurang
12	Komisi Aparatur Sipil Negara	3,32	Baik
13	Dewan Pers	1,45	Kurang
14	Dewan Jaminan Sosial Nasional	3,13	Baik
15	Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi	3,42	Baik
16	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	2,06	Cukup
17	Badan Pengusahaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	2,93	Baik
18	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	3,19	Baik
19	Lembaga Sensor Film	2,61	Baik
20	Konsil Kedokteran Indonesia	2,06	Cukup
21	Kantor Staf Presiden	3,36	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Aceh

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Aceh	3,62	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Aceh Besar	1,88	Cukup
3	Pemerintah Kab. Pidie	2,04	Cukup
4	Pemerintah Kab. Aceh Utara	1,70	Kurang
5	Pemerintah Kab. Aceh Timur	2,30	Cukup
6	Pemerintah Kab. Aceh Selatan	1,92	Cukup
7	Pemerintah Kab. Aceh Barat	2,65	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
8	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	1,88	Cukup
9	Pemerintah Kab. Aceh Tenggara	1,74	Kurang
10	Pemerintah Kab. Simeulue	1,86	Cukup
11	Pemerintah Kab. Bireuen	2,12	Cukup
12	Pemerintah Kab. Aceh Singkil	1,95	Cukup
13	Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	2,61	Baik
14	Pemerintah Kab. Gayo Lues	2,47	Cukup
15	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	2,81	Baik
16	Pemerintah Kab. Nagan Raya	2,62	Baik
17	Pemerintah Kab. Aceh Jaya	2,42	Cukup
18	Pemerintah Kab. Bener Meriah	2,61	Baik
19	Pemerintah Kab. Pidie Jaya	2,63	Baik
20	Pemerintah Kota Sabang	2,44	Cukup
21	Pemerintah Kota Banda Aceh	3,54	Sangat Baik
22	Pemerintah Kota Langsa	1,84	Cukup
23	Pemerintah Kota Lhokseumawe	2,35	Cukup
24	Pemerintah Kota Subulussalam	2,11	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	3,21	Baik
2	Pemerintah Kab. Deli Serdang	3,47	Baik
3	Pemerintah Kab. Karo	2,57	Cukup
4	Pemerintah Kab. Langkat	3,03	Baik
5	Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	1,87	Cukup
6	Pemerintah Kab. Simalungun	2,32	Cukup
7	Pemerintah Kab. Labuhanbatu	2,94	Baik
8	Pemerintah Kab. Dairi	2,67	Baik
9	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	2,69	Baik
10	Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan	2,69	Baik
11	Pemerintah Kab. Asahan	1,97	Cukup
12	Pemerintah Kab. Nias	2,62	Baik
13	Pemerintah Kab. Toba	2,16	Cukup
14	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	2,83	Baik
15	Pemerintah Kab. Nias Selatan	1,81	Cukup
16	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	2,30	Cukup
17	Pemerintah Kab. Pakpak Bharat	2,41	Cukup
18	Pemerintah Kab. Samosir	2,69	Baik
19	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	2,59	Cukup
20	Pemerintah Kab. Padang Lawas	2,02	Cukup
21	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	1,98	Cukup
22	Pemerintah Kab. Batubara	2,34	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
23	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan	1,94	Cukup
24	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara	2,69	Baik
25	Pemerintah Kab. Nias Barat	1,80	Cukup
26	Pemerintah Kab. Nias Utara	1,51	Kurang
27	Pemerintah Kota Medan	2,77	Baik
28	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	3,01	Baik
29	Pemerintah Kota Binjai	2,98	Baik
30	Pemerintah Kota Pematang Siantar	2,84	Baik
31	Pemerintah Kota Tanjung Balai	2,80	Baik
32	Pemerintah Kota Sibolga	2,24	Cukup
33	Pemerintah Kota Padangsidimpuan	2,49	Cukup
34	Pemerintah Kota Gunung Sitoli	2,13	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Riau

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Riau	3,01	Baik
2	Pemerintah Kab. Kampar	2,96	Baik
3	Pemerintah Kab. Bengkalis	2,70	Baik
4	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	2,88	Baik
5	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	2,23	Cukup
6	Pemerintah Kab. Pelalawan	2,27	Cukup
7	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	2,64	Baik
8	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	2,50	Cukup
9	Pemerintah Kab. Siak	3,01	Baik
10	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	2,96	Baik
11	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	2,74	Baik
12	Pemerintah Kota Pekanbaru	3,42	Baik
13	Pemerintah Kota Dumai	3,43	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Riau

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	2,68	Baik
2	Pemerintah Kab. Bintan	3,39	Baik
3	Pemerintah Kab. Karimun	2,01	Cukup
4	Pemerintah Kab. Natuna	3,19	Baik
5	Pemerintah Kab. Lingga	2,53	Cukup
6	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	2,51	Cukup
7	Pemerintah Kota Batam	3,77	Sangat Baik
8	Pemerintah Kota Tanjungpinang	2,81	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3,75	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Agam	2,55	Cukup
3	Pemerintah Kab. Pasaman	2,38	Cukup
4	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	3,29	Baik
5	Pemerintah Kab. Solok	3,49	Baik
6	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	2,62	Baik
7	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	4,17	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Tanah Datar	3,22	Baik
9	Pemerintah Kab. Sijunjung	2,18	Cukup
10	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	1,53	Kurang
11	Pemerintah Kab. Solok Selatan	2,98	Baik
12	Pemerintah Kab. Dharmasraya	2,83	Baik
13	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	2,82	Baik
14	Pemerintah Kota Bukittinggi	2,49	Cukup
15	Pemerintah Kota Padang Panjang	2,92	Baik
16	Pemerintah Kota Sawahlunto	3,09	Baik
17	Pemerintah Kota Solok	3,37	Baik
18	Pemerintah Kota Padang	3,54	Sangat Baik
19	Pemerintah Kota Payakumbuh	3,17	Baik
20	Pemerintah Kota Pariaman	2,65	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jambi

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jambi	3,31	Baik
2	Pemerintah Kab. Batang Hari	3,11	Baik
3	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	1,71	Kurang
4	Pemerintah Kab. Bungo	1,95	Cukup
5	Pemerintah Kab. Merangin	2,37	Cukup
6	Pemerintah Kab. Kerinci	1,95	Cukup
7	Pemerintah Kab. Sarolangun	2,91	Baik
8	Pemerintah Kab. Tebo	2,62	Baik
9	Pemerintah Kab. Muaro Jambi	2,13	Cukup
10	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	2,81	Baik
11	Pemerintah Kota Jambi	4,27	Memuaskan
12	Pemerintah Kota Sungai Penuh	2,38	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	2,62	Baik
2	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	2,85	Baik
3	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	2,67	Baik
4	Pemerintah Kab. Muara Enim	3,00	Baik
5	Pemerintah Kab. Lahat	2,23	Cukup
6	Pemerintah Kab. Musi Rawas	2,64	Baik
7	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	3,04	Baik
8	Pemerintah Kab. Banyuasin	2,13	Cukup
9	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2,96	Baik
10	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	2,31	Cukup
11	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	2,91	Baik
12	Pemerintah Kab. Empat Lawang	1,97	Cukup
13	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	2,35	Cukup
14	Pemerintah Kota Palembang	2,66	Baik
15	Pemerintah Kota Pagar Alam	2,14	Cukup
16	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	2,86	Baik
17	Pemerintah Kota Prabumulih	3,35	Baik
18	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2,45	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Bangka Belitung

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	3,14	Baik
2	Pemerintah Kab. Bangka	2,44	Cukup
3	Pemerintah Kab. Belitung	3,11	Baik
4	Pemerintah Kab. Bangka Barat	2,61	Baik
5	Pemerintah Kab. Bangka Tengah	3,72	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Bangka Selatan	3,44	Baik
7	Pemerintah Kab. Belitung Timur	3,56	Sangat Baik
8	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	2,87	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Bengkulu

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Bengkulu	3,12	Baik
2	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	2,90	Baik
3	Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan	2,45	Cukup
4	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	3,23	Baik
5	Pemerintah Kab. Kaur	2,24	Cukup
6	Pemerintah Kab. Seluma	2,54	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
7	Pemerintah Kab. Mukomuko	2,07	Cukup
8	Pemerintah Kab. Kepahiang	2,28	Cukup
9	Pemerintah Kab. Lebong	2,93	Baik
10	Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah	2,55	Cukup
11	Pemerintah Kota Bengkulu	2,61	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Lampung

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Lampung	3,81	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Lampung Selatan	2,74	Baik
3	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	2,68	Baik
4	Pemerintah Kab. Lampung Utara	2,70	Baik
5	Pemerintah Kab. Lampung Barat	2,76	Baik
6	Pemerintah Kab. Tulang Bawang	2,55	Cukup
7	Pemerintah Kab. Tanggamus	2,60	Baik
8	Pemerintah Kab. Way Kanan	3,08	Baik
9	Pemerintah Kab. Lampung Timur	2,27	Cukup
10	Pemerintah Kab. Pesawaran	2,91	Baik
11	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	2,27	Cukup
12	Pemerintah Kab. Pringsewu	2,97	Baik
13	Pemerintah Kab. Mesuji	3,57	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	2,32	Cukup
15	Pemerintah Kota Metro	3,04	Baik
16	Pemerintah Kota Bandar Lampung	2,15	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di DKI Jakarta

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	4,21	Memuaskan

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	4,14	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Bogor	3,71	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Sukabumi	3,08	Baik
4	Pemerintah Kab. Cianjur	3,05	Baik
5	Pemerintah Kab. Bekasi	3,28	Baik
6	Pemerintah Kab. Karawang	4,38	Memuaskan
7	Pemerintah Kab. Purwakarta	2,99	Baik
8	Pemerintah Kab. Subang	2,82	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
9	Pemerintah Kab. Bandung	3,48	Baik
10	Pemerintah Kab. Sumedang	4,14	Sangat Baik
11	Pemerintah Kab. Garut	3,29	Baik
12	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	3,01	Baik
13	Pemerintah Kab. Ciamis	3,09	Baik
14	Pemerintah Kab. Cirebon	3,07	Baik
15	Pemerintah Kab. Kuningan	3,39	Baik
16	Pemerintah Kab. Indramayu	3,53	Sangat Baik
17	Pemerintah Kab. Majalengka	2,89	Baik
18	Pemerintah Kab. Bandung Barat	3,32	Baik
19	Pemerintah Kab. Pangandaran	3,53	Sangat Baik
20	Pemerintah Kota Bandung	3,98	Sangat Baik
21	Pemerintah Kota Bogor	3,72	Sangat Baik
22	Pemerintah Kota Sukabumi	2,98	Baik
23	Pemerintah Kota Cirebon	3,55	Sangat Baik
24	Pemerintah Kota Bekasi	3,01	Baik
25	Pemerintah Kota Depok	3,70	Sangat Baik
26	Pemerintah Kota Cimahi	4,02	Sangat Baik
27	Pemerintah Kota Tasikmalaya	3,25	Baik
28	Pemerintah Kota Banjar	3,00	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Banten

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Banten	3,39	Baik
2	Pemerintah Kab. Serang	3,23	Baik
3	Pemerintah Kab. Pandeglang	3,14	Baik
4	Pemerintah Kab. Lebak	3,22	Baik
5	Pemerintah Kab. Tangerang	3,37	Baik
6	Pemerintah Kota Tangerang	2,97	Baik
7	Pemerintah Kota Cilegon	2,30	Cukup
8	Pemerintah Kota Serang	2,60	Baik
9	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	3,18	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di D.I Yogyakarta

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah D.I. Yogyakarta	4,22	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Bantul	3,72	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Sleman	4,29	Memuaskan
4	Pemerintah Kab. Gunungkidul	2,84	Baik
5	Pemerintah Kab. Kulon Progo	4,08	Sangat Baik
6	Pemerintah Kota Yogyakarta	3,41	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	4,26	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Semarang	3,26	Baik
3	Pemerintah Kab. Kendal	2,95	Baik
4	Pemerintah Kab. Demak	3,62	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Grobogan	3,37	Baik
6	Pemerintah Kab. Pekalongan	2,86	Baik
7	Pemerintah Kab. Batang	3,53	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Tegal	3,07	Baik
9	Pemerintah Kab. Brebes	2,83	Baik
10	Pemerintah Kab. Pati	3,74	Sangat Baik
11	Pemerintah Kab. Kudus	4,23	Memuaskan
12	Pemerintah Kab. Pemalang	2,94	Baik
13	Pemerintah Kab. Jepara	3,63	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Rembang	3,64	Sangat Baik
15	Pemerintah Kab. Blora	3,27	Baik
16	Pemerintah Kab. Banyumas	3,39	Baik
17	Pemerintah Kab. Cilacap	3,46	Baik
18	Pemerintah Kab. Purbalingga	3,83	Sangat Baik
19	Pemerintah Kab. Banjarnegara	3,29	Baik
20	Pemerintah Kab. Magelang	3,13	Baik
21	Pemerintah Kab. Temanggung	2,80	Baik
22	Pemerintah Kab. Wonosobo	3,54	Sangat Baik
23	Pemerintah Kab. Purworejo	3,19	Baik
24	Pemerintah Kab. Kebumen	3,70	Sangat Baik
25	Pemerintah Kab. Klaten	3,70	Sangat Baik
26	Pemerintah Kab. Boyolali	3,65	Sangat Baik
27	Pemerintah Kab. Sragen	4,26	Memuaskan
28	Pemerintah Kab. Sukoharjo	4,35	Memuaskan
29	Pemerintah Kab. Karanganyar	3,52	Sangat Baik
30	Pemerintah Kab. Wonogiri	3,94	Sangat Baik
31	Pemerintah Kota Semarang	3,89	Sangat Baik
32	Pemerintah Kota Salatiga	3,26	Baik
33	Pemerintah Kota Pekalongan	3,29	Baik
34	Pemerintah Kota Tegal	3,76	Sangat Baik
35	Pemerintah Kota Magelang	3,36	Baik
36	Pemerintah Kota Surakarta	3,74	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	3,62	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Gresik	4,28	Memuaskan
3	Pemerintah Kab. Mojokerto	3,52	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Sidoarjo	3,11	Baik
5	Pemerintah Kab. Jombang	3,49	Baik
6	Pemerintah Kab. Sampang	3,57	Sangat Baik
7	Pemerintah Kab. Pamekasan	2,89	Baik
8	Pemerintah Kab. Sumenep	3,18	Baik
9	Pemerintah Kab. Bangkalan	2,63	Baik
10	Pemerintah Kab. Bondowoso	2,90	Baik
11	Pemerintah Kab. Situbondo	4,17	Sangat Baik
12	Pemerintah Kab. Banyuwangi	4,50	Memuaskan
13	Pemerintah Kab. Jember	2,56	Cukup
14	Pemerintah Kab. Malang	3,36	Baik
15	Pemerintah Kab. Pasuruan	2,47	Cukup
16	Pemerintah Kab. Probolinggo	3,33	Baik
17	Pemerintah Kab. Lumajang	2,93	Baik
18	Pemerintah Kab. Kediri	4,27	Memuaskan
19	Pemerintah Kab. Tulungagung	3,09	Baik
20	Pemerintah Kab. Nganjuk	3,62	Sangat Baik
21	Pemerintah Kab. Trenggalek	4,21	Memuaskan
22	Pemerintah Kab. Blitar	3,63	Sangat Baik
23	Pemerintah Kab. Madiun	4,30	Memuaskan
24	Pemerintah Kab. Ngawi	3,23	Baik
25	Pemerintah Kab. Magetan	2,76	Baik
26	Pemerintah Kab. Ponorogo	2,94	Baik
27	Pemerintah Kab. Pacitan	3,34	Baik
28	Pemerintah Kab. Bojonegoro	3,65	Sangat Baik
29	Pemerintah Kab. Tuban	3,90	Sangat Baik
30	Pemerintah Kab. Lamongan	3,96	Sangat Baik
31	Pemerintah Kota Surabaya	4,49	Memuaskan
32	Pemerintah Kota Mojokerto	4,26	Memuaskan
33	Pemerintah Kota Malang	3,82	Sangat Baik
34	Pemerintah Kota Pasuruan	3,62	Sangat Baik
35	Pemerintah Kota Probolinggo	3,10	Baik
36	Pemerintah Kota Blitar	3,68	Sangat Baik
37	Pemerintah Kota Kediri	3,65	Sangat Baik
38	Pemerintah Kota Madiun	4,45	Memuaskan
39	Pemerintah Kota Batu	3,35	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	3,58	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Sambas	2,65	Baik
3	Pemerintah Kab. Sanggau	2,88	Baik
4	Pemerintah Kab. Sintang	1,89	Cukup
5	Pemerintah Kab. Mempawah	2,61	Baik
6	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	2,78	Baik
7	Pemerintah Kab. Ketapang	3,00	Baik
8	Pemerintah Kab. Bengkayang	2,46	Cukup
9	Pemerintah Kab. Landak	2,21	Cukup
10	Pemerintah Kab. Melawi	2,26	Cukup
11	Pemerintah Kab. Sekadau	3,05	Baik
12	Pemerintah Kab. Kubu Raya	3,07	Baik
13	Pemerintah Kab. Kayong Utara	2,15	Cukup
14	Pemerintah Kota Pontianak	3,43	Baik
15	Pemerintah Kota Singkawang	3,33	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	2,75	Baik
2	Pemerintah Kab. Kapuas	2,21	Cukup
3	Pemerintah Kab. Barito Utara	2,21	Cukup
4	Pemerintah Kab. Barito Selatan	3,19	Baik
5	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	3,11	Baik
6	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	2,55	Cukup
7	Pemerintah Kab. Pulang Pisau	2,58	Cukup
8	Pemerintah Kab. Gunung Mas	2,31	Cukup
9	Pemerintah Kab. Lamandau	2,59	Cukup
10	Pemerintah Kab. Sukamara	2,48	Cukup
11	Pemerintah Kab. Murung Raya	2,44	Cukup
12	Pemerintah Kab. Katingan	3,02	Baik
13	Pemerintah Kab. Seruyan	1,91	Cukup
14	Pemerintah Kab. Barito Timur	1,86	Cukup
15	Pemerintah Kota Palangka Raya	3,03	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	2,69	Baik
2	Pemerintah Kab. Banjar	2,87	Baik
3	Pemerintah Kab. Tanah Laut	3,12	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
4	Pemerintah Kab. Tapin	3,09	Baik
5	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	3,51	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	2,69	Baik
7	Pemerintah Kab. Barito Kuala	2,59	Cukup
8	Pemerintah Kab. Tabalong	3,21	Baik
9	Pemerintah Kab. Kotabaru	2,28	Cukup
10	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	2,18	Cukup
11	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	3,17	Baik
12	Pemerintah Kab. Balangan	2,69	Baik
13	Pemerintah Kota Banjarmasin	4,00	Sangat Baik
14	Pemerintah Kota Banjarbaru	2,68	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	2,91	Baik
2	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	2,54	Cukup
3	Pemerintah Kab. Paser	2,90	Baik
4	Pemerintah Kab. Berau	2,02	Cukup
5	Pemerintah Kab. Kutai Barat	2,50	Cukup
6	Pemerintah Kab. Kutai Timur	3,20	Baik
7	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	2,85	Baik
8	Pemerintah Kab. Mahakam Ulu	1,11	Kurang
9	Pemerintah Kota Samarinda	3,14	Baik
10	Pemerintah Kota Balikpapan	3,75	Sangat Baik
11	Pemerintah Kota Bontang	2,83	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	2,83	Baik
2	Pemerintah Kab. Bulungan	3,34	Baik
3	Pemerintah Kab. Malinau	2,34	Cukup
4	Pemerintah Kab. Nunukan	2,61	Baik
5	Pemerintah Kab. Tana Tidung	2,34	Cukup
6	Pemerintah Kota Tarakan	2,92	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	2,30	Cukup
2	Pemerintah Kab. Minahasa	1,81	Cukup
3	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	3,52	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	2,29	Cukup
5	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	2,19	Cukup
6	Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud	2,18	Cukup
7	Pemerintah Kab. Minahasa Utara	2,68	Baik
8	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	2,19	Cukup
9	Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro	2,15	Cukup
10	Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara	2,83	Baik
11	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2,34	Cukup
12	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur	2,46	Cukup
13	Pemerintah Kota Manado	2,95	Baik
14	Pemerintah Kota Bitung	2,83	Baik
15	Pemerintah Kota Tomohon	3,00	Baik
16	Pemerintah Kota Kotamobagu	2,73	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Gorontalo

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Gorontalo	3,22	Baik
2	Pemerintah Kab. Gorontalo	2,68	Baik
3	Pemerintah Kab. Boalemo	2,02	Cukup
4	Pemerintah Kab. Pohuwato	2,41	Cukup
5	Pemerintah Kab. Bone Bolango	2,95	Baik
6	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara	2,64	Baik
7	Pemerintah Kota Gorontalo	2,59	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	3,14	Baik
2	Pemerintah Kab. Poso	2,13	Cukup
3	Pemerintah Kab. Donggala	1,64	Kurang
4	Pemerintah Kab. Tolitoli	2,18	Cukup
5	Pemerintah Kab. Banggai	3,23	Baik
6	Pemerintah Kab. Buol	2,95	Baik
7	Pemerintah Kab. Morowali	2,88	Baik
8	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	2,32	Cukup
9	Pemerintah Kab. Parigi Moutong	2,68	Baik
10	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	2,13	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
11	Pemerintah Kab. Sigi	2,16	Cukup
12	Pemerintah Kab. Banggai Laut	1,47	Kurang
13	Pemerintah Kab. Morowali Utara	2,08	Cukup
14	Pemerintah Kota Palu	2,54	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	3,09	Baik
2	Pemerintah Kab. Pinrang	2,79	Baik
3	Pemerintah Kab. Gowa	2,70	Baik
4	Pemerintah Kab. Wajo	2,67	Baik
5	Pemerintah Kab. Bone	2,85	Baik
6	Pemerintah Kab. Tana Toraja	1,70	Kurang
7	Pemerintah Kab. Maros	2,55	Cukup
8	Pemerintah Kab. Luwu	2,58	Cukup
9	Pemerintah Kab. Sinjai	2,67	Baik
10	Pemerintah Kab. Bulukumba	2,30	Cukup
11	Pemerintah Kab. Bantaeng	3,04	Baik
12	Pemerintah Kab. Jeneponto	3,09	Baik
13	Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar	1,93	Cukup
14	Pemerintah Kab. Takalar	2,27	Cukup
15	Pemerintah Kab. Barru	2,39	Cukup
16	Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang	2,87	Baik
17	Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2,31	Cukup
18	Pemerintah Kab. Soppeng	2,67	Baik
19	Pemerintah Kab. Enrekang	2,66	Baik
20	Pemerintah Kab. Luwu Utara	3,18	Baik
21	Pemerintah Kab. Luwu Timur	3,05	Baik
22	Pemerintah Kab. Toraja Utara	2,30	Cukup
23	Pemerintah Kota Makassar	3,41	Baik
24	Pemerintah Kota Parepare	2,62	Baik
25	Pemerintah Kota Palopo	3,31	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	2,59	Cukup
2	Pemerintah Kab. Konawe	1,84	Cukup
3	Pemerintah Kab. Buton	2,02	Cukup
4	Pemerintah Kab. Muna	2,24	Cukup
5	Pemerintah Kab. Kolaka	3,48	Baik
6	Pemerintah Kab. Konawe Selatan	2,67	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
7	Pemerintah Kab. Kolaka Utara	2,04	Cukup
8	Pemerintah Kab. Bombana	2,13	Cukup
9	Pemerintah Kab. Wakatobi	1,50	Kurang
10	Pemerintah Kab. Buton Utara	2,05	Cukup
11	Pemerintah Kab. Konawe Utara	2,10	Cukup
12	Pemerintah Kab. Kolaka Timur	2,33	Cukup
13	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan	1,96	Cukup
14	Pemerintah Kab. Buton Selatan	1,32	Kurang
15	Pemerintah Kab. Buton Tengah	2,61	Baik
16	Pemerintah Kab. Muna Barat	1,81	Cukup
17	Pemerintah Kota Kendari	2,42	Cukup
18	Pemerintah Kota Baubau	1,95	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	2,89	Baik
2	Pemerintah Kab. Pasangkayu	1,75	Kurang
3	Pemerintah Kab. Mamuju	2,15	Cukup
4	Pemerintah Kab. Mamasa	1,23	Kurang
5	Pemerintah Kab. Polewali Mandar	3,86	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Majene	2,56	Cukup
7	Pemerintah Kab. Mamuju Tengah	2,19	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Bali

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Bali	4,07	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Buleleng	3,45	Baik
3	Pemerintah Kab. Jembrana	3,14	Baik
4	Pemerintah Kab. Klungkung	3,02	Baik
5	Pemerintah Kab. Gianyar	3,14	Baik
6	Pemerintah Kab. Karangasem	2,30	Cukup
7	Pemerintah Kab. Bangli	2,48	Cukup
8	Pemerintah Kab. Badung	3,66	Sangat Baik
9	Pemerintah Kab. Tabanan	3,77	Sangat Baik
10	Pemerintah Kota Denpasar	3,80	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,40	Baik
2	Pemerintah Kab. Lombok Barat	2,77	Baik
3	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	2,69	Baik
4	Pemerintah Kab. Lombok Timur	2,46	Cukup
5	Pemerintah Kab. Bima	1,88	Cukup
6	Pemerintah Kab. Sumbawa	2,75	Baik
7	Pemerintah Kab. Dompu	1,95	Cukup
8	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	3,13	Baik
9	Pemerintah Kab. Lombok Utara	2,40	Cukup
10	Pemerintah Kota Mataram	3,47	Baik
11	Pemerintah Kota Bima	2,41	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	3,83	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Kupang	1,91	Cukup
3	Pemerintah Kab. Belu	2,29	Cukup
4	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	2,09	Cukup
5	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	2,62	Baik
6	Pemerintah Kab. Alor	2,18	Cukup
7	Pemerintah Kab. Sikka	1,94	Cukup
8	Pemerintah Kab. Flores Timur	2,07	Cukup
9	Pemerintah Kab. Ende	1,98	Cukup
10	Pemerintah Kab. Ngada	1,36	Kurang
11	Pemerintah Kab. Manggarai	2,68	Baik
12	Pemerintah Kab. Sumba Timur	2,40	Cukup
13	Pemerintah Kab. Sumba Barat	2,55	Cukup
14	Pemerintah Kab. Lembata	2,15	Cukup
15	Pemerintah Kab. Rote Ndao	2,99	Baik
16	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	3,44	Baik
17	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	2,62	Baik
18	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	1,68	Kurang
19	Pemerintah Kab. Nagekeo	1,77	Kurang
20	Pemerintah Kab. Sumba Tengah	1,58	Kurang
21	Pemerintah Kab. Sabu Raijua	2,43	Cukup
22	Pemerintah Kab. Malaka	2,07	Cukup
23	Pemerintah Kota Kupang	2,20	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Maluku

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Maluku	2,23	Cukup
2	Pemerintah Kab. Maluku Tengah	1,83	Cukup
3	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara	1,94	Cukup
4	Pemerintah Kab. Buru	1,39	Kurang
5	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	2,03	Cukup
6	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	2,17	Cukup
7	Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat	1,86	Cukup
8	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur	1,87	Cukup
9	Pemerintah Kab. Buru Selatan	1,44	Kurang
10	Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya	1,95	Cukup
11	Pemerintah Kota Ambon	2,25	Cukup
12	Pemerintah Kota Tual	2,13	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Maluku Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	2,49	Cukup
2	Pemerintah Kab. Halmahera Barat	1,79	Kurang
3	Pemerintah Kab. Halmahera Tengah	1,85	Cukup
4	Pemerintah Kab. Kepulauan Sula	1,38	Kurang
5	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	2,21	Cukup
6	Pemerintah Kab. Halmahera Utara	2,34	Cukup
7	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	1,01	Kurang
8	Pemerintah Kab. Pulau Morotai	2,00	Cukup
9	Pemerintah Kab. Pulau Taliabu	1,73	Kurang
10	Pemerintah Kota Ternate	1,20	Kurang
11	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	2,26	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua	1,91	Cukup
2	Pemerintah Kab. Jayapura	2,63	Baik
3	Pemerintah Kab. Keerom	1,43	Kurang
4	Pemerintah Kota Jayapura	2,30	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Barat	2,28	Cukup
2	Pemerintah Kab. Manokwari	1,68	Kurang
3	Pemerintah Kab. Teluk Bintuni	1,53	Kurang
4	Pemerintah Kab. Teluk Wondama	1,94	Cukup
5	Pemerintah Kab. Fak-Fak	1,54	Kurang
6	Pemerintah Kab. Kaimana	2,09	Cukup
7	Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak	1,17	Kurang
8	Pemerintah Kab. Manokwari Selatan	1,55	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Selatan	1,00	Kurang
2	Pemerintah Kab. Merauke	1,66	Kurang
3	Pemerintah Kab. Boven Digoel	1,80	Cukup
4	Pemerintah Kab. Mappi	1,73	Kurang
5	Pemerintah Kab. Asmat	1,00	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Tengah	1,76	Kurang
2	Pemerintah Kab. Puncak Jaya	1,88	Cukup
3	Pemerintah Kab. Paniai	1,00	Kurang
4	Pemerintah Kab. Mimika	2,00	Cukup
5	Pemerintah Kab. Puncak	1,52	Kurang
6	Pemerintah Kab. Deiyai	1,00	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Pegunungan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan	1,25	Kurang
2	Pemerintah Kab. Jayawijaya	1,51	Kurang
3	Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah	1,48	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Barat Daya

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya	1,97	Cukup
2	Pemerintah Kab. Sorong	2,25	Cukup
3	Pemerintah Kab. Tambrau	1,41	Kurang
4	Pemerintah Kab. Maybrat	1,17	Kurang
5	Pemerintah Kota Sorong	1,78	Kurang

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Januari 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 866 TAHUN 2023

TENTANG

UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Menteri menetapkan unit kerja berpredikat WBK/WBBM berdasarkan rekomendasi Tim Penilai Nasional;
- b. bahwa unit kerja yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat WBK/WBBM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan unit kerja sebagai unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

KEDUA : Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Menginstruksikan kepada pimpinan dan seluruh pegawai di unit kerja tersebut untuk terus melanjutkan pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi sehingga unit kerja dapat menjadi unit kerja percontohan pelayanan publik dan pencegahan korupsi.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 866 TAHUN 2023
TENTANG
UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) TAHUN 2023

**NAMA-NAMA UNIT KERJA BERPREDIKAT
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
TAHUN 2023**

**UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
(WBK)**

No	Nama Unit Kerja	Nama Instansi Pemerintah
1.	Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh	Arsip Nasional Republik Indonesia
2.	Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi	Arsip Nasional Republik Indonesia
3.	Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik	Badan Informasi Geospasial
4.	Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur	Badan Intelijen Negara
5.	Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
6.	Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
7.	Perwakilan BKKBN Provinsi Riau	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
8.	BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat	Badan Narkotika Nasional
9.	BNN Kabupaten Magelang	Badan Narkotika Nasional
10.	Balai Besar POM di Manado	Badan Pengawas Obat dan Makanan
11.	Balai Besar POM di Banda Aceh	Badan Pengawas Obat dan

No	Nama Unit Kerja	Nama Instansi Pemerintah
		Makanan
12.	Balai POM di Kupang	Badan Pengawas Obat dan Makanan
13.	Deputi Bidang Akuntan Negara	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
14.	Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
15.	Perwakilan BPKP Sumatera Barat	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
16.	Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Dan Kemaritiman	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
17.	BPS Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Pusat Statistik
18.	BPS Kabupaten Semarang	Badan Pusat Statistik
19.	BPS Kabupaten Kendal	Badan Pusat Statistik
20.	BPS Provinsi Kalimantan Utara	Badan Pusat Statistik
21.	Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
22.	Kantor Pertanahan Kota Bitung	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
23.	Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
24.	Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
25.	Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
26.	Kantor Pertanahan Kota Balikpapan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
27.	Direktorat Bioenergi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Nama Unit Kerja	Nama Instansi Pemerintah
28.	BKIPM Balikpapan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
29.	RS Pusat Otak Nasional (RSPON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	Kementerian Kesehatan
30.	Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Palembang	Kementerian Kesehatan
31.	Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Gorontalo	Kementerian Kesehatan
32.	Direktorat Konservasi Tanah dan Air (KTA)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
33.	Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
34.	Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun (PLTTDLB3 dan NB3)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
35.	Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver, Kanada	Kementerian Luar Negeri
36.	Balai Teknik Pantai	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
37.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
38.	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
39.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
40.	Politeknik STMI Jakarta	Kementerian Perindustrian
41.	Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta	Kementerian Perindustrian
42.	Politeknik ATI Makassar	Kementerian Perindustrian
43.	Pusat Kodifikasi Baranahan Kementerian Pertahanan	Kementerian Pertahanan

No	Nama Unit Kerja	Nama Instansi Pemerintah
44.	Sentra Budi Perkasa di Palembang	Kementerian Sosial
45.	Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Lembaga Administrasi Negara
46.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka)	Mahkamah Konstitusi
47.	Direktorat Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
48.	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI	Sekretariat Jenderal DPR RI
49.	Rumah Sakit Tk. II Pelamonia Kesdam XIV/Hsn	Tentara Nasional Indonesia
50.	Pusat Kesenjataan Kavaleri TNI AD	Tentara Nasional Indonesia
51.	Resimen Induk Kodam XVI/Ptm	Tentara Nasional Indonesia
52.	Divisi Infanteri 2 Kostrad	Tentara Nasional Indonesia
53.	Korem 044/Gapo Kodam II/Swj.	Tentara Nasional Indonesia
54.	Korem 073/Makutarama Kodam IV/Dip.	Tentara Nasional Indonesia
55.	Akademi Militer	Tentara Nasional Indonesia
56.	Resimen Arhanud 1/Faletehan Kodam Jaya	Tentara Nasional Indonesia
57.	Komando Lintas Laut Militer	Tentara Nasional Indonesia
58.	Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun	Tentara Nasional Indonesia
59.	RSUD Dr. Soedono Madiun Provinsi Jawa Timur	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
60.	UPT Keselamatan Kerja Provinsi Jawa Timur	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
61.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru Provinsi DKI Jakarta	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
62.	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	Pemerintah Provinsi Bali
63.	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya	Pemerintah Provinsi Bali

No	Nama Unit Kerja	Nama Instansi Pemerintah
	Manusia Provinsi Bali	
64.	Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung	Pemerintah Kabupaten Badung
65.	Puskesmas Ciparay DTP Kabupaten Bandung	Pemerintah Kabupaten Bandung
66.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
67.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung	Pemerintah Kabupaten Klungkung
68.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung	Pemerintah Kabupaten Klungkung
69.	UPTD. Puskesmas Banjarangkan I Kabupaten Klungkung	Pemerintah Kabupaten Klungkung
70.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
71.	Puskesmas Taman Kabupaten Sidoarjo	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
72.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang	Pemerintah Kabupaten Sumedang
73.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Pemerintah Kabupaten Tabalong
74.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Kabupaten Tulungagung
75.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KRT Setjonegoro Kabupaten Wonosobo	Pemerintah Kabupaten Wonosobo
76.	UPTD Puskesmas Pulomerak Kota Cilegon	Pemerintah Kota Cilegon
77.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Pemerintah Kota Denpasar
78.	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	Pemerintah Kota Denpasar

No	Nama Unit Kerja	Nama Instansi Pemerintah
79.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang	Pemerintah Kota Magelang
80.	RSUD Bendan Kota Pekalongan	Pemerintah Kota Pekalongan
81.	UPTD Puskesmas Manyaran Kota Semarang	Pemerintah Kota Semarang
82.	UPT Puskesmas Singkawang Selatan II Kota Singkawang	Pemerintah Kota Singkawang
83.	Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi	Pemerintah Kota Sukabumi
84.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya	Pemerintah Kota Surabaya
85.	RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya	Pemerintah Kota Surabaya

UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

No	Nama Unit Kerja	Nama Instansi Pemerintah
1.	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2.	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	Kementerian Keuangan
3.	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan	Kementerian Keuangan
4.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	Kementerian Keuangan
5.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten	Kementerian Keuangan
6.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali	Kementerian Keuangan
7.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta	Kementerian Keuangan
8.	Kantor Wilayah Direktorat	Kementerian Keuangan

No	Nama Unit Kerja	Nama Instansi Pemerintah
	Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	
9.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan	Kementerian Keuangan
10.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara	Kementerian Keuangan
11.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan	Kementerian Keuangan
12.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten	Kementerian Keuangan
13.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta	Kementerian Keuangan
14.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau	Kementerian Keuangan
15.	Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia	Kementerian Luar Negeri
16.	Biro SDM POLDA Sumatera Selatan	Kepolisian Negara Republik Indonesia
17.	Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan	Lembaga Administrasi Negara
18.	Pengadilan Agama Magelang	Mahkamah Agung RI
19.	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
20.	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial UPT Dinas Kesehatan Provinsi DIY	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
21.	Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
22.	UPTD Puskesmas Sempu	Pemerintah Kabupaten

No	Nama Unit Kerja	Nama Instansi Pemerintah
	Kabupaten Banyuwangi	Banyuwangi
23.	Puskesmas Kwadungan Kabupaten Ngawi	Pemerintah Kabupaten Ngawi
24.	RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang	Pemerintah Kota Semarang

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS